

RESPON JEPANG TERHADAP KOMPLEKSITAS KAWASAN ASIA TIMUR

TAHUN 2013-2017

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Konsentrasi *International Security and Peace*



Disusun oleh:

RANI SHABRINA ANJARINI

145120401111050

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN
Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur
Tahun 2013-2017

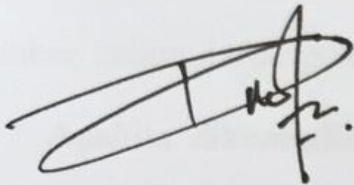
SKRIPSI

Disusun oleh:
Rani Shabrina Anjarini
145120401111050

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Komprehensif
tanggal 24 April 2018

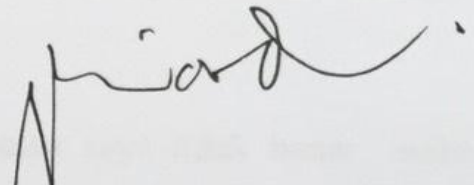
Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji



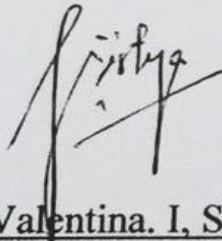
Ni Komang Desy S A P, S.IP., MSi
NIK. 2011028412302001

Sekretaris Majelis Penguji



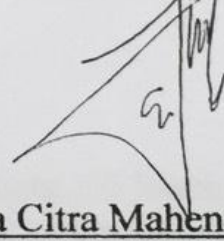
Reza Triarda, S.Sos., MA
NIK. 2016078902131001

Anggota Majelis Penguji I



Firstyarinda Valentina. I, S.Sos., MSi
NIK. 2013098602142001

Anggota Majelis Penguji II




Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : Rani Shabrina Anjarini

NIM : 145120401111050

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“RESPON JEPANG TERHADAP KOMPLEKSITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR TAHUN 2013-2017”** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan tulisan saya, diberikan catatan kaki dan dicantumkan sebagai sumber dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Malang, 02 Maret 2018



RANI SHABRINA ANJARINI
NIM. 145120401111050

HALAMAN PERSETUJUAN

Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur

Tahun 2013-2017

SKRIPSI

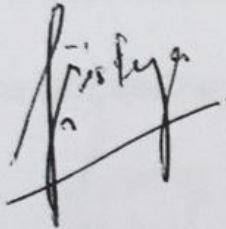
Disusun oleh:

Rani Shabrina Anjarini

145120401111050

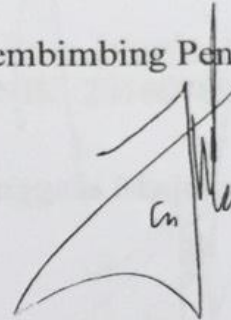
Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama



Firstyarinda Valentina. I, S.Sos., MSi
NIK. 2013098602142001

Pembimbing Pendamping



Yustika Citra Mahendra, S.Sos, MA
NIP. 198408232015041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.devSt
NIP. 197802202010121001

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Allah never burden a soul beyond what it can bear”

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat berkah, nikmat, ridho, dan kasih Sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur tahun 2013-2017” dengan baik dan lancar. Penulis menyampaikan banyak terimakasih, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan nikmat, berkah, ridho, dan kasih Sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Alhamdulillah, terimakasih ya Allah, *I'm so nothing without you*. Tidak lupa penulis juga ucapkan terimakasih kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi penulis.
2. Kedua orangtua tercinta, malaikat pelindungku, Ayah Agus Suprayogi dan Bunda Linda Mardiana. Terimakasih atas dukungan kalian, terimakasih atas kasih Sayang yang selalu dicurahkan, sehingga Mbak bisa sampai pada titik ini. Do'a dan restu kalian akan selalu menjadi jalan untukku melangkah. Untuk bidadari kecilku, Adik Annisa Bela Nurani, terimakasih telah mendukung dan senantiasa menghibur hari-hariku. Untuk Mbahku, Mbah Fatimatus Zuhra, terimakasih selalu memberikan perhatian-perhatian, doa, dan dukungan untukku, sehingga aku bisa terus semangat dalam belajar. Pesanmu akan selalu ku ingat.
These words can't show how much I love you☺
3. Alm. Bambang Djunaidi (De John), Pakde terbaik. Terimakasih selalu memberikan Rani dukungan dan doa. Walaupun sekarang kita berada di alam yang beda, tapi, Rani Yakin De

John bisa melihat Rani dari alam sana. Terimakasih, berkat De Jon, Rani belajar apa arti kesabaran, sehingga Rani bisa lebih sabar dalam menghadapi masalah. *Allah loves you so much, De.*

4. Dosen Pembimbing I, Ibu Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., Msi, terimakasih banyak telah sabar membimbing, memberikan arahan dan saran, serta meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan bimbingan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
5. Dosen Pembimbing II, Bapak Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA yang juga banyak memberikan masukan dan arahan sehingga membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar
6. Dosen Penguji I, Ni Komang Desy Setyawati Arya Pinatih, S.IP, M.Si, terimakasih telah banyak membantu penulis untuk menjadi lebih kritis dalam memahami isu dan penelitian yang penulis kerjakan. Terimakasih juga Bu Desy telah bersedia untuk memberikan arahan kepada saya
7. Dosen Penguji II, Reza Triarda, S.Sos, MA, terimakasih telah banyak memberikan masukan dan saran bagi penulis untuk lebih baik dalam melakukan penelitian kedepannya.
8. Sahabat seperjuangan AL-SHOUBAB, Ipik, Lia, Hany, Rully, Dhita, Syifa, *thankyou for always being there for me. I love you guys so much! xoxo*
9. Sahabat-sahabat tercinta, Auliya Delananda dan Athira Sulistyasmara, terimakasih telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesahku *ya!*
10. Ciwi-ciwiku, Claudya Salwa Dyansa, Adilah, Mbak Dyah Nur Septiana, Nury, Amoy, Phire, Aiqa, *thankyou so much!*
11. Untuk kakak tingkat HI yang direpotkan oleh saya, yang saya kenal dari usaha *Sok Kenal Sok Deket*, Kak Izza Annisa, terimakasih telah memberikan penjelasan mengenai teori yang

dipakai di skripsi ini, Kak Bangkit Mahaztra yang sudah berbaik hati meminjamkan saya buku. Terimakasih telah memudahkan saya menyelesaikan skripsi ini.

12. Prastyo Pangestu yang sudah membantu mendownload buku Barry Buzan dan Ole Waever, *Regional Security Complex Theory*
13. Pak Dadang, Pak Andi, Pak Syaiful, Mbak Dita yang telah membantu mengurus keperluan administrasi penulis dalam mengajukan proposal skripsi hingga skripsi ini selesai
14. Untuk seluruh pihak yang membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.



ABSTRACT**JAPAN'S RESPONSE TOWARDS EAST ASIA REGIONAL SECURITY
COMPLEX 2013-2017****By: Rani Shabrina Anjarini**

This research aims to know the Japan's response towards east asia regional security complex (RSC) 2013-2017. As we know that East Asia is a conflictual region that consists of powerful countries such as Japan, China, North Korea, and South Korea. According to Barry Buzan and Ole Waever, RSC emphasizes on a fact that threat doesn't come from a far country, but threat comes from near country that can threaten other countries in the region. This research uses Regional Security Complex Theory (RSCT) by Barry Buzan and Ole Waever. By using four main variables that explain how RSCT is formed named boundary, anarchic structure, polarity, and social construction that focus in amity-enmity pattern between countries in region, this research will discuss how the main variables of RSCT can form East Asia RSC that makes Japan gives respond. As known that Japan must obey Pacifist Constitution that forbids Japan to increase military capability since the defeat of Japan in World War II. The role of United States of America (USA) in East Asia as the biggest alliance of Japan and South Korea, regional conflict between China and Japan in Senkaku/Diaoyu Island, Japan and South Korea in Takeshima/Dokdo Island, and North Korea nuclear program makes RSC in East Asia increasingly conflictual. By using the RSC's form of configuration, internal transformation variable is used for analyzing Japan's response towards East Asia RSC in 2013-2017.

Keywords: Regional Security Complex Theory, East Asia, Japan's response

ABSTRAK**RESPON JEPANG TERHADAP KOMPLEKSITAS KEAMANAN KAWASAN
ASIA TIMUR TAHUN 2013-2017**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa respon Jepang terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur. Seperti yang diketahui, Asia Timur merupakan kawasan yang konfliktual yang terdiri dari negara-negara kuat seperti Jepang, China, Korea Utara, dan Korea Selatan. Menurut Barry Buzan dan Ole Waever, kompleksitas keamanan kawasan menekankan pada fakta bahwa ancaman tidak datang dari negara yang jauh, namun, ancaman datang dari negara tetangga di kawasan. Penelitian ini menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT) dengan memakai empat variabel utama yang menjelaskan bagaimana RSCT terbentuk yaitu *boundary*, *anarchic structure*, *polarity*, dan *social construction* yang berfokus pada pola *amity-enmity* negara-negara dalam kawasan. Penelitian ini kemudian akan menganalisa bagaimana variabel utama dalam RSCT dapat membentuk kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dan membuat Jepang merespon. Seperti yang diketahui, Jepang harusnya taat pada konstitusi Pasifis yang melarang Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militer sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Peran Amerika Serikat di Asia Timur sebagai aliansi terbesar Jepang dan Korea Selatan, konflik regional antara China dan Jepang pada Pulau Senkaku/Diaoyu, Jepang dan Korea Selatan pada Pulau Takhesima/Dokdo, dan pengembangan nuklir Korea Utara membuat kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur menjadi semakin konfliktual. Dengan menggunakan variabel turunan RSCT, variabel *internal transformation* digunakan untuk menganalisa respon Jepang terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur tahun 2013-2017

Kata Kunci : Kompleksitas keamanan kawasan, Asia Timur, Respon Jepang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur tahun 2013-2017*” ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis kritik dan saran dibutuhkan bagi penulis agar penulis dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya mahasiswa-mahasiswi yang juga sedang berjuang untuk menulis skripsi.

Malang, 02 Maret 2018

Penulis

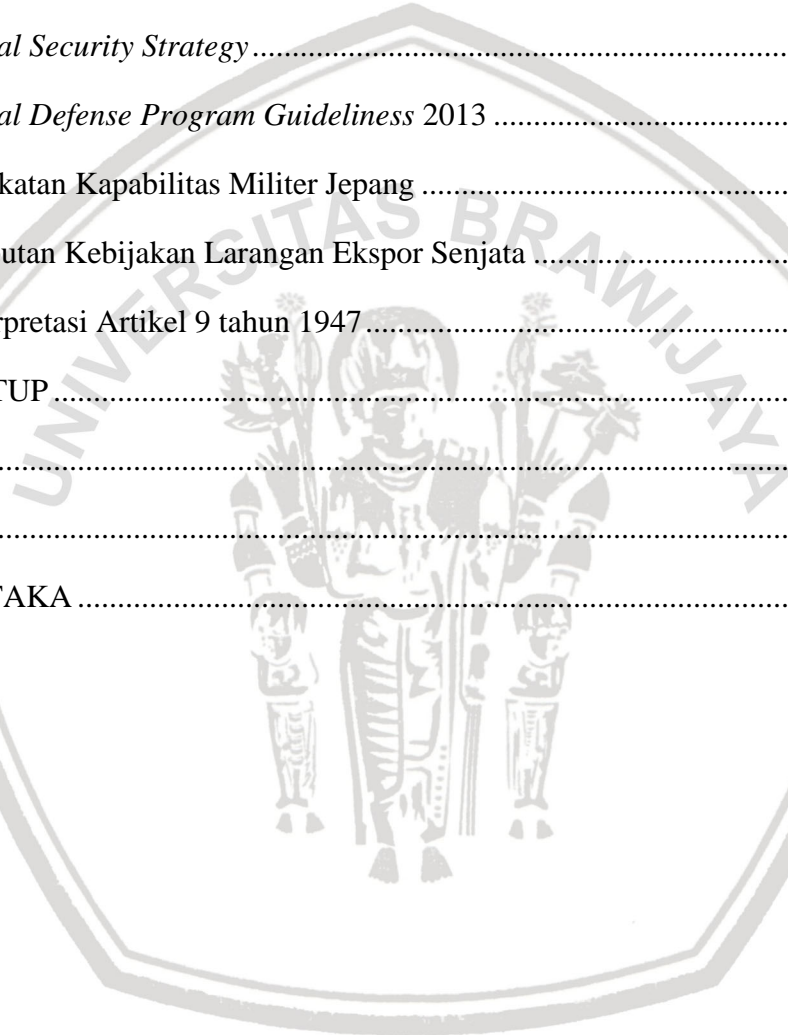
DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
2.1 Studi Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Konseptual.....	20
2.21 <i>Regional Security Complex Theory</i>	20
2.3 Definisi Operasional	36
2.4 Alur Pemikiran.....	41



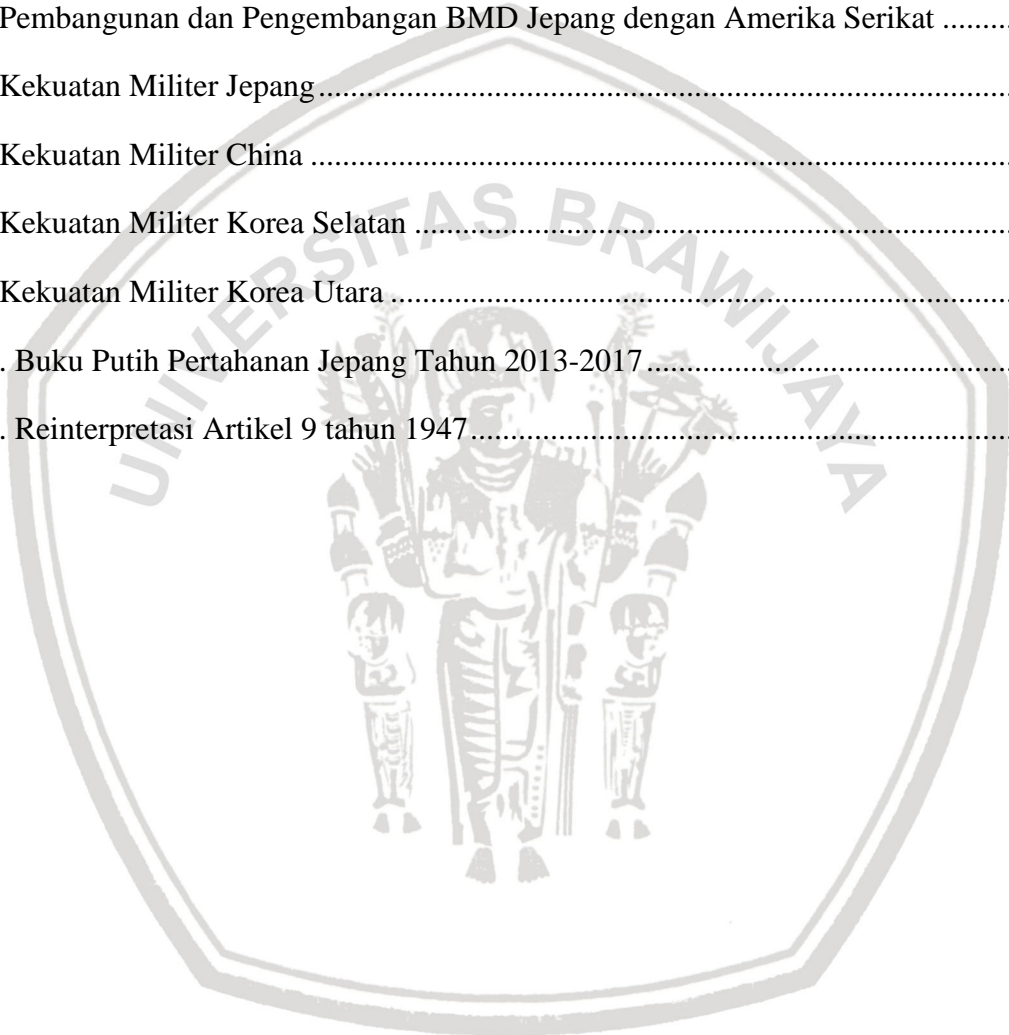
2.5 Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4 Teknik Analisa Data	45
3.5 Sistematika Penulisan	45
BAB IV REGIONAL SECURITY COMPLEX DI ASIA TIMUR	49
4.1 Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur	49
4.1.1 Pada Masa Perang Dingin.....	51
4.1.2 Pada Masa Pasca Perang Dingin.....	51
4.2 <i>Boundary</i> Kawasan Asia Timur.....	56
4.3 <i>Anarchic Structure</i> Kawasan Asia Timur.....	59
4.3.1 Penetrasi Amerika Serikat	61
4.4 <i>Polarity</i> Kawasan Asia Timur	66
4.4.1 Multipolaritas Kawasan Asia Timur	67
4.5 <i>Social Construction</i> Kawasan Asia Timur.....	92
4.5.1 Pola <i>Amity</i>	93
a. China dan Korea Utara	93
4.5.2 Pola <i>Enmity</i>	96
a. China dan Jepang	96
b. Jepang dan Korea Selatan	98
c. Jepang dan Korea Utara	102
d. Korea Selatan dan Korea Utara.....	106

BAB V RESPON JEPANG TERHADAP KOMPLEKSITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR TAHUN 2013-2017	109
5.1 <i>Internal Transformation</i> Jepang sebagai Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur.....	109
5.2 <i>Internal Transformation</i> Jepang: Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Jepang Melalui Kebijakan <i>Proactive Pacifism</i>	120
5.2.1 <i>National Security Strategy</i>	122
5.2.2 <i>National Defense Program Guideliness</i> 2013	125
5.2.3 Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang	128
5.2.4 Pencabutan Kebijakan Larangan Ekspor Senjata	133
5.2.5 Reinterpretasi Artikel 9 tahun 1947	137
BAB VI PENUTUP	145
6.1 Kesimpulan	145
6.2 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Operasionalisasi <i>Regional Security Complex Theory</i>	39
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Turunan <i>Regional Security Complex Theory</i>	40
Tabel 3. 15 Negara dengan Peningkatan Kapabilitas Militer Tertinggi 2017	74
Tabel 4. Perbandingan Kekuatan Negara-Negara Asia Timur	76
Tabel 5. Pembangunan dan Pengembangan BMD Jepang dengan Amerika Serikat	79
Tabel 6. Kekuatan Militer Jepang.....	81
Tabel 7. Kekuatan Militer China	85
Tabel 8. Kekuatan Militer Korea Selatan	88
Tabel 9. Kekuatan Militer Korea Utara	91
Tabel 10. Buku Putih Pertahanan Jepang Tahun 2013-2017	114
Tabel 11. Reinterpretasi Artikel 9 tahun 1947.....	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kompleksitas Kawasan Asia Pada Masa Perang Dingin 50
Gambar 2. Peta Kompleksitas Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin 55
Gambar 3. Peta Kawasan Asia Timur..... 58



DAFTAR SINGKATAN



ADIZ	: <i>Air Defense Identification Zone</i>
AL	: Angkatan Laut
ASAT	: <i>Anti-Satellite Weapons</i>
ASDF	: <i>Air Self-Defense Forces</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asia Nation</i>
ASW	: <i>Anti-submarine Warfare</i>
BDF	: <i>Basic Defense Force</i>
CFC	: <i>Combined Forces Command</i>
CSD	: <i>Collective Self-Defense</i>
DDF	: <i>Dynamic Defense Force</i>
DJDF	: <i>Dynamic Joint Defense Force</i>
DMZ	: <i>Demilitarized Zone</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FMS	: <i>Foreign Military Sales</i>
GNI	: <i>Gross National Income</i>
GSDF	: <i>Ground Self-Defense Forces</i>
GSOMIA	: <i>General Security of Military Information</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HFO	: <i>Heavy Fuel Oil</i>
IISS	: <i>International Institute for Strategic Studies</i>
JCS	: <i>The Joint Chiefs of Staff</i>
JCS	: <i>The Joint Chiefs of Staff</i>
JSDF	: <i>Japan Self-Defense Forces</i>
KEDO	: <i>Korean Peninsula Energy Development Organization</i>
KIC	: <i>Kaesong Industrial Complex</i>
K-Pop	: <i>Korean Pop</i>
MENA	: <i>Middle East and North Africa</i>
MHI	: <i>Mitsubishi Heavy Industries</i>

MSDF	: <i>Maritime Self-Defense Forces</i>
MT	: <i>Metric Ton</i>
MTDP	: <i>Mid-Term Defense Program</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NDPG	: <i>National Defense Program Guidelines</i>
NSC	: <i>National Security Council</i>
NSS	: <i>National Security Strategy</i>
NWS	: <i>Nuclear Weapon State</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PKMs	: <i>Patrol Killer Mediums</i>
PKO	: <i>Peacekeeping Operation</i>
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>
PLAN	: <i>People's Liberation Army Navy</i>
PM	: <i>Perdana Menteri</i>
ROK	: <i>Republic of Korea</i>
ROKA	: <i>Republic of Korean Army</i>
RSCT	: <i>Regional Security Complex Theory</i>
SAARC	: <i>South Asian Association Regional Cooperation</i>
SIPRI	: <i>Stockholm International Peace Research Institute</i>
SLOC	: <i>Sea of Line Communication</i>
SRBM	: <i>Short-Range Ballistic Missile</i>
THAAD	: <i>Terminal High Altitude Area Defense System</i>
UNSCR	: <i>United Nation Security Council Resolution</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>
WMD	: <i>Weapons and Mass Destruction</i>



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Peningkatan *Military Expenditure* Negara-Negara Asia Timur Tahun 2013-2017..... 72

Grafik 2. *Military Expenditure* Korea Utara Tahun 2013-2017 72

Grafik 3. Peningkatan *Military Expenditure* Jepang Tahun 2013-2017 121



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Pembelian Senjata JSDF Setiap Tahun 2013-2017

LAMPIRAN 2. Pengeluaran Anggaran Belanja Militer untuk *Research and Development* Jepang dalam Aspek Pertahanan dan Keamanan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang paling memiliki dinamika keamanan yang kompleks.¹ Seperti diketahui, kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang konfliktual yang terdiri dari negara-negara *powerful* seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Jepang dan China merupakan *great power* dalam kawasan yang memiliki kapabilitas militer dan kekuatan ekonomi yang kuat. Korea Selatan dan Korea Utara merupakan *middle power* yang juga memiliki kapabilitas militer yang kuat. Salah satu isu keamanan yang mengancam kedaulatan dan keamanan Asia Timur adalah kompleksitas keamanan kawasan.

Menurut Barry Buzan dan Ole Waever, kompleksitas keamanan adalah sekelompok negara yang memiliki isu keamanan yang sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.² Buzan dan Waever juga mendefinisikan *Regional Security Complex* (RSC) sebagai hubungan keamanan antar negara di kawasan yang saling mempengaruhi dan terjadi karena negara terletak secara alamiah dalam kawasan yang sama. Hal ini dikarenakan, ancaman lebih mudah terjadi pada negara-negara yang memiliki jarak berdekatan dibandingkan dengan negara-negara yang letaknya berjauhan.³

¹Naoko Munakata, "Transforming East Asia: The Evolution of Regional Economic Integration", Brooking Institution Press, Research Institute of Economic, Trade, and Industry (Japan), 2006, hal 1

² Barry Buzan dan Ole Waever, "Region and Powers: The Structure of International Security", Cambridge University Press 2003, hal 4

³ Ibid, hal 40

Sehingga, negara-negara dalam kawasan memiliki kecenderungan untuk menggantungkan keamanannya satu sama lain sehingga terbentuk *security interdependence* yang terjadi karena keamanan suatu negara memiliki pengaruh bagi negara-negara lain dalam kawasan. Mengutip dari pendapat Hamilton, Buzan dan Waever kemudian juga melihat bahwa *security interdependence* akan terjadi karena setiap negara memiliki *concern* terhadap kapabilitas militer dan intensi dari negara-negara tetangganya. Proses *security interdependence* tersebut kemudian lebih sering terjadi antar aktor yang berada dalam RSC yang sama daripada aktor diluar RSC.⁴ Adanya *security interdependence* dalam kawasan membuat keamanan negara-negara saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Selain itu adanya *security interdependence*, RSCT juga melihat pada adanya pola hubungan *amity-enmity* (pertemanan maupun permusuhan) negara dalam kawasan, penetrasi aktor eksternal, serta polaritas multipolar yang semakin menambah dinamika kompleksitas keamanan kawasan.⁵ Pola *amity-enmity* dalam kawasan Asia Timur ditandai dengan adanya konflik-konflik regional antar negara di kawasan seperti konflik sengketa wilayah Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan China, konflik sengketa wilayah Takeshima/Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan serta ancaman nuklir Korea Utara yang membuat negara-negara dalam kawasan menjadi terancam satu sama lain.

Meskipun kawasan Asia Timur dihuni oleh negara-negara *powerful* yang terdiri dari negara *great power* maupun *middle power*, kekuatan militer negara-negara

⁴Ibid

⁵Ibid

Asia Timur tersebut tetap memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan kekuatan militer yang berbeda-beda pada setiap negara. Seperti contoh, China memiliki kekuatan dalam kapabilitas misil dan memiliki angkatan bersenjata militer sebanyak 3 juta pasukan. Namun, China juga memiliki kelemahan yaitu tidak memiliki aliansi keamanan yang potensial untuk mendukung aspek keamanan dan militer China.⁶

Rival China di Asia Timur, yaitu Jepang juga dapat dikatakan memiliki kekuatan militer yang canggih meskipun Jepang tidak dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal.⁷ Salah satu kapabilitas militer Jepang yang kuat dapat terlihat dari kepemilikan Jepang atas senja anti kapal selam terbesar berjenis Soryu Class dan *hunter-killer submarine*.⁸ Selain itu, Jepang juga mendapatkan proteksi keamanan dari Amerika Serikat.⁹ Kelemahan dalam aspek militer yang dimiliki Jepang adalah rata-rata persenjataan yang dimiliki Jepang hanya bersifat *defensive* yang bertujuan sebagai tameng untuk melindungi diri dari serangan dan ancaman negara lain.¹⁰

Selain itu, Korea Utara juga dikenal memiliki kekuatan dalam kepemilikan kapabilitas nuklir yang digunakan Korea Utara untuk mengembangkan senjata. Korea Utara juga dipimpin oleh pemimpin yang agresif dan selalu berusaha untuk mengembangkan dan melakukan uji coba nuklir. Kelemahan yang dimiliki oleh

⁶ Brad Lendon, "North Asia on A Knife's Edge: Whose Position is the Strongest?", CNN, 04 April 2017, diakses dari <http://edition.cnn.com/2017/03/16/china/asia-military-balance-china-koreas-japan-us/index.html> pada 26 Desember 2017 pukul 23.00 WIB

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Korea Utara adalah Korea Utara juga tidak memiliki aliansi dalam bidang militer serta Korea Utara tidak memiliki cukup sumber daya untuk terus melakukan pengembangan nuklir.¹¹ Sementara itu, Korea Selatan juga memiliki kapabilitas militer yang kuat yang juga didukung oleh campur tangan Amerika Serikat. Korea Selatan diketahui juga memiliki fokus militer untuk melawan ancaman Korea Utara sehingga pengembangan kapabilitas militer Korea Selatan lebih banyak berfokus untuk menghalau Korea Utara.¹²

Dilihat dari sisi kelemahan, Korea Selatan memiliki kelemahan yaitu hubungan diplomatik tidak berjalan baik dengan Jepang, sehingga, Korea Selatan pernah menarik diri dari perjanjian trilateral keamanan dengan Jepang dan Amerika Serikat hanya karena Korea Selatan merasa sikap Jepang masih sama seperti pada saat masa Perang.¹³ Selain itu, Korea Selatan juga memiliki jarak yang sangat dekat dengan Korea Utara. Sehingga, ancaman nuklir Korea Utara akan lebih dirasakan secara nyata oleh Korea Selatan.¹⁴ Pasca Perang Dingin, dinamika lingkungan keamanan kawasan Asia Timur menjadi semakin konfliktual dan mengalami beberapa perubahan.

Salah satu hal utama yang membuat dinamika keamanan kawasan Asia Timur menjadi semakin tidak stabil dan konfliktual pada era pasca Perang Dingin adalah munculnya China sebagai *global power* dan kebijakan asertifnya dalam bidang militer dan munculnya penetrasi Amerika Serikat yang semakin besar ke Asia Timur

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

untuk merespon kebangkitan kekuatan China yang dikenal dengan dengan kebijakan “*United States of America’s Pivot to Asia*”.¹⁵ Masuknya Amerika Serikat sebagai penetrasi pada kawasan Asia Timur turut menambah dinamika kompleksitas dan kestabilan kawasan. Dapat diketahui, Amerika Serikat telah melakukan penetrasi di Asia Timur sejak lama. Hal tersebut juga dapat terlihat pada masa Perang Dingin, dimana penetrasi Amerika Serikat masuk ke Asia Timur memiliki tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh ideologi komunis Uni Soviet.¹⁶

Selain itu, penetrasi Amerika Serikat di Asia Timur dilakukan dengan melakukan aliansi bersama Jepang dan kerjasama keamanan dengan Korea Selatan. Selama beberapa dekade, Amerika menjadi *partner* yang strategis bagi Jepang dan Korea Selatan. Sama halnya dengan Jepang dan Korea Selatan yang juga memandang Amerika Serikat sebagai *partner* yang potensial. Hal ini dapat terlihat dari hubungan yang bersifat mutualisme dari masing-masing negara. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan dapat memberikan Amerika Serikat keuntungan ekonomi berupa ekspor barang dan jasa, akses terhadap pasar Amerika Serikat dengan lebih mudah, serta kemudahan bagi Amerika Serikat untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan. Sementara itu, Amerika Serikat dapat memberikan keamanan bagi Jepang maupun Korea Selatan.¹⁷

¹⁵ Eyal Ben-Ari, “*Changing Japanese Defense Policies*”, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Mideast Security and Policy Studies No. 112, Februari 2015, hal 11

¹⁶ G. John Ikenberry, “*American Hegemony and East Asia Order*”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 58, No. 3, pp. 353-367, September 2004, hal 355

¹⁷ Ibid

Hal lain yang juga membentuk kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur terjadi adalah adanya *great power rivalry* antara China dan Jepang.¹⁸ Pasca perang dingin, isu keamanan Asia Timur juga tetap berlanjut pada konfrontasi semenanjung Korea, dan isu nuklir Korea Utara.¹⁹ Munculnya Korea Selatan sebagai *middle power* dengan penguatan dan pengembangan angkatan laut Korea Selatan yang disertai dengan peningkatan peran angkatan bersenjata Korea Selatan di semenanjung Korea.²⁰ Sama seperti Jepang, Korea Selatan juga melakukan peningkatan ekonomi dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Aktifnya peran Korea Selatan di dalam maupun luar kawasan membuat Korea Selatan bertransformasi menjadi negara *middle power* yang kehadirannya semakin diperhitungkan.²¹

Korea Utara juga hadir sebagai *middle power* yang memiliki kapabilitas nuklir. Dapat diketahui, isu nuklir Korea Utara sampai saat ini memang menjadi salah satu ancaman terbesar bagi dunia internasional terutama bagi negara-negara tetangga Korea Utara di Asia Timur. Dapat diketahui bahwa Korea Utara tercatat telah beberapa kali melakukan uji coba nuklir.²² Beberapa negosiasi denuklirisasi juga telah coba dilakukan namun upaya untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara gagal dilakukan.

¹⁸Ibid, hal 144

¹⁹Ibid

²⁰Ibid

²¹ Zenel Garcia, "Power Cycle and Security Complexes: Evolution of the East Asian Supercomplex", Wiley Periodical Inc: Policy Studies Organization, Asian Politic & Policy, Vol. 8, No. 4, Issues 4, 2016, hal 540

²² Eyal Ben-Ari, "Changing Japanese Defense Policies", The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Mideast Security and Policy Studies No. 112, Februari 2015, hal 14

Oleh karena itu, kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara Asia Timur dalam mempertahankan eksistensinya di kawasan, tak terkecuali Jepang. Melihat dari perbandingan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara Asia Timur yang telah disebutkan diatas, dapat terlihat bahwa, meskipun Jepang memiliki kapabilitas militer yang canggih dan mendapatkan proteksi keamanan dari Amerika Serikat, namun, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, kepemilikan senjata maupun pasukan Jepang dapat dikatakan lebih sedikit daripada negara-negara yang mengancam Jepang tersebut.²³

Jepang juga merupakan satu-satunya negara di Asia Timur yang menerapkan konstitusi pasifisme (negara yang anti perang). Konstitusi pasifis diterapkan oleh Jepang akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Penerapan konstitusi pasifis menahan Jepang untuk memiliki kapabilitas militer dan meminimalisir penggunaan kekuatan Jepang akibat trauma perang. Konstitusi pasifis juga tidak memperbolehkan Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata, sehingga, Jepang hanya diperbolehkan untuk memiliki pasukan bela diri yang dikenal dengan *Japan Self-Defense Forces* (JSDF). Sehingga, Jepang kemudian tidak lagi menjadi negara yang ekspansionis dan agresif tetapi berusaha menjadi negara yang “*Heiwakokka*” atau negara yang cinta damai.²⁴ Untuk mempertahankan keamanan Jepang, Jepang lebih banyak melakukan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.²⁵

²³ Ibid

²⁴ BBC News, “*Toothless Tiger: Japan Self-Defense Forces*”, BBC News, 15 Oktober 2015 diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-34485966> diakses pada 29 April 2018

²⁵ Francis Fukuyama, “*The U.S.-Japan Security Relation After the Cold War*”, Research and Development (RAND Corporation), 1993, hal 16

Disatu sisi, Jepang juga menyadari bahwa pasca Perang Dingin, ancaman keamanan kawasan Asia Timur semakin masif, sehingga, Jepang kemudian mengembangkan dan meningkatkan kekuatan militer untuk melindungi keamanan dan kedaulatan Jepang dari negara lain.²⁶ Pengembangan dan peningkatan kekuatan militer dilakukan oleh Jepang seiring dengan upaya normalisasi Jepang untuk menjadi “*normal state*”. Selama ini Jepang dikenal sebagai negara yang tidak normal karena tidak dapat menggunakan kekuatan (*the use of force*) akibat dibatasi oleh konstitusi pasifis.²⁷

Upaya Jepang untuk menjadi *normal state* tidak disambut baik dan memperoleh kecaman dari negara-negara tetangganya yaitu China, Korea Selatan, dan Korea Utara. China dan Korea Selatan melihat bahwa normalisasi yang dilakukan Jepang akan membangkitkan kembali jiwa ekspansionisme Jepang pada saat perang. Selain itu, normalisasi Jepang menurut China juga akan berdampak pada instabilitas kawasan Asia Timur.²⁸ Tahun 2013 China mendeklarasikan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) secara sepihak dengan mengikutsertakan sengketa wilayah Senkaku/Diaoyu. Deklarasi ADIZ China tersebut mendapat kecaman keras dari Jepang karena Jepang dengan dideklarasikannya ADIZ China, banyak kapal dan

²⁶Barry Cooper, “*The Evolution of Japanese Security Policy*”, Canadian Global Affair Institute, Desember 2016, hal 3

²⁷Zenel Garcia, “*Power Cycle and Security Complexes: Evolution of the East Asian Supercomplex*”, Wiley Periodical Inc: Policy Studies Organization, Asian Politic & Policy, Vol. 8, No. 4, Issues 4, 2016, hal 540

²⁸ Ibid, hal 550

pesawat China yang memasuki area perairan Jepang dekat wilayah Senkaku/Diaoyu.²⁹

Deklarasi ADIZ China juga dinilai diputuskan sepihak oleh Jepang karena China mengikutsertakan sebagian wilayah Jepang kedalam ADIZnya. Tahun 2013 ancaman juga datang dari Korea Utara yang semakin mengembangkan kapabilitas *Ballistic Missile Defense* (BMD)³⁰ disusul dengan uji coba nuklir Korea Utara yang mencapai laut Jepang. Selain itu, Jepang juga memiliki hubungan diplomatik yang buruk dengan Korea Selatan sejak Perang Dunia II. Hal tersebut kemudian berlanjut sampai saat ini yaitu dalam konflik sengketa wilayah Takeshima/Dokdo dan isu *Comfort Women* yang masih dianggap sebagai isu sensitive oleh Korea Selatan.³¹

Dalam Buku Putih Pertahanan Jepang yang berjudul "*Defense of Japan*", Jepang menyebutkan bahwa Jepang berada dalam kawasan yang konfliktual dimana China, Korea Utara, dan Korea Selatan merupakan ancaman bagi Jepang. Jepang juga secara jelas menyatakan bahwa ancaman tersebut ditimbulkan akibat konflik sengketa wilayah dengan China dan Korea Selatan, deklarasi ADIZ China, dan ancaman nuklir Korea Utara.³²

1.2 Rumusan Masalah

²⁹Bhubhinder Singh, "*The Development of Japanese Security Policy: A Long-Term Defensive Strategy*", The National Bureau of Asian Research: Asia Policy, Number 19, Januari, 2015, hal 58

³⁰Ibid

³¹Zenel Garcia, "*Power Cycle and Security Complexes: Evolution of the East Asian Supercomplex*", Wiley Periodical Inc: Policy Studies Organization, Asian Politic & Policy, Vol. 8, No. 4, Issues 4, 2016, hal 551

³²Official Website of Japan Ministry of Defense, "*Defense of Japan (White Paper)*", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/ pada 05 Desember 2017, pukul 20.15 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang muncul adalah, “Bagaimana Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur tahun 2013-2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur tahun 2013-2017
- 1.3.2 Untuk mengetahui respon Jepang akibat kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur
- 1.3.3 Untuk mengetahui adanya pengaruh kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dalam mempengaruhi sikap dan respon Jepang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai sumber informasi mengenai kasus kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur yang mampu mempengaruhi sikap Jepang dalam merespon kompleksitas keamanan kawasan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam membagi memberikan ilmu pengetahuan yang bisa digunakan oleh mahasiswa HI untuk lebih memahami mengenai isu keamanan yang terjadi di Asia Timur

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi para peneliti, pengamat, dan refrensi bagi mahasiswa HI yang akan menganalisa isu keamanan yang terjadi di Asia Timur khususnya mengenai respon Jepang terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur tahun 2013-2017



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang digunakan penulis untuk menganalisa penelitian ini adalah tulisan dalam jurnal Transformasi Global yang ditulis oleh Mely Noviryani dengan judul “Natuna dan Transformasi Eksternal *Regional Security Supercomplexes* Laut China Selatan”. Dalam tulisannya, dijelaskan bahwa kompleksitas keamanan kawasan Asia Tenggara memberikan dampak berupa perubahan eksternal yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena pengaruh dan penetrasi dari aktor luar kawasan yaitu China khususnya dalam kasus Laut China Selatan. Pada Maret 2014, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menyebutkan bahwa Indonesia merasa keberatan atas keputusan China yang mengikutsertakan pulau milik Indonesia, kepulauan Natuna di Sembilan titik atau *nine dash line* China.³³

Selain klaim kepulauan Natuna, China juga diketahui melakukan klaim kepulauan Sparty dan Paracel dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Klaim atas kepulauan-kepulauan tersebut dilakukan China dengan mengeluarkan paspor baru bagi warga negara China dengan menyatakan dan meletakkan kepulauan-kepulauan tersebut sebagai wilayah China. Klaim China atas kepulauan-kepulauan yang masih menjadi sengketa antar negara-negara di Asia Tenggara tersebut

³³ Mely Noviryani (dalam San: 1993), “Natuna dan Transformasi Eksternal *Regional Security Super Complexes Laut China Selatan*”, Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 1, hal 41 2014 diakses dari <http://transformasi-global.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/9> pada 05 Desember 2017 pukul 21.45 WIB

kemudian dilihat sebagai perubahan baru dalam konflik Laut China Selatan.³⁴ Laut China Selatan itu sendiri dijelaskan sebagai wilayah perairan yang menjadi fasilitator aktivitas ekonomi dan perdagangan di Asia yang dikelilingi oleh Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Taiwan, dan China.³⁵

Sumber daya alam dan energi serta hasil perikanan yang melimpah membuat Laut China Selatan menjadi salah satu wilayah penting yang sering diperebutkan oleh banyak negara.³⁶ Menurut Indonesia, konflik Laut China Selatan memang rawan untuk menjadi konflik yang semakin tereskalasi mengingat belum ada kesepakatan antar negara-negara mengenai batas laut Indonesia dengan batas laut negara-negara lain. Diketahui terdapat 9 batas laut wilayah Indonesia yang belum disepakati dengan baik oleh negara lain adalah batas-batas laut yang bersinggungan dengan batas laut Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Republik Palau, dan Timor Leste.³⁷

Sikap asertif dan agresif China dalam mengklaim wilayah di Laut China Selatan membuat konflik antar negara di wilayah tersebut menjadi semakin tereskalasi. Hal tersebut dapat terlihat dari terlibatnya ASEAN sebagai *claimant states*, pengaruh Amerika Serikat sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan konflik sengketa wilayah yang menyebabkan dinamika kompleksitas keamanan

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid, hal 40

kawasan Asia Tenggara dikategorikan sebagai superkompleks keamanan kawasan.³⁸ Dalam penelitian Mely Noviryani, Mely Noviryani menggunakan teori *Regional Security Complex Theory* (RSCT) oleh Barry Buzan dan Ole Waever dengan menggunakan 4 variabel utama dalam melihat RSCT yaitu *boundary*, *anarchic structure*, *social construction*, dan *polarity*. Mely Noviryani kemudian juga menggunakan variabel turunan RSCT yaitu *external transformation* untuk melihat respon negara yaitu Indonesia dalam merespon adanya *regional security supercomplexes* di Asia Tenggara.

Menurut penjabaran Buzan dan Waever mengenai RSCT, Asia Tenggara termasuk dalam kawasan dengan dinamika *regional security supercomplexes*.³⁹ Dalam variabel *boundary*, dijelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara sebagai pembentuk RSCT yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Singapura. Pada variabel *anarchic structure*, dapat dilihat bahwa terdapat penetrasi China yang terus-menerus melakukan klaim atas Laut China Selatan yang sebenarnya telah berlangsung sejak masa Perang Dingin. Dalam variabel *social construction* yang berhubungan dengan pola *amity-enmity*, dijelaskan bahwa pola *amity-enmity* di kawasan Asia Tenggara berbentuk *chaos* atau hampir semua hubungan berjenis *enmity*.⁴⁰

Agresivitas China terus terjadi di kawasan Asia Tenggara dan membentuk pola hubungan *enmity* yang *chaos* dengan Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Pada

³⁸ Ibid, hal 41

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid, hal 46

variabel *polarity* menekankan pada adanya *power distribution* yang berfokus pada *logic of anarchy* yang mengharuskan negara berhadapan dengan *security competition* di Asia Tenggara. Agresivitas China di Laut China Selatan mendorong masuknya aktor luar kawasan. Seperti contoh, Vietnam, Filipina, dan Malaysia berusaha memperkuat diri dengan mencari bantuan kekuatan dari aktor eksternal kawasan yaitu Amerika Serikat dan India.⁴¹

Untuk menjawab tantangan RSCT Asia Tenggara, terdapat *external transformation* yang terjadi. *External transformation* itu sendiri ditandai dengan adanya perubahan keanggotaan dalam RSC. *External transformation* yang terjadi akibat kompleksitas keamanan kawasan Asia Tenggara membuat Indonesia masuk dalam keanggotaan RSC Laut China Selatan dimana sebelumnya Indonesia menjadi mediator dalam konflik Laut China Selatan kemudian berubah menjadi *claimant state* atau negara yang juga melakukan klaim atas kepulauan Natuna di Laut China Selatan. Berubahnya keanggotaan RSC Laut China Selatan yang ditandai dengan masuknya Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk *external transformation* karena terdapat negara anggota baru sebagai *claimant state*.⁴²

Persamaan penelitian Mely Noviryani dengan penulis adalah teori yang dipakai untuk menganalisa kasus adalah *Regional Security Complex Theory* yang ditulis oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Sementara itu, perbedaan penelitian terletak pada unit analisa yang dilihat. Jika pada penelitian Mely Noviryani menggunakan kawasan

⁴¹ Ibid, hal 47

⁴² Ibid, hal 51-53

Asia Tenggara sebagai unit analisa, penelitian penulis menggunakan Asia Timur sebagai unit analisa. Selain itu, Mely Noviryani menggunakan variabel turunan *external transformation*, sementara penulis menggunakan variabel *internal transformation* dalam melakukan penelitian. *Research position* penulis dalam penelitian ini adalah penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai respon Jepang sebagai satu-satunya negara pasifis di Asia Timur dalam menghadapi kompleksitas keamanan kawasan yang membahayakan posisi Jepang.

Studi terdahulu selanjutnya yang penulis gunakan untuk meneliti penelitian ini adalah tulisan dalam jurnal *The Korean Journal of International Studies* Vol. 14, No. 1, tahun 2016 yang ditulis oleh Andrew R. Capistrano dan Shuhei Kurizaki dengan berjudul "*Japan's Changing Defense Posture and Security Relations in East Asia*". Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai terjadinya konflik antar negara-negara di Asia Timur yang mempengaruhi dinamika kawasan menjadi tidak stabil dan konfliktual. Dinamika kawasan tersebut mampu mempengaruhi Jepang untuk merubah kebijakan pertahanannya. Perubahan kebijakan Jepang tersebut ditandai dengan adanya persetujuan parlemen Jepang untuk melakukan reinterpretasi artikel 9 tahun 1947.⁴³

Reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 tersebut meliputi diperbolehkannya Jepang untuk menggunakan militer pada saat Jepang sedang diserang, aliansi Jepang diserang, ataupun jika Jepang merasa kedaulatan Jepang terancam oleh aksi agresif

⁴³Andrew R. Capistrano, dkk., "*Japan's Changing Defense Posture and Security Relation in East Asia*", *The Korean Journal of International Studies*, Vol. 14, No. 1, April 2016

negara lain. Reinterpretasi artikel 9 tersebut juga mengizinkan JSDF untuk bergabung dalam *collective self-defense* yang sebelumnya tidak diperbolehkan.⁴⁴ Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan bahwa reinterpretasi tersebut dilakukan karena lingkungan keamanan kawasan sudah bertransformasi dan mengancam kedaulatan Jepang.⁴⁵

Kebijakan pertahanan Jepang dibawah pemerintahan Shinzo Abe sangat berbeda dengan kebijakan Perdana Menteri pertama Jepang pasca PD II yaitu Shigeru Yoshida yang lebih menekankan kepada 3 pilar strategi. Tiga pilar strategi tersebut adalah Jepang akan lebih berkonsentrasi dengan membangun kembali ekonomi domestik dan infrastruktur, dalam hubungan internasional, Jepang akan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat, serta meningkatkan ekspor ekonomi dengan Amerika Serikat.⁴⁶

Berbeda dengan Shigeru Yoshida, kebijakan Abe lebih berfokus dalam bidang militer untuk mengembalikan kekuatan Jepang sehingga Jepang dapat melindungi kedaulatan negaranya. Menurut Shinzo Abe, perubahan kebijakan pertahanan tersebut memang harus dilakukan mengingat China merupakan musuh Jepang yang semakin agresif. Hal tersebut terlihat semakin agresif ketika China mendeklarasikan ADIZ di wilayah sengketa Senkaku/Diaoyu yang masih terdapat anggapan dari

⁴⁴Ibid, hal 81

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid, hal 82

Jepang bahwa terdapat teritori Jepang didalam wilayah sengketa yang diklaim merupakan wilayah China.⁴⁷

Dalam penelitian Capistrano dan Kurizaki, kedua penudlis tersebut lebih banyak berfokus kepada *rivalry* dan *security dilemma* yang terjadi antara Jepang dan China dalam konflik sengketa wilayah Senkaku/Diaoyu dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lain yang juga menjadi *concern* Jepang mengenai situasi dan kondisi keamanan kawasan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian Capistrano dan Kurizaki dan penelitian penulis adalah penelitian ini melihat bagaimana reaksi dan respon Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan yang disebabkan oleh situasi yang terjadi di kawasan.

Perbedaan penelitian Capistrano dan Kurizaki dengan penelitian penulis adalah meskipun penulis dan Capistrano dan Kurizaki sama-sama melihat respon Jepang yang berupa perubahan kebijakan postur pertahanan, namun, dalam tulisan Capistrano dan Kurizaki, kedua penulis tersebut hanya menyebutkan perubahan postur pertahanan yang terjadi akibat dilakukannya reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 oleh PM Shinzo Abe pada tahun 2015.

Sementara itu, penulis melihat respon Jepang yang berupa perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan khususnya dalam kebijakan *proactive pacifism* mulai periode tahun 2013-2017 yang tidak hanya melihat reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 sebagai salah satu bentuk perubahan, namun, penulis juga melihat adanya pembentukan kebijakan-kebijakan baru yang mendukung perubahan

⁴⁷Ibid, hal 94

kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Perbedaan lainnya antara penelitian Capistrano dan Kurizaki dengan penulis adalah Capistrano dan Kurizaki lebih berfokus kepada *great power rivalry* di kawasan Asia Timur yang terjadi antara Jepang dan China sebagai faktor pendorong utama Jepang merespon dengan melakukan perubahan dalam postur pertahanannya. Namun, penulis lebih melihat kepada adanya kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur yang mendorong Jepang untuk merespon dengan melakukan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Sehingga, penulis tidak hanya berfokus kepada *great power rivalry* antara Jepang dan China, penulis juga berfokus kepada ancaman negara-negara lain di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Korea Utara khususnya dalam isu nuklir yang mengakibatkan Jepang merespon dengan melakukan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan. Selain itu, penelitian Capistrano dan Kurizaki juga tidak menggunakan teori atau alat analisa untuk meneliti kasus. Sementara penulis menggunakan teori RSCT dari Barry Buzan dan Ole Waever untuk melakukan penelitian ini. *Research position* penulis dalam penelitian ini adalah penulis ingin melihat lebih lanjut menggunakan perspektif, alat analisa, dan unit analisa kawasan dan negara yang mampu mempengaruhi Jepang untuk merespon dengan melakukan perubahan kebijakan pertahanan dan keamannya.

2.2 Kajian Konseptual

2.2.1 *Regional Security Complex Theory*

Dalam melakukan analisa penelitian, penulis menggunakan RSCT yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam bukunya yang berjudul “*Region and Powers*” tahun 2003. RSCT merupakan teori ideal yang mampu menjelaskan mengenai kompleksitas kewanaman kawasan yang dipengaruhi oleh negara-negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan.⁴⁸ Oleh karena itu, RSCT adalah teori yang tepat dan sesuai dengan fenomena yang ingin diteliti.

Pada kasus yang ingin penulis teliti yaitu “Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur tahun 2013-2017”, dapat terlihat bahwa RSCT mampu menjelaskan mengenai kompleksitas keamanan yang terjadi di Asia Timur membuat Jepang pada akhirnya melakukan transformasi kebijakan pertahanan dan keamanan negaranya. Hal ini dikarenakan, Jepang merasa bahwa kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur tersebut dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan Jepang.

RSCT itu sendiri berusaha menjelaskan bahwa keamanan internasional dalam level regional memainkan peranan penting bagi negara-negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan antar kawasan, sehingga, terdapat

⁴⁸ Barry Buzan dan Ole Waever, “*Region and Powers: The Structure of International Security*”, Cambridge University Press, 2003

hubungan yang saling mempengaruhi antar negara-negara yang berada dalam satu kawasan.

Hal ini kemudian mengacu pada level analisa yang dilihat oleh RSCT adalah level analisa regional atau kawasan. Pada level regional tersebut, negara-negara saling terkait satu sama lain sehingga keamanan negara-negara tersebut tergantung pada keamanan regional, dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan, kondisi domestik yang ada dalam suatu negara mampu mempengaruhi keamanan negara-negara tetangga yang berada disekitar kawasan. Pengaruh tersebut dapat berupa gangguan keamanan, politik, ekonomi, dan sosial.⁴⁹

RSCT juga melihat kepada adanya rasa terancam yang dirasakan oleh negara lain akibat adanya instabilitas politik dan keamanan yang terjadi pada negara tetangga di kawasan dimana instabilitas politik tersebut dapat berpotensi mengganggu keamanan negara sekitar. Terdapat dua level yang menjelaskan mengenai kompleksitas keamanan kawasan. Level pertama menjelaskan mengenai adanya hubungan yang saling mempengaruhi antar negara-negara dalam suatu kawasan. Sementara itu, level kedua lebih menjelaskan mengenai adanya sikap ketergantungan keamanan negara dalam level regional (*close security interdependence*).⁵⁰

⁴⁹Ibid, hal 42

⁵⁰ Ibid

Level tersebut berusaha menjelaskan keterkaitan antara kondisi negara-negara dalam kawasan dengan kompleksitas keamanan kawasan. Keamanan kawasan dalam hal ini menitikberatkan kepada adanya kondisi suatu negara atau lebih beserta unit-unit lainnya yang akan saling berpengaruh dan terhubung satu sama lain.⁵¹ Menurut Buzan dan Waever, kompleksitas keamanan kawasan adalah sekelompok negara yang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain atas persoalan stabilitas keamanan nasional negara. Stabilitas keamanan nasional negara dalam kawasan tersebut erat kaitannya sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵²

Definisi lain mengenai kompleksitas keamanan adalah kompleksitas keamanan merupakan sekumpulan unit-unit negara yang memiliki fokus dalam menangani isu sekuritisasi, desekuritisasi, maupun keduanya yang saling terhubung dan terkait dengan masalah keamanan negara dalam suatu kawasan yang tidak dapat dianalisa atau diselesaikan secara terpisah dengan lainnya.⁵³ Dari definisi-definisi tersebut, dapat terlihat bahwa, kompleksitas keamanan menekankan kepada keamanan regional ditentukan oleh kondisi keamanan nasional negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama dimana kondisi keamanan nasional negara-negara tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain sehingga hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap keamanan kawasan.

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid, hal 44

⁵³ Ibid

Perlu juga diketahui bahwa RSCT yang melihat pada keamanan kawasan tersebut juga dapat diinterpretasikan oleh aktor regional. Hal ini dikarekan, aktor regional tersebut dapat menilai apakah isu-isu yang terjadi pada kawasan akan memberikan pengaruh besar terhadap negara-negara dalam kawasan tersebut.⁵⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa RSCT didefinisikan sebagai interaksi antar unit-unit negara dalam kawasan yang saling berpengaruh satu sama lain. Hal tersebut juga dapat terlihat dari respon yang berupa *bottom-up* (internal terhadap kawasan) ataupun *top-down* (eksternal terhadap global).⁵⁵

Respon yang berupa *bottom-up* melihat adanya perubahan internal suatu negara yang diakibatkan oleh adanya kompleksitas keamanan kawasan, ataupun juga dapat dilihat dari adanya kebijakan suatu negara yang agresif dapat mempengaruhi dinamika kompleksitas kawasan. Sementara itu, respon yang berupa *top-down* melihat kepada adanya kompleksitas kawasan yang terjadi akan memberikan pengaruh terhadap hubungan eksternal negara dengan negara lain di kawasan maupun negara lain secara global.⁵⁶

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam RSCT adalah, adanya perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan kedekatan letak geografis suatu negara (*local geographical proximity*) yang dapat mempengaruhi keamanan

⁵⁴Ibid, hal 72

⁵⁵Ibid

⁵⁶Ibid

kawasan.⁵⁷ Kedekatan letak geografis negara dalam suatu kawasan dinilai sebagai faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kompleksitas keamanan kawasan. Hal ini dikarenakan, kedekatan letak geografis membuat kondisi keamanan internal suatu negara juga akan memberikan pengaruh terhadap keamanan negara-negara lain di kawasan secara signifikan karena negara-negara tersebut berada dalam jarak yang berdekatan.⁵⁸

Jarak yang berdekatan tersebut tentu menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat RSCT. Kondisi keamanan suatu negara yang tidak stabil akan lebih berpotensi memberikan ancaman keamanan bagi negara-negara disekitarnya dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki letak geografis yang berjauhan. RSCT berfokus kepada empat level analisis yang menjelaskan dan menggambarkan lebih jelas mengenai keamanan regional. Keempat level tersebut adalah:⁵⁹

1. Keamanan domestik negara dalam kawasan (*domestically in the states of the region*) Hal ini dapat berupa kondisi negara, apakah kondisi negara dapat dikategorikan berada dalam kondisi kuat atau lemah serta perlu pula dilihat mengenai stabilitas politik negara yang mempengaruhi kawasan.
2. Pola interaksi dan hubungan negara-negara dalam kawasan (*state-to-state relation*)

⁵⁷ Ibid, hal 45

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid, hal 51

3. Pola interaksi kawasan dengan kawasan tetangga (*the region's interaction with neighbouring regions*)
4. Peran *global powers* dalam kawasan yang menekankan kepada hubungan yang saling mempengaruhi antara struktur keamanan global dan kawasan)

RSCT memiliki empat variabel penting yang dapat menjadi *essential structure* dalam menganalisa kasus kompleksitas keamanan kawasan. Keempat variabel tersebut adalah:⁶⁰

1. *Boundary*

Boundary merupakan variabel pertama dari RSCT yang berusaha menjelaskan mengenai adanya hal yang membedakan kompleksitas keamanan kawasan yang ada di setiap negara. Kompleksitas keamanan kawasan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga disekitar kawasan memiliki perbedaan satu sama lain.⁶¹ Terdapat indikator yang dapat lebih menjelaskan *boundary*. Indikator tersebut adalah *geographical boundary*. Negara memiliki sistem dan strukturnya tersendiri dalam menangani isu domestik yang kemudian menjadi pembeda dengan negara yang satu dengan negara lainnya.⁶²

Selain menjadi faktor pembeda negara dengan negara tetangga lainnya di kawasan, *geographical boundary* dalam hal ini menjelaskan tentang pemisahan teritori negara-negara di kawasan.⁶³ Dengan kata lain, *boundary* membatasi

⁶⁰Ibid

⁶¹Ibid

⁶²Ibid

⁶³ Ibid

letak geografis negara-negara dalam kawasan. Dalam variabel *boundary*, RSCT tidak hanya merupakan sebuah perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisa mengenai kompleksitas keamanan kawasan.

Hal ini dikarenakan, *boundary* dalam RSCT juga dibentuk berdasarkan adanya ketergantungan keamanan negara-negara dalam kawasan (*security interdependence*). Ketergantungan keamanan tersebut terjadi karena, negara-negara dalam kawasan memiliki *boundary* atau batas dan jarak yang berdekatan, sehingga, hal yang terjadi dalam suatu negara akan memberikan memberikan pengaruh bagi negara tetangga dalam kawasan.⁶⁴

Variabel *boundary* tidak hanya memiliki pengertian sebagai faktor pembeda kompleksitas keamanan kawasan negara dengan negara-negara tetangga, tetapi, *boundary* juga dapat dilihat sebagai suatu pembatas yang berkaitan dengan batas dan jarak kedekatan geografis yang akan menimbulkan ketergantungan keamanan negara-negara dalam kawasan.

2. *Anarchic Structure*

Anarchic structure merupakan variabel yang menjelaskan mengenai kompleksitas keamanan kawasan dibentuk oleh dua atau lebih unit dimana unit-unit tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kompleksitas keamanan kawasan.⁶⁵ *Anarchic structure* dapat pula ditandai dengan adanya aktor eksternal negara yang berupa negara *superpower* atau negara yang lebih

⁶⁴ Ibid, hal 47-48

⁶⁵ Ibid, hal 53

powerful daripada negara lain. Aktor eksternal tersebut ikut terlibat dalam permasalahan yang ada di dalam kawasan yang berperan dalam dinamika kompleksitas keamanan kawasan.⁶⁶

Negara yang *powerful* dalam hal ini memiliki pengaruh karena mereka dapat melakukan penetrasi kekuatan dalam suatu kawasan dengan tidak mementingkan logika batas geografis yang ada.⁶⁷ Negara-negara *superpower* memiliki kemampuan yang besar untuk meningkatkan dan memperluas serta menyebarkan kepentingan dan pengaruhnya kepada negara-negara di kawasan lain. Hal ini diimbangi dengan peningkatan kapabilitas yang dilakukan oleh negara-negara tersebut sehingga mereka akan dengan mudah menyebarkan pengaruhnya dan mencapai kepentingan yang dituju.⁶⁸

Dalam kompleksitas keamanan kawasan, negara-negara yang *powerful* akan lebih mudah dalam melakukan penetrasi dan menyebarkan pengaruhnya ke kawasan lain. Lain halnya dengan negara yang memiliki *power* lebih lemah (*powerless*), negara-negara *powerless* tersebut cenderung terjebak dalam kondisi kompleksitas keamanan kawasan dengan negara-negara tetangga.⁶⁹ Negara-negara *powerless* cenderung untuk melakukan penjagaan terhadap keamanan negara dengan melakukan aliansi dengan negara-negara tetangga.⁷⁰

Anarchic structure pada dasarnya merupakan suatu keadaan dari kompleksitas

⁶⁶ Ibid, hal 45

⁶⁷ Ibid, hal 46

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid, hal 46

⁷⁰ Ibid

politik kawasan yang dapat menimbulkan tendensi untuk negara yang memiliki kekuatan besar untuk melakukan intimidasi dan penetrasi terhadap negara yang lebih lemah.

Terdapat dua indikator yang terdapat dalam *anarchic structure*. Kedua variabel tersebut adalah *autonomous unit* yang melihat kepada adanya dua atau lebih unit negara dalam kawasan yang mampu membentuk kompleksitas keamanan kawasan. Terdapat pula indikator *intrusive system* dimana *intrusive system* menekankan kepada ada atau tidaknya aktor diluar kawasan yang turut menambah kompleksitas keamanan kawasan.⁷¹

3. *Polarity*

Polarity atau polaritas melihat kepada adanya distribusi kekuasaan diantara unit-unit aktor. Dalam RSCT, polaritas dilihat sebagai adanya banyak kekuatan dari negara-negara yang memiliki *great power* dimana negara dengan *great power* tersebut mampu mempengaruhi sistem internasional dan kompleksitas keamanan kawasan.⁷² Dalam melihat kompleksitas keamanan kawasan, polaritas yang terjadi dapat berupa unipolar, bipolar, maupun multipolar. Hal tersebut bergantung dari *power* yang dimiliki negara dalam kawasan.⁷³ Pandangan mengenai polaritas tersebut telah ada sejak terjadinya Perang Dingin⁷⁴ dimana

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid, hal 30

⁷³ Ibid, hal 49

⁷⁴ Ibid

seperti yang diketahui, pada masa Perang Dingin, polaritas yang terbentuk adalah bipolar dimana bipolar tersebut berpusat kepada dua negara *superpower* yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Jika kekuatan terpusat pada satu kekuatan dan kekuatan tersebut mampu menjadi hegemoni dan lebih *powerful* daripada negara-negara lain, maka polaritas yang terbentuk adalah unipolar. Pada masa pasca Perang Dingin, polaritas tidak lagi terpusat pada Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun, polaritas yang terbentuk adalah multipolar. Polaritas dalam RSCT dapat dilihat dari indikator *distribution of power* yang melihat kepada adanya distribusi kekuatan antar unit-unit negara yang membentuk polaritas kawasan.

Polaritas dalam hal ini juga menekankan kepada fakta bahwa negara-negara yang *powerful* dapat membentuk polaritas dalam kawasan. Negara-negara yang *powerful* tersebut mampu menggunakan *powernya* untuk membangun dan meningkatkan kapabilitas militer dalam suatu kawasan. Dengan adanya kemampuan tersebut, negara-negara yang *powerful* seringkali dapat melakukan intervensi dalam permasalahan kawasan untuk mencapai kepentingannya dimana hal tersebut akan menambah dinamika kompleksitas keamanan kawasan.⁷⁵

Polaritas ditentukan oleh kepemilikan *power* negara dalam sistem internasional yang memiliki pengaruh besar dalam kompleksitas keamanan kawasan. *Power* yang dimiliki negara tersebut terbagi dalam tiga macam yaitu, *superpower*, *great power*, dan *regional power*. *Superpower* dapat dikategorikan

⁷⁵ Ibid, hal 33

kepada negara yang memiliki kapabilitas dan kapasitas militer yang besar untuk dapat mendukung negara tersebut dalam memproyeksikan kekuatan dan menyebarkan pengaruhnya. Negara *superpower* diyakini juga memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang kuat untuk mendukung pemenuhan kepentingan serta peningkatan kapabilitas militer yang dimiliki.⁷⁶

Negara *superpower* memiliki peranan penting dalam sistem internasional dan kawasan. Negara *superpower* juga dapat menjadi suatu ancaman, aliansi, dan pihak yang mengintervensi permasalahan dalam kawasan. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua negara *superpower* yang diakui pada masa Perang Dingin. Namun, pasca Perang Dingin, hanya Amerika Serikat yang dinobatkan sebagai negara paling *superpower* di dunia.⁷⁷ Berbeda dengan negara *superpower*, negara *great power* memiliki peringkat dibawah negara *superpower*. Negara *great power* merupakan negara yang memiliki kapabilitas militer serta kekuatan ekonomi dan politik yang kuat. Negara *great power* juga dapat menjadi negara yang menghegemon negara-negara yang lebih lemah.⁷⁸

Dalam polaritas RSCT, *regional power* dijelaskan sebagai kekuatan yang dimiliki negara untuk dapat mendominasi dan menjadi hegemon dalam kawasan. Polaritas tersebut tentunya berbeda-beda dalam setiap kawasan.⁷⁹ Seperti contoh, polaritas di Asia Selatan adalah bipolar dan polaritas

⁷⁶ Ibid, hal 34

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid, hal 35

⁷⁹ Ibid, hal 37

yang terjadi di kawasan Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara adalah multipolar.⁸⁰

4. *Social Construction*

Social construction berkaitan dengan pola *amity* dan *enmity* yang terbentuk dalam kawasan berdasarkan faktor historis. Pola *amity* yang dibangun berdasarkan rasa kepercayaan dan persahabatan akan berpotensi untuk membentuk kerjasama antar negara. Pola *amity* juga dapat mendukung terbentuknya aliansi antar negara yang tercipta akibat adanya musuh dan kepentingan bersama. Pola *enmity* yang dibangun berdasarkan rasa saling curiga dan permusuhan akan dapat memicu terjadinya konflik.⁸¹

Jika telah terlihat pola *amity* dan *enmity* dalam level regional, maka akan pula terlihat aktor eksternal beserta aktor global yang juga memainkan peranan penting dalam kawasan. Pola *amity* dan *enmity* dalam kawasan tersebut tidak hanya terbentuk karena terdapat hubungan persahabatan maupun permusuhan antar negara-negara dalam kawasan, namun, pola *amity* dan *enmity* juga terbentuk akibat adanya faktor historis, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.⁸² Faktor historis tersebut juga dapat berhubungan dengan hubungan persahabatan dan permusuhan yang dialami negara sejak lama.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid, hal, 50

⁸² Ibid, hal 47

Pola *amity-enmity* itu sendiri tidak selalu berbentuk hubungan pertemanan ataupun permusuhan yang bersifat tetap. Terdapat bermacam-macam jenis pola *amity-enmity*. Pola *amity* dan *enmity* dapat berbentuk *chaos* (hal tersebut berupa jenis hubungan antar negara berjenis permusuhan), formasi konflik regional yang didominasi oleh hubungan permusuhan namun hubungan persahabatan masih dapat dilakukan, *security regime* (hubungan didominasi oleh hubungan persahabatan dan kerjasama, namun hubungan permusuhan masih terjadi), dan *security communities* (pola hubungan berbentuk *amity* secara keseluruhan).⁸³

Dalam menjelaskan pola hubungan *amity* dan *enmity* dalam RSCT, Buzan mengelaborasi teori Alexander Wendt mengenai teori sosial dalam politik internasional. Pemikiran Wendt dapat diaplikasikan dan dielaborasi dengan teori konstruktivisme. Hal tersebut dapat membantu untuk memahami lebih jauh mengenai pola *amity-enmity* dalam kawasan. Ide Wendt mengenai struktur sosial yang anarki didasari oleh adanya peran permusuhan dan persahabatan antar negara yang mendominasi sistem, adanya kepentingan negara, dan adanya kepercayaan yang telah terlegitimasi dalam masyarakat mengenai sesuatu yang benar dan salah, baik dan buruk. Ide tersebut terlihat sesuai diaplikasikan pada pola *amity-enmity* dalam RSCT.⁸⁴

⁸³Mely Noviryani (dalam San: 1993), “*Natuna dan Transformasi External Regional Security Super Complexes Laut China Selatan*”, Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 1, 2014, hal 41

⁸⁴Ibid, hal 50

Elaborasi pemikiran Wendt dan pola *amity-enmity* dalam RSCT memperlihatkan bahwa terdapat adanya konstruksi dari faktor historis negara-negara mengenai negara yang menjadi lawan dan negara yang menjadi kawan. Permusuhan maupun persahabatan yang terjadi pada negara-negara tidak terlepas dari adanya faktor historis yang membentuk permusuhan ataupun persahabatan tersebut. Pada dasarnya, hal tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan sosial.⁸⁵ Dari keempat variabel tersebut, dapat dilihat adanya konfigurasi yang dapat dijelaskan melalui RSCT, yaitu:⁸⁶

a. *Maintenance of the status quo*

Maintenance of the status quo berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam sebuah struktur dan sistem dalam kawasan. Dengan kata lain, negara-negara dalam status quo adalah negara-negara yang mampu mempertahankan eksistensi struktur dan sistem yang ada dan hal tersebut tidak mengalami perubahan. Indikator yang dapat dilihat dalam *maintenance the status quo* adalah *no significant change in essential structure* yang menekankan kepada tidak adanya perubahan yang signifikan dalam kawasan. Semua negara mempertahankan status quo yang dimiliki.⁸⁷

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid, hal 53

⁸⁷ Ibid

b. *Internal Transformation*

Internal transformation memiliki arti bahwa terdapat perubahan yang ada pada struktur kawasan dalam konteks *boundary*. Hal tersebut juga berarti bahwa terdapat perubahan terhadap struktur anarki yang terjadi karena adanya integrasi regional, terjadi polaritas (yang disebabkan oleh disintegrasi, penyatuan, penaklukan dan penjajahan, perbedaan angka pertumbuhan penduduk, dan lain-lain, atau hal tersebut terjadi juga karena adanya dominasi *pola amity-enmity* yang disebabkan karena perubahan dan pergeseran ideologi, trauma perang, perubahan pemimpin, dan lain-lain.⁸⁸

Terdapat indikator yang dapat dilihat dalam *internal transformation* yaitu *Essential Structure Change* yang melihat kepada ada atau tidak adanya perubahan yang terjadi seperti perubahan rezim kepemimpinan, kebijakan suatu negara, ideologi, ataupun polaritas dan pengaruh dalam kawasan. *Internal transformation* juga dapat dilihat dari kondisi negara yang berpotensi untuk dapat melakukan perubahan polaritas dalam kawasan. Perubahan tersebut juga terbentuk dari adanya perubahan rezim kepemimpinan, kebijakan, maupun ideologi negara.⁸⁹

Perubahan rezim kepemimpinan termasuk kedalam *internal transformation* karena, perubahan tersebut mampu menimbulkan dinamika kompleksitas keamanan kawasan. Hal ini dikarenakan, akan terdapat perbedaan-perbedaan

⁸⁸Ibid

⁸⁹Ibid, hal 67

pemimpin lama maupun pemimpin baru dalam proses pengambilan kebijakan. Begitu juga dengan perubahan kebijakan dan ideologi. Perubahan kebijakan yang dimaksud adalah ketika kebijakan tersebut berubah menjadi kontroversial dan menjadi ancaman negara-negara disekitar, maka, hal tersebut akan mampu mempengaruhi dinamika kompleksitas keamanan kawasan.⁹⁰

c. *External Transformation*

External transformation merupakan perubahan yang terjadi diluar batas kawasan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam dinamika kompleksitas kawasan yang dapat berupa perubahan yang terjadi dalam kawasan lain yang terjadi akibat adanya kompleksitas keamanan pada suatu kawasan. *External Transformatin* juga dapat terjadi karena adanya penetrasi dan *overlay* dari negara lain diluar kawasan yang kemudian menyebabkan dinamika kompleksitas antar kawasan.⁹¹

Indikator yang dapat dilihat dalam *external transformation* adalah *Outer Structure Change* yang menekankan kepada ada atau tidaknya perubahan struktur terluar dalam kawasan karena keberadaan aktor eksternal yang ikut berperan dalam dinamika kompleksitas keamanan kawasan.⁹² Perubahan struktur terluar kawasan tersebut dapat ditandai dengan perubahan keanggotaan

⁹⁰Ibid, hal 49

⁹¹Ibid

⁹²Ibid

RSC, ataupun meluasnya *boundary* kawasan sehingga membuat suatu kawasan bersatu dengan kawasan lainnya dan membentuk kompleksitas.⁹³

Seperti contoh, pasca Perang Dingin, kompleksitas kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan menyatu menjadi *Asian Supercomplexes* atau superkompleksitas kawasan Asia.⁹⁴ Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisa *external transformation* adalah dengan melihat adanya dinamika keamanan antar kawasan sebagai bentuk pengaruh dari kompleksitas keamanan kawasan.⁹⁵

2.3 Definisi Operasional

Operasionalisasi teori *Regional Security Complex* oleh Barry Buzan dan Ole Waever dalam hal ini berfokus kepada penelitian penulis yaitu Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur Melalui Kebijakan *Proactive Pacifism* tahun 2013-2017. Dalam menganalisa kasus tersebut dengan menggunakan teori RSCT, hal yang perlu dilihat adalah variabel dan indikator yang ada di dalam RSCT adalah *boundary*, *anarchic structure*, *polarity*, dan *social construction*.

Boundary merupakan variabel yang berusaha melihat perbedaan kompleksitas keamanan kawasan yang ada pada setiap negara. Indikator yang terdapat pada *boundary* adalah *geographical boundary* dimana hal tersebut berkaitan dengan batas-

⁹³Ibid, hal 53

⁹⁴Ibid, hal 61

⁹⁵Ibid, hal 64

batas negara dalam kawasan. Dalam variabel *boundary*, penulis akan melihat negara-negara di yang terletak di kawasan Asia Timur yang akan diteliti secara lebih rinci dalam penelitian ini. Variabel kedua adalah *anarchic structure* yang menjelaskan mengenai ada atau tidaknya aktor eksternal diluar kawasan yang ikut mempengaruhi dinamika kompleksitas keamanan kawasan. *Anarchic Structure* terdiri dari dua variabel yaitu *autonomous unit* dan *intrusive system*.

Autonomous unit melihat pada adanya unit dalam kawasan yang membentuk kompleksitas keamanan kawasan serta berperan aktif dalam membentuk dinamika kompleksitas keamanan kawasan. Sedangkan *intrusive system* merupakan indikator yang melihat pada adanya aktor eksternal yang berperan dalam kawasan ataupun melakukan penetrasi dengan melakukan aliansi dan kerjasama keamanan dengan negara-negara dalam kawasan. Variabel ketiga adalah *polarity* atau polaritas yang menjelaskan mengenai *distribution of power* atau distribusi kekuasaan. Pada variabel ini, penulis akan melihat lebih lanjut mengenai polaritas apakah yang terbentuk pada kawasan Asia Timur dengan melihat perbandingan jumlah kekuatan masing-masing negara.

Variabel terakhir adalah *social construction* atau konstruksi sosial yang dibagi menjadi dua indikator yaitu hubungan *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Untuk mengukur pola *enmity* dan *enmity* dalam kawasan, hal yang perlu dilihat adalah adanya faktor historis ataupun faktor-faktor yang membentuk hubungan negara seperti faktor ideologi, agama, maupun adanya persamaan perspektif antar negara-negara Asia Timur. Selanjutnya, variabel yang terdapat dalam

konfigurasi RSCT adalah *maintenance the status quo*, *internal transformation*, dan *external transformation*.

Variabel *maintenance the status quo* tidak digunakan oleh penulis. Hal ini dikarenakan, semua negara dalam kawasan Asia Timur berusaha untuk mempertahankan status quo yang berlaku di kawasan, tidak ada negara yang berusaha untuk melakukan *challenge* pada status quo dalam kawasan. Sehingga, variabel *maintenance the status quo* tersebut akan menjadi tidak relevan jika digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, variabel *external transformation* juga tidak dipakai oleh penulis karena, tidak terlihat adanya perubahan eksternal seperti perubahan keanggotaan RSC ataupun perubahan *boundary* dalam kawasan Asia Timur. Sehingga, variabel turunan yang digunakan oleh penulis adalah *internal transformation*.

Tabel 1. Operasionalisasi *Regional Security Complex Theory*

<i>Regional Security Complex Theory</i>			
No.	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
1.	<i>Boundary</i>	<i>Geographical Boundary</i>	Batas-batas geografis negara-negara dalam kawasan Asia Timur yang membedakannya dari kawasan lain
2.	<i>Anarchic Structure</i>	- <i>Autonomous Unit</i> - <i>Intrusive System</i>	- <i>Autonomous Unit</i> : Melihat negara-negara di Asia Timur yang membentuk dinamika kompleksitas keamanan kawasan - <i>Intrusive System</i> : Melihat adanya penetrasi atau pengaruh dari aktor eksternal kawasan Asia Timur
3.	<i>Polarity</i>	<i>Distribution of Power</i>	Melihat kepada adanya polaritas yang berupa perimbangan kekuatan di Asia Timur yang dapat tergolong ke dalam polaritas unipolar, bipolar, ataupun multipolar
4.	<i>Social Construction</i>	- <i>Amity</i> - <i>Enmity</i>	- <i>Amity</i> : Melihat pada adanya hubungan persahabatan yang terjalin antar negara-negara Asia Timur - <i>Enmity</i> : Melihat pada adanya hubungan permusuhan yang terbentuk antar negara-negara Asia Timur

Diolah penulis melalui sumber: *Region and Powers, The Structure of International Security*

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Turunan *Regional Security Complex Theory*

Konfigurasi yang terjadi:			
No.	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
1.	<i>Maintanance the status quo</i>	<i>No significant change in essential structure</i>	Tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam kawasan Asia Timur
2.	<i>Internal Transformation</i>	<i>Essential structure change</i>	Melihat pada ada atau tidaknya transformasi internal suatu negara yang dilakukan untuk merespon kompleksitas keamanan kawasan seperti adanya perubahan kebijakan, rezim pemerintahan, polaritas, ataupun pola konstruksi sosial yang berkaitan dengan hubungan <i>amity-enmity</i> negara-negara dalam kawasan Asia Timur.
3.	<i>External Trasformation</i>	<i>Outer structure change</i>	Melihat pada ada atau tidaknya perubahan eksternal dalam kawasan yang ditandai dengan adanya perubahan pola keanggotaan RSC ataupun perubahan <i>boundary</i> dalam kawasan

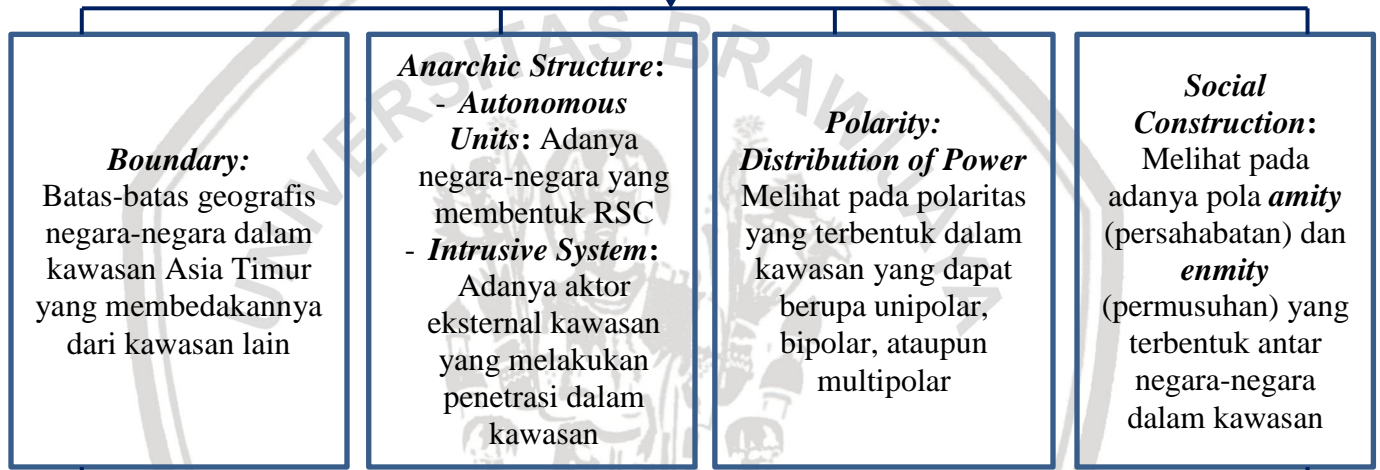
Diolah penulis melalui sumber: *Region and Powers, The Structure of International Security*

2.4 Alur Pemikiran

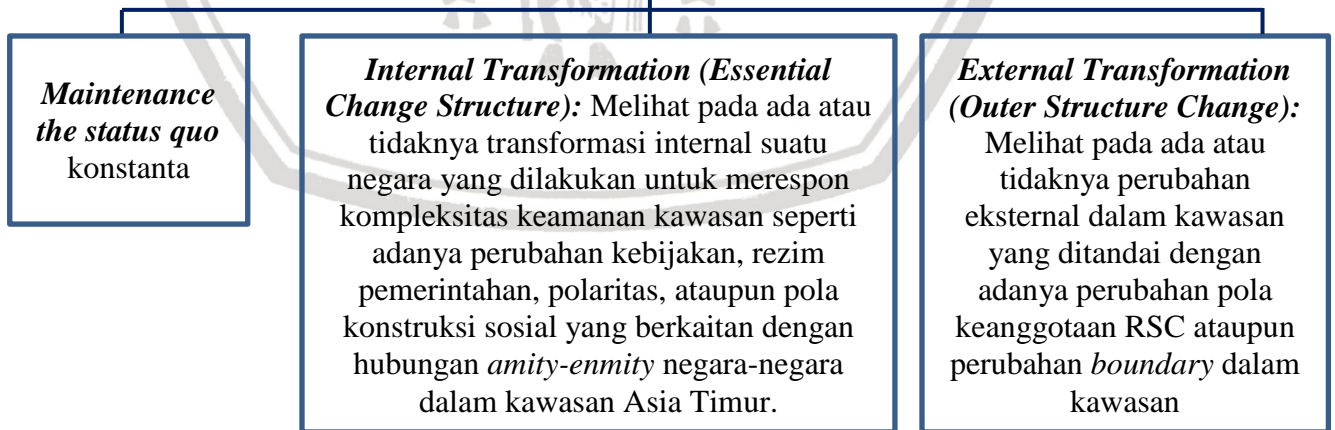
Kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur disebabkan oleh *boundary* Asia Timur yang terdiri dari negara-negara *powerful*, konflik sengketa wilayah antar negara-negara, serta masuknya penetrasi aktor eksternal kawasan membuat dinamika kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur menjadi semakin konflikktual. Sehingga, hal tersebut membuat Jepang sebagai satu-satunya negara pasifis di kawasan untuk merespon kompleksitas keamanan kawasan yang terjadi.

Bagaimana respon Jepang terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur tahun 2013-2017?

Regional Security Complex Theory



Konfigurasi yang terjadi

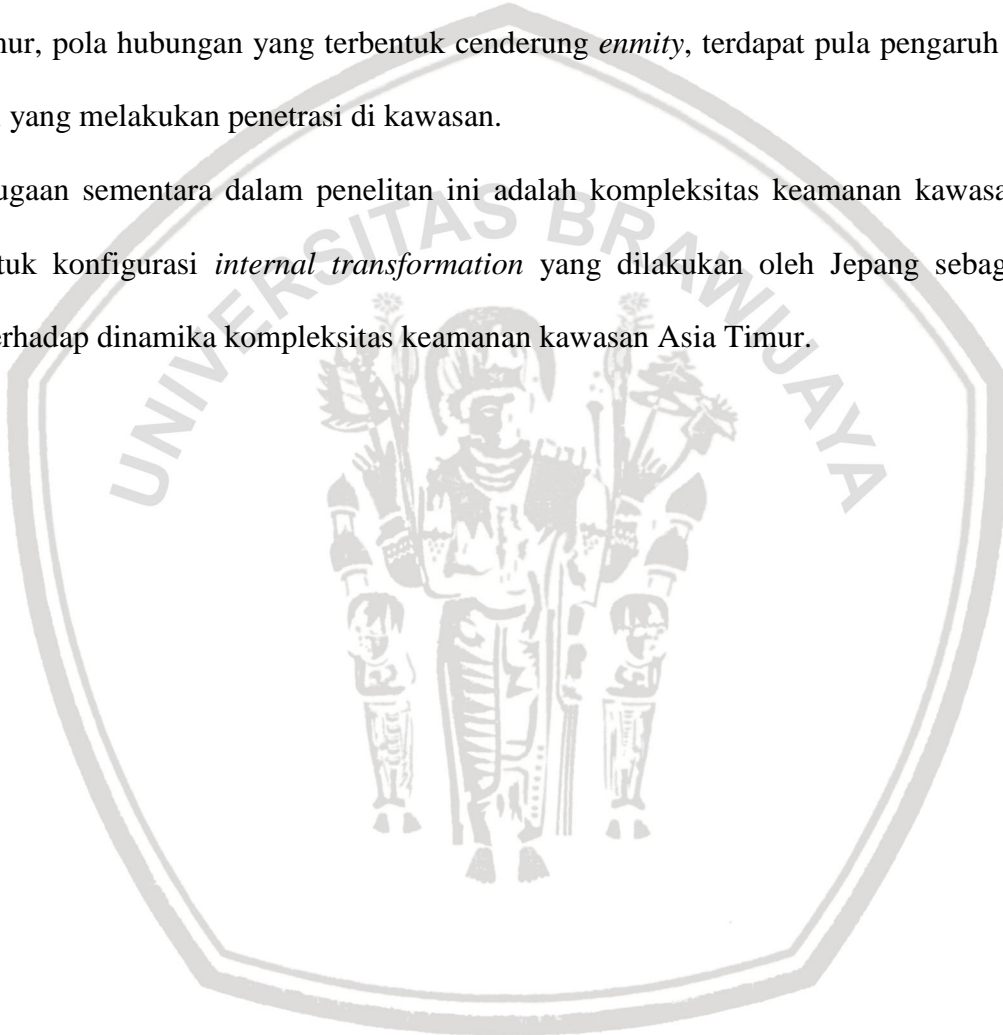


Hipotesis: Kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur yang terbentuk karena *boundary, anarchic structure, polarity, dan social construction* membentuk respon Jepang yang dilakukan dalam variabel *internal transformation*

2.5 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelum, hipotesa yang dapat diambil adalah kondisi keamanan Asia Timur menyebabkan terjadinya kompleksitas keamanan kawasan yang ditandai *boundary* Asia Timur yang terdiri dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara, terdapat pula aspek *social construction* yang berhubungan dengan pola *enmity-amity* dimana di Asia Timur, pola hubungan yang terbentuk cenderung *enmity*, terdapat pula pengaruh dari aktor eksternal yang melakukan penetrasi di kawasan.

Dugaan sementara dalam penelitian ini adalah kompleksitas keamanan kawasan mampu membentuk konfigurasi *internal transformation* yang dilakukan oleh Jepang sebagai bentuk respon terhadap dinamika kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai sebab-akibat suatu fenomena yaitu penyebab terjadinya kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur yang terhadap respon Jepang tahun 2013-2017. Penulis melakukan pencarian data melalui studi kepustakaan melalui data sekunder sehingga penulis dapat memperkuat argumen dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas untuk menjelaskan fenomena sebab-akibat.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi penelitian agar penelitian yang diteliti penulis menjadi lebih sistematis, terarah, dan dapat berfokus pada kejadian sebab-akibat yang sedang penulis teliti dari penelitian ini.

3.2.1 Batasan Materi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis secara spesifik yang berfokus kepada pembahasan mengenai bagaimana respon Jepang terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur melalui tahun 2013-2017

3.2.2 Batasan Waktu Penelitian

Penelitian ini memberikan limitasi waktu penelitian yaitu dalam jangka waktu tahun 2013-2017. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2013, Jepang untuk pertama kalinya membentuk Dewan Pertahanan Nasional (*National Security*

Council) sebagai dewan yang menandai terbentuknya kebijakan *Proactive Pacifism* atau yang juga dikenal sebagai “*Proactive Contribution to Peace*”. Selain itu, tahun 2013 juga menandai dinamika kompleksitas keamanan kawasan yang semakin konfliktual dilihat dari konflik regional antar negara yang semakin tinggi.

Pada tahun 2013, China juga mendeklarasikan ADIZ yang tumpang tindih dengan sengketa wilayah Senkaku/Diaoyu dengan Jepang serta adanya uji coba nuklir Korea Utara yang sampai pada laut Jepang. Penetrasi Amerika Serikat dalam kawasan yang melakukan aliansi keamanan dengan Jepang dan Korea Selatan dalam hal ini turut menambah dinamika kompleksitas keamanan kawasan sehingga menuntut Jepang untuk merespon. Pada tahun 2013-2017, Jepang diketahui menaikkan anggaran militernya untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer.

Sehingga, tahun 2017 dipilih penulis sebagai batas akhir penelitian karena tahun 2017 Jepang juga melakukan peningkatan anggaran belanja militer yang dilakukan untuk peningkatan kapabilitas militer untuk mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan yang dibentuk.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui informasi dari buku, jurnal, *website* resmi pemerintah negara, dan portal berita *online* terpercaya. Data sekunder tersebut nantinya akan memudahkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan dengan teknik analisa data kualitatif yang menggunakan data-data melalui studi kepustakaan dan non-statistik. Hal ini dikarenakan, data yang diperoleh akan dilakukan untuk meneliti hubungan sebab-akibat suatu fenomena itu terjadi.

3.5 Sistematika Penulisan

Dalam meneliti penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dengan menyusun bab-bab yang sistematis guna membantu penulis agar dapat melakukan penelitian yang lebih fokus dan terarah. Penulis membagi bab-bab tersebut menjadi 6 bab, yaitu:

3.5.1 Bab I Pendahuluan

Pada bab I pendahuluan, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya suatu fenomena yang berisi penjelasan mengenai studi kasus yang penulis pilih yaitu tentang bagaimana kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur terjadi serta membahas mengenai aktor-aktor internal maupun eksternal yang terlibat dalam membentuk kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur pada tahun 2013-2017. Pada bab I pendahuluan tersebut, penulis juga akan merumuskan masalah berdasarkan pada latar belakang yang telah dituliskan disertai dengan tujuan dan manfaat yang terdiri dari manfaat akademis maupun praktis yang akan didapatkan melalui penelitian ini.

3.5.2 Bab II Kerangka Pemikiran

Dalam bab II kerangka pemikiran, penulis akan menjelaskan mengenai studi terdahulu yang akan membantu penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teori yang digunakan penulis untuk meneliti penelitian ini yaitu *Regiona Security Complex Theory* yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever dimana penulis mengerucutkan kembali teori tersebut dengan mengkategorikan indikator dan variabel yang cocok untuk diaplikasikan dalam kasus yang ingin diteliti. Selain itu, penulis juga akan mengoperasionalkan konsep yang telah dipilih untuk menganalisa fenomena yang nantinya juga akan disajikan alur pemikiran dan hipotesa berdasarkan operasionalisasi konsep tersebut.

3.5.3 Bab III Metode Penelitian

Pada bab III metode penelitian, penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti fenomena yang meliputi ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknis analisa data, serta sistematika penulisan.

3.5.4 Bab IV Gambaran Umum

Dalam bab IV gambaran umum, penulis akan membuat gambaran dari kasus yang penulis teliti dalam ruang lingkup yang lebih luas dan lebih *detail*. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai RSCT Asia Timur beserta

variabel dan indikator yang terdapat dalam RSCT yaitu *boundary*, *anarchic structure*, *polarity*, dan *social construction* yang dilihat dari pola *amity-enmity*. Selain itu, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan lebih *detail* mengenai kondisi kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur sebelum periode waktu 2013-2017 yaitu pada masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin.

3.5.5 Bab V Pembahasan

Pada bab V Pembahasan, penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah penulis teliti berdasarkan data-data yang telah didapat mengenai konfigurasi teori RSCT dalam variabel *internal trasformation* dilakukan Jepang sebagai bentuk respon terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur. Penulis kemudian akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan *Proactive Pacifism* sebagai kebijakan yang menandai respon Jepang

3.5.6 Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir, yaitu bab VI Kesimpulan dan Saran, penulis akan menyimpulkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan penulis secara singkat dan jelas dimana hasil pembahasan penelitian tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah. Dalam bab ini, terdapat pula rekomendasi dan saran yang penulis butuhkan untuk penelitian yang lebih baik lagi karena penelitian penulis juga masih jauh dari kata sempurna.

BAB IV

REGIONAL SECURITY COMPLEXES DI ASIA TIMUR

Dalam memahami kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur, penulis membagi pembahasan dalam gambaran umum dalam beberapa sub-bab. Pertama, penulis akan membahas mengenai kompleksitas keamanan kawasan yang terjadi di Asia pada masa Perang Dingin dan kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur pasca Perang Dingin. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai perbedaan kompleksitas keamanan kawasan pada masa Perang Dingin dan pasca Perang Dingin.

Penulis juga akan membahas lebih *detail* mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam RSCT. Pertama, *Boundary* di Asia Timur. Kedua, *anarchic structure* di kawasan Asia Timur yang membahas adanya penetrasi aktor eksternal dalam kawasan yang melakukan aliansi keamanan dengan negara-negara di Asia Timur. Ketiga, polaritas yang terjadi di kawasan Asia Timur yang berfokus pada *distribution of power* negara-negara dalam kawasan. Keempat, penulis akan membahas mengenai *social construction* yang melihat pada pola *amity-enmity* negara-negara dalam kawasan Asia Timur

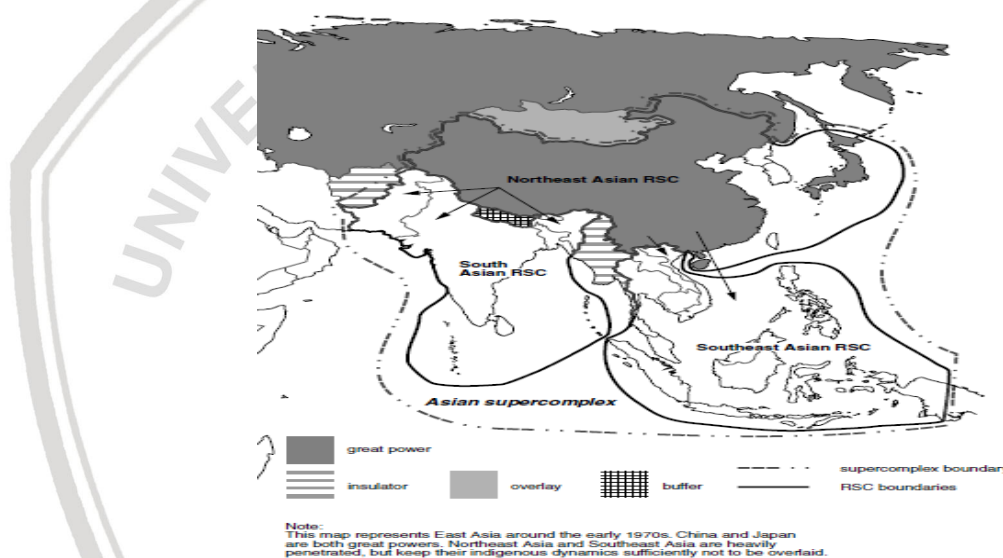
1.1 Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur

4.1.1 Pada Masa Perang Dingin

Bagi Asia Timur, hal yang paling berpengaruh dalam membentuk kompleksitas kawasan pada masa sebelum maupun pada masa Perang Dingin

adalah *power* imperialisme China dan invasi Jepang.⁹⁶ Pada masa Perang Dingin, kawasan Asia terdiri dari tiga kompleks keamanan yang dibedakan menjadi kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur Laut, kompleksitas keamanan Asia Tenggara, dan kompleksitas kawasan Asia Selatan. Ketiga kompleksitas keamanan kawasan ini terbagi menjadi tiga bagian karena dipengaruhi oleh adanya rivalitas *superpower*.⁹⁷

Gambar 1. Peta Kompleksitas Kawasan Asia Pada Masa Perang Dingin



Sumber: Region and Powers, The Structure of International Security

Pada masa sebelum dan selama Perang Dunia II, kekuatan Jepang disertai dengan ambisi imperialisme Jepang membentuk kompleksitas keamanan Asia terhubung menjadi kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Sebelum munculnya imperialisme Jepang pada akhir abad ke 19, kawasan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara memiliki dinamika keamanan yang

⁹⁶Barry Buzan dan Ole Waever, "*Region and Powers: The Structure of International Security*", Cambridge University Press 2003, hal 95

⁹⁷Ibid, hal 96

terpisah. Pada masa Perang Dingin, pola keamanan regional di Asia Timur mendapatkan penetrasi yang besar dari negara-negara *superpower*. Situasi Perang Dingin yang terjadi di Asia Timur (khususnya Asia Timur Laut) memiliki kesamaan dengan situasi yang terjadi di Eropa dimana terdapat pengaruh *superpower* yang kuat dalam kawasan.⁹⁸

Hal ini kemudian membentuk polaritas yang cenderung *bipolar* karena kekuatan terpusat pada Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pertarungan ideologi. Namun, Asia Timur hanya mengalami penetrasi saja dari negara-negara *superpower*, sedangkan Eropa mengalami *overlaid*, sehingga, Eropa tidak hanya sekedar melakukan penetrasi ke kawasan lain, namun juga menjadi hegemon. Kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur Laut juga terjadi pada level global yang terlihat dari pendudukan Amerika Serikat di Jepang serta pendudukan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Semenanjung Korea.⁹⁹

1.1.2 Pasca Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin memberikan perubahan pada kawasan Asia Timur. Perubahan tersebut ditandai dengan mundurnya kekuasaan Uni Soviet dalam kawasan yang disebabkan oleh kekalahan Uni Soviet pada Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin juga masih menyisakan konfrontasi di Asia timur. Seperti pada konfrontasi di Semenanjung Korea berlanjut serta Jepang memilih untuk terus mempertahankan aliansinya dengan Amerika Serikat. Pengaruh dan

⁹⁸Ibid, hal 128

⁹⁹Ibid, hal 131

agresivitas China dalam kawasan juga semakin mengalami peningkatan. Hal ini kemudian membuat terjadinya *external transformation* dalam dinamika RSC Asia Timur.¹⁰⁰

Mundurinya Uni Soviet dari kawasan Asia Timur pasca Perang Dingin membuat peran Amerika Serikat Di kawasan Asia Timur lebih besar. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat maupun Korea Selatan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam dinamika kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dimana Amerika Serikat sebagai aliansi Jepang yang pada awalnya meminta Jepang untuk melakukan demiliterisasi akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, namun, pasca Perang Dingin Amerika Serikat justru ingin Jepang untuk meningkatkan aspek militernya.¹⁰¹

Amerika Serikat melihat Jepang sebagai aliansi yang potensial yang dapat membantu Amerika Serikat dalam Perang melawan Iraq. Amerika Serikat merasa kecewa dengan Jepang yang hanya mampu mengirimkan bantuan finansial tanpa mengirimkan pasukan untuk membantu pasukan Amerika Serikat di daerah konflik.¹⁰² Amerika Serikat bahkan mempertanyakan loyalitas Jepang sebagai aliansinya dimana selama ini Amerika Serikat telah banyak membantu Jepang dalam hal memberikan keamanan, namun, Jepang tidak pernah memperlakukan Amerika Serikat dengan hal yang sama (*military reciprocity*). Jepang kemudian

¹⁰⁰Ibid, hal 144

¹⁰¹ Ibid

¹⁰²Richard K. Betts, "*Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War*", International Security, MIT Press, Vol. 18, No. 3, Winter, 1993-1994, hal 56

sedikit demi sedikit melakukan perubahan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanannya agar dapat leluasa dalam membantu Amerika Serikat dan melindungi kedaulatannya dari kompleksitas kawasan Asia Timur.¹⁰³

Selain adanya pengaruh eksternal dari Amerika Serikat dalam kawasan, seperti yang diketahui, Asia Timur terfokus pada tiga negara yang sangat mempengaruhi dinamika kompleksitas keamanan kawasan yaitu China, Jepang, dan Korea Utara. Korea Utara menjadi negara yang mempengaruhi kompleksitas keamanan kawasan karena letak Korea Utara yang berada di jantung Asia Timur. China dan Jepang dilihat sebagai negara yang mempengaruhi kompleksitas keamanan kawasan karena, China dan Jepang merupakan negara *great power* yang berpengaruh di kawasan.¹⁰⁴

Korea Utara merupakan negara yang memiliki sistem kepemimpinan yang otoriter dengan permasalahan krisis ekonomi dan kelaparan selama tahun 1990an. Permasalahan yang terjadi pada Korea Utara adalah seputar krisis nuklir yang mengancam negara-negara di dunia terutama di kawasan Asia Timur. Bagi Jepang, berakhirnya Perang Dingin menandai peningkatan kerjasama militer dengan Amerika Serikat yang ditandai dengan penandatanganan *US-Japanese Security Treaty*. Penandatanganan perjanjian tersebut membuat posisi Jepang semakin diperhitungkan dalam kawasan. Hal ini dikarenakan, selain dikenal sebagai *great power*, Jepang juga beraliansi dengan negara *superpower*.¹⁰⁵

¹⁰³Ibid

¹⁰⁴Barry Buzan dan Ole Waever, *“Region and Powers: The Structure of International Security”*, Cambridge University Press 2003, hal 146

¹⁰⁵Ibid

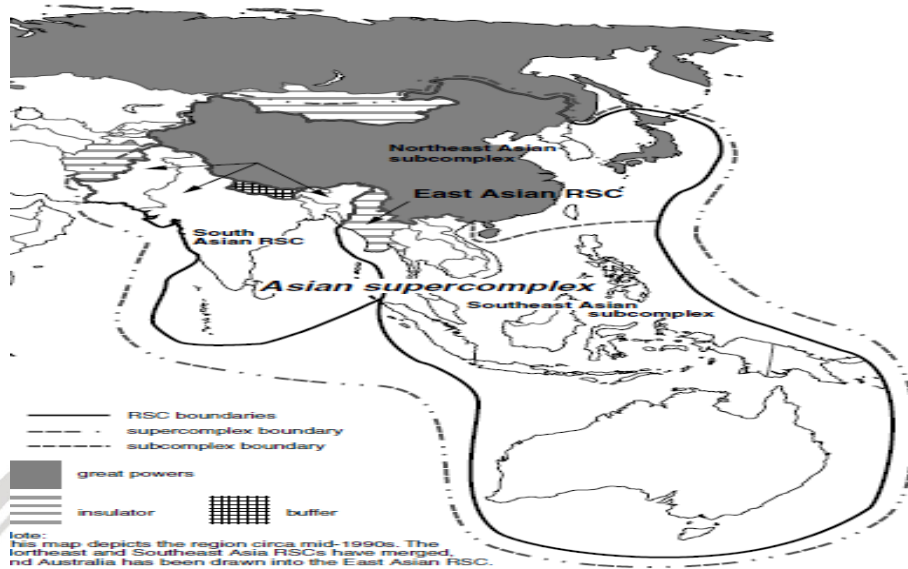
Kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur terjadi karena terdapat tiga isu besar yang mempengaruhi dinamika keamanan yaitu Jepang yang memiliki banyak masalah dengan negara tetangga di kawasan, agresivitas China, dan konflik di semenanjung Korea. Pasca Perang Dingin, Jepang terlihat tidak mampu menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga di Asia Timur akibat faktor sejarah kelam pada masa Perang Dunia II. Hubungan Jepang dengan China, Korea Utara, dan Korea Selatan tetap bersitegang. Hal ini dikarenakan, terjadi konflik sengketa wilayah atas beberapa pulau yang disengketakan baik oleh China maupun Korea Selatan.¹⁰⁶

Hal yang masih dipermasalahkan oleh negara-negara tetangga Jepang adalah perilaku agresif dan ekspansionis Jepang pada masa Perang Dunia II. Peningkatan kapabilitas militer Korea Utara dengan menambah pasukan Angkatan Laut terlihat dikembangkan untuk menyaingi posisi Jepang. Terlihat pula krisis nuklir Korea Utara yang dilakukan melalui pengembangan dan uji coba nuklir terutama uji coba yang dilakukan pada tahun 1994 ke laut Jepang menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang.¹⁰⁷

¹⁰⁶Ibid

¹⁰⁷Ibid, hal 153

Gambar 2. Peta Kompleksitas Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin



Sumber: Region and Powers, The Structure of International Security

Pada peta diatas, terlihat bahwa kompleksitas keamanan kawasan Asia menyatu menjadi *Asian Supercomplex* yang terdiri dari kompleksitas keamanan kawasan Asia Selatan dan Asia Timur dimana Asia Timur memiliki subkompleks kawasan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pada tahun 2000an, kompleksitas kawasan Asia Timur yang terlihat adalah adanya *rivalry* atau persaingan antar negara-negara di Asia Timur yang juga disertai konflik. Hal tersebut dapat terlihat dari konflik sengketa wilayah antara Jepang dan China serta Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, terdapat pula ancaman nuklir Korea Utara yang mengancam negara-negara Asia Timur.

1.2 *Boundary* Kawasan Asia Timur

Boundary merupakan variabel dalam RSCT yang menjelaskan mengenai adanya batas-batas antar negara dalam suatu kawasan. Ide utama dalam variabel *boundary* adalah suatu ancaman akan lebih sering diciptakan oleh negara-negara yang memiliki jarak yang berdekatan daripada negara-negara yang jaraknya berjauhan. Ancaman yang datang dari jarak yang berdekatan tersebut membentuk sebuah dinamika keamanan kawasan menjadi kompleks. Negara-negara dalam kawasan tersebut akan menggantungkan keamanannya pada negara-negara yang tergabung dalam kawasan yang sama.¹⁰⁸

Sehingga, hal tersebut akan menciptakan pola *security interdependence* atau ketergantungan keamanan antar negara-negara dalam kawasan. Buzan dan Waever menjelaskan bahwa secara historis, batas-batas negara memang sudah ditentukan berdasarkan kedekatan negara dalam kawasan, sehingga, hal tersebut menciptakan intensitas ancaman yang seringkali datang dari negara tetangga daripada negara diluar kawasan.¹⁰⁹

Selain melihat kepada adanya *security interdependence*, hal lain yang harus dilihat dalam memahami *boundary* dalam RSCT adalah adanya *local geographical proximity* yang menyatakan bahwa akan terdapat pengaruh kedekatan jarak suatu negara dalam kawasan terhadap negara lain di kawasan dalam aspek militer, politik, sosial, keamanan, maupun lingkungan.¹¹⁰ Aspek lain yang akan mempermudah dalam

¹⁰⁸Ibid, hal 4

¹⁰⁹Ibid

¹¹⁰Ibid, hal 45

melihat *boundary* dalam kawasan adalah dengan melihat batas-batas fisik suatu negara serta negara-negara mana saja dalam kawasan yang terlibat dalam RSC.

Secara geografis kawasan Asia Timur dikenal sebagai kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya, memiliki kebudayaan yang beragam, dan dihuni oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang pesat yaitu China (termasuk Taiwan), Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara tersebut dikenal sebagai “payung” Asia Timur karena memiliki kedekatan geografis yang sangat dekat.¹¹¹ Negara-negara dalam kawasan Asia Timur juga mempunyai kesamaan budaya, terutama budaya yang juga berasal dari China yaitu paham *Confucianism* dan penggunaan tulisan karakter China (hanzi dalam bahasa China, kanji dalam bahasa Jepang, dan hanja dalam bahasa Korea) dalam sistem penulisan masing-masing negara. Penggunaan sistem penulisan dengan karakter China tersebut telah diadopsi sejak berabad-abad yang lalu.¹¹²

China, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara juga seringkali menghadapi permasalahan yang sama seperti masalah lingkungan, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan. Hal ini dikarenakan, negara-negara tersebut terletak dalam jarak geografis yang berdekatan.¹¹³ Sehingga, tidak mengherankan jika negara-negara tersebut memiliki permasalahan yang sama.

¹¹¹ Anne Prescott, “Overview: Introducing East Asia” dalam buku “*East Asia in the World: An Introduction*”, Routledge: Taylor and Francis Group, New York: 2015, hal 11-12

¹¹² Ibid

¹¹³ Ibid

Gambar 3. Peta Kawasan Asia Timur



Sumber: *Glencoe World Geography*

Selain itu, negara-negara Asia Timur juga dilihat sebagai kawasan dimana negara-negara yang berada didalamnya merupakan negara-negara bekas imperialisme barat. Sehingga, negara-negara tersebut memiliki faktor historis yang sama akibat dari adanya imperialisme bangsa Eropa.¹¹⁴ Masuknya imperialisme Barat di Asia Timur membuat negara-negara di Asia Timur mengalami modernisasi. Modernisasi tersebut berupa kemajuan dalam bidang perindustrian, teknologi, dan ekonomi.¹¹⁵

Meskipun modernisasi yang terjadi di Asia Timur membawa dampak pada kemajuan industri, teknologi, dan ekonomi pada negara-negara dalam kawasan, namun, hal tersebut tidak lantas membuat negara-negara Asia Timur memiliki pandangan mengenai sistem politik yang sama. Hal ini dilihat dari adanya perbedaan sistem politik dan pemerintahan yang ada. China dan Korea Utara menganut ideologi

¹¹⁴Jeffrey L. Ritchey, "Society and Culture: Confucianism in East Asia Today" dalam buku "East Asia in The World: An Introduction" Routledge: Taylor and Francis Group, New York: 2015, hal 166

¹¹⁵John K Fairbank, dkk, "East Asia: The Modern Transformation", Houghton Mifflin Company, Boston, USA: 1960, hal 7

komunis sedangkan Jepang dan Korea Selatan merupakan negara liberal yang menggunakan sistem pemerintahan republik dan sistem ekonomi kapitalis.¹¹⁶

Di Asia Timur, terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh negara-negara dimana hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran batas teritorial negara (*boundary*). Hal ini dapat dilihat dari kasus sengketa wilayah pulau antara Jepang dan China atas pulau Senkaku/Diaoyu dimana terjadi bentrok antara pasukan militer China dan SDF Jepang dimana Jepang menuduh kapal nelayan China telah memasuki wilayah Jepang tanpa izin.¹¹⁷

1.3 *Anarchic Structure* Kawasan Asia Timur

Variabel *anarchic structure* melihat pada adanya *autonomous unit* dan *intrusive system* yang ada dalam kawasan. *Autonomous unit* melihat pada negara-negara dalam kawasan yang membentuk dan mempengaruhi pola kompleksitas kawasan. Sementara itu, *intrusive system* dapat dilihat sebagai kehadiran aktor eksternal di luar kawasan yang melakukan penetrasi dan menyebarkan pengaruhnya dalam suatu kawasan. Penetrasi itu sendiri dilakukan oleh aktor eksternal karena aktor eksternal tersebut memiliki kepentingan dalam kawasan. Penetrasi dapat terjadi jika terdapat negara diluar kawasan yang membentuk aliansi keamanan dengan negara-negara dalam

¹¹⁶Richard G. Boehm, "East Asia" dalam buku "Glencoe World Geography", Texas Edition, 25 Januari 2002, hal 634

¹¹⁷Yuki Tatsumi, "Japan's Foreign Policy Challenges in East Asia: Views from Next Generation", Washington DC: STIMSON Center, 2014, hal 13

kawasan. Penetrasi juga terjadi karena adanya rivalitas dalam kawasan yang memberikan peluang bagi aktor diluar kawasan untuk melakukan penetrasi.¹¹⁸

Penetrasi dapat berubah menjadi *overlay* jika aktor eksternal tidak hanya ingin menyebarkan pengaruhnya dalam suatu kawasan, namun juga ingin menjadi hegemon dan menguasai kawasan tersebut. Buzan dan Waever mengatakan bahwa *overlay* terjadi jika kepentingan aktor eksternal atau *great power* dalam kawasan lebih dari sekedar melakukan penetrasi. Namun, aktor eksternal atau *great power* tersebut ingin mendominasi kawasan. Seperti contoh, kolonialisasi Eropa di Afrika, Asia, dan Amerika.¹¹⁹

Pada masa Perang Dingin, kawasan Asia Timur Laut (*Northeast Asia*) dan Asia Selatan mengalami penetrasi dari Amerika Serikat dan Rusia. Namun, penetrasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada kawasan Asia Timur Laut dan Asia Selatan tidak membentuk kondisi yang *overlay* karena kedua negara tersebut tidak sepenuhnya mendominasi dalam kawasan.¹²⁰

1.3.1 Penetrasi Amerika Serikat

Seperti yang diketahui, aktor eksternal melakukan penetrasi di kawasan dengan cara melakukan aliansi keamanan dengan negara-negara di dalam kawasan. Pada kawasan Asia Timur, terdapat penetrasi Amerika Serikat yang sangat menonjol. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan aliansi keamanan dengan

¹¹⁸Barry Buzan dan Ole Waever, "*Region and Powers: The Structure of International Security*", Cambridge University Press 2003, hal 46

¹¹⁹Ibid, hal 61

¹²⁰Ibid, hal 62

Jepang dan Korea Selatan. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membuat Jepang harus menelan pil pahit akibat kealahannya yaitu Jepang tidak lagi diperbolehkan memiliki pasukan militer agar tidak menjadi negara yang agresif dan ekspansionis. Ekspansionisme Jepang membuat banyak negara-negara lain trauma terhadap Jepang sehingga dengan terpaksa Jepang harus menerapkan kebijakan *pasifisme* yang menuntut Jepang menjadi negara yang anti militeristik.¹²¹

Jepang kemudian menandatangani *US-Japan Treaty* dimana salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah Amerika Serikat akan menjadi aliansi Jepang dan Amerika Serikat berhak untuk memberikan perlindungan keamanan bagi Jepang. Aliansi Jepang dan Amerika Serikat pada awalnya terbentuk melalui *Mutual Security Pact* tahun 1952, kemudian ditingkatkan menjadi *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960 dimana dalam perjanjian tersebut Jepang setuju untuk memberikan hak bagi pasukan bersenjata Amerika Serikat untuk menempatkan pasukan tersebut di wilayah Jepang sementara Amerika Serikat memberikan proteksi keamanan bagi Jepang yang diakibatkan oleh ancaman keamanan kawasan maupun ancaman eksternal.¹²²

Pada akhirnya, Amerika Serikat menempatkan sebanyak 50.000 pasukan di wilayah Jepang. Pasukan Amerika Serikat ditempatkan di Pasifik Selatan Jepang diizinkan untuk membawa senjata *nuclear-powered aircraft carrier*, mengizinkan penempatan pesawat peringatan dini untuk menghalau ancaman regional dan agresi

¹²¹Michael J. Green, "The US-Japan Alliance: A Brief Strategic History", Asian Government and Legal System, Official US Navy Photograph, Volume 12, no. 3, Winter 2007, hal 26

¹²² John Allen, Benjamin Sugg, "The US-Japan Alliance", Asian Alliance Working Paper Series, Juli 2016, hal 1

militer terutama berkaitan dengan uji coba nuklir dan misil balistik Korea Utara. Pada awalnya, aliansi Amerika Serikat dan Jepang hanya bersifat *non-mutual* dimana hal tersebut berarti Jepang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi perlindungan kepada Amerika Serikat ketika Amerika Serikat diserang.¹²³

Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dan Jepang kembali meningkatkan aliansinya dimana pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe dan Obama, Jepang dan Amerika Serikat meningkatkan aliansinya dengan cara Jepang diizinkan untuk memberikan proteksi keamanan bagi negara lain secara sah dan mendapatkan persetujuan dari Diet Jepang. Setelah mendapatkan persetujuan dari Diet, Jepang kemudian ikut berpartisipasi dalam operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Iraq.¹²⁴ Kedua negara tersebut kemudian juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi bilateral dan bekerjasama dalam pembangunan dan pengembangan *Ballistic Missile Defense* (BMD), *cyber security*, dan *the use of space*. Selain itu, Jepang dan Amerika Serikat juga berpartisipasi dalam kerjasama keamanan internasional dengan Australia, Filipina, dan India.¹²⁵

Meningkatnya aliansi Jepang dan Amerika Serikat dalam hal ini tidak selalu berjalan mulus, terdapat *domestic tension* atau tensi warga negara Jepang terhadap aliansi Jepang dan Amerika Serikat. Banyaknya pasukan Amerika Serikat di Okinawa juga semakin menambah tensi warga negara Jepang. Sehingga, pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa semakin dikurangi. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari penduduk Okinawa terhadap pasukan militer Amerika Serikat.

¹²³ Ibid

¹²⁴ Ibid, hal 2

¹²⁵ Ibid

Penolakan tersebut terjadi karena kehadiran pasukan Amerika Serikat meningkatkan tingkat kriminalitas di Okinawa dan kerusakan lingkungan.¹²⁶ Penolakan tersebut diikuti dengan kebijakan Amerika Serikat untuk menarik 9000 Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat dari Okinawa.¹²⁷

Meskipun peran Amerika Serikat di Okinawa semakin berkurang, Jepang dan Amerika Serikat tetap berusaha untuk meningkatkan hubungan aliansi dan tetap menjadi aliansi yang dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Asia Timur. Selain Jepang, Amerika Serikat juga memiliki aliansi keamanan dengan Korea Selatan.

Ketika Jepang kehilangan kendali atas semenanjung Korea pada masa akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi semenanjung Korea menjadi dua teritori yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 1948, Amerika Serikat mendeklarasikan Seoul sebagai ibu kota *Republik of Korea* (ROK). Uni Soviet tidak setuju dengan pendeklarasian tersebut dan menginvasi *Democratic People's Republic of Korea* (DPRK) pada tahun 1950. Sejak saat itu, Amerika Serikat menguasai Korea Selatan dan Uni Soviet menguasai Korea Utara.¹²⁸

Pada tahun 1954, Amerika Serikat dan Korea Selatan menandatangani "*ROK-US Mutual Security Agreement*" dimana Amerika Serikat dan Korea Selatan setuju untuk saling melindungi jika terdapat agresi yang terjadi. Pada tahun 1978, kedua

¹²⁶Emma Chanlett-Avery, Ian E Rinehart, "*The US Military Presence in Okinawa and Futenma Base Controversy*", Congressional Research Service, 20 Januari 2016, hal 7

¹²⁷Bob Kovach, Chelsea J Carter, "*US-Japan Deal Withdraws 9000 Marines from Okinawa*", CNN News, 27 April 2012, diakses dari <http://edition.cnn.com/2012/04/27/world/asia/japan-us-okinawa/index.html>

¹²⁸Jayshree Bajoria, Youkyung Lee, "*The US-South Korea Alliance*", Council on Foreign Relations, 13 Oktober 2011, diakses dari <https://www.cfr.org/backgrounders/us-south-korea-alliance>

negara membentuk *Combined Forces Command* (CFC) yang terletak di Seoul. CFC tersebut mengharuskan Amerika Serikat untuk memberikan proteksi keamanan bagi karena adanya ancaman masif dari Korea Utara.¹²⁹ Dapat terlihat bahwa, Amerika Serikat dan Korea Selatan memiliki ancaman keamanan yang sama yaitu Korea Utara dengan pengembangan dan uji coba nuklir yang sering dilakukan.

Sejak saat itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin meningkatkan aliansi keamanannya karena kedua negara tersebut sama-sama merasa terancam dengan kepemilikan nuklir Korea Utara. Terdapat beberapa faktor yang membuat aliansi keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin meningkat. Faktor pertama berkaitan dengan kepemilikan nuklir Korea Utara yang dapat disalahgunakan oleh Korea Utara dalam pembuatan senjata *Weapon and Mass Destruction* (WMD), adanya keinginan Korea Selatan untuk menggunakan status Korea Selatan sebagai *middle power* untuk dapat lebih berpartisipasi dalam memberikan proteksi keamanan bagi negara-negara lain khususnya dalam level regional.¹³⁰

Selain itu, adanya transformasi dari Korea Selatan yang menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi dengan kekuatan *export-oriented* dalam bidang industri senjata. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang dapat dilihat sebagai faktor yang membuat Korea Selatan dan Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat aliansi keamanannya.¹³¹ Sejak tahun 2009, Korea Selatan dan Amerika Serikat membentuk berbagai perjanjian dan kerjasama untuk memperluas dan

¹²⁹ Ibid

¹³⁰ Mark E. Manyin, dkk, "*U.S-South Korea Relation*", Congressional Research Service, 24 Juni 2014, hal 7

¹³¹ Ibid

meperkuat aliansinya untuk menghadapi ancaman serangan nuklir Korea Utara yang tidak hanya berdampak pada regional namun juga berdampak secara global. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan *joint statements issue* dengan mengadakan *high-level meetings* yang membahas mengenai komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat aliansinya untuk mengatasi ancaman Korea Utara.¹³²

Selain itu, kedua negara juga membentuk kebijakan “*Strategic Patience*” yang dilakukan dengan membentuk upaya-upaya *soft power* seperti mengadakan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara yang dikenal dengan negosiasi *Six Party Talks*. Dalam negosiasi *Six Party Talks* tersebut, terdapat 4 komponen utama yaitu selalu berusaha untuk melakukan negosiasi denuklirisasi melalui *Six Party Talks* yang mengedepankan pada adanya penolakan untuk mengaktifkan program nuklir Korea Utara, berusaha membuat Korea Utara mematuhi aturan yang ada dalam *Six Party Talks*, *US-North Korean Talks* harus berfokus pada agenda denuklirisasi dan memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara serta merespon provokasi Pyongyang dengan memperkuat sanksi terhadap Korea Utara atas uji coba nuklir maupun latihan militer.¹³³

Namun, berbagai negosiasi denuklirisasi yang dilakukan tidak dapat membuat Korea Utara menonaktifkan pengembangan nuklirnya. Sehingga, untuk merespon hal tersebut, Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan AD, AL, maupun AU. Selain itu, Korea Selatan juga melakukan *deployment Theater High-Altitude Area Defense* (THAAD) atas perintah Amerika Serikat. *Deployment*

¹³² Ibid

¹³³ Ibid

THAAD juga dilakukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara.¹³⁴

1.4 *Polarity* Kawasan Asia Timur

Dalam RSCT, *polarity* berfokus pada adanya *distribution of power* yang dapat dilihat dari beberapa polaritas seperti *unipolar*, *bipolar*, maupun *multipolar*. Unipolar terjadi dalam kawasan ketika terdapat satu negara yang memberikan pengaruh besar. Bipolar terjadi jika kekuatan terpusat kepada dua negara, hal ini dapat terlihat pada fenomena Perang Dingin dimana kekuatan terpusat kepada dua kekuatan yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dingin, kekuatan tidak lagi bersifat bipolar dan hanya terpusat pada Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun, lebih bersifat multipolar yaitu kekuatan terpusat pada dua atau lebih negara.¹³⁵

Terdapat perdebatan antara akademisi Hubungan Internasional mengenai sistem global yang terjadi berbentuk bipolar ataukah multipolar serta sistem manakah yang lebih stabil atau tidak stabil. Hal tersebut menjadi pertanyaan karena, menurut realist, struktur sistem dunia (*unipolarity*, *bipolarity*, dan *multipolarity*) dalam penerapannya akan mempengaruhi stabilitas sistem itu sendiri. Berlawanan dengan pandangan realist, liberalist lebih optimis dalam memandang sistem dunia dengan adanya

¹³⁴ Evans Revere, "The U.S ROK Alliance: Projecting and Preserving Stability in Northeast Asia", Asian Alliance Working Paper Series 3, hal 3

¹³⁵ Barry Buzan dan Ole Waever, "Region and Powers: The Structure of International Security", Cambridge University Press 2003, hal 34

prospek tercapainya keamanan dunia karena adanya ketergantungan ekonomi antar negara-negara di dunia terutama negara dalam kawasan.¹³⁶

4.4.1 Multipolaritas di Asia Timur

Di Asia Timur, dapat terlihat bahwa *distribution of power* yang terbentuk adalah multipolar. Hal ini dikarenakan, kekuatan tidak hanya terpusat pada satu ataupun dua negara saja, namun, kekuatan terpusat pada banyak negara-negara yang mampu mempengaruhi dinamika kompleksitas keamanan kawasan. Di Asia, khususnya Asia Timur, multipolar terjadi karena kekuatan berpusat pada *great power* yaitu China dan Jepang, terdapat pula *middle power* yang dapat mengancam kedamaian dan menimbulkan perang yaitu Korea Utara dengan ancaman nuklir yang mengancam keamanan kawasan.¹³⁷

Richard K. Betts mengatakan bahwa polaritas multipolar yang terjadi di Asia Timur memang merupakan *pattern* yang seharusnya terjadi di Asia Timur. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi pengaruh *great power* seperti China dan Jepang serta pengaruh dari aktor eksternal yang juga memainkan peranan penting dalam kawasan yaitu Amerika Serikat.¹³⁸ Betts juga mengatakan bahwa perkembangan ekonomi China yang pesat mampu menyebabkan konflik antar negara-negara dalam kawasan, terutama Jepang. Jika Jepang memiliki angkatan bersenjata, Jepang akan

¹³⁶Duong Nu Hoang Anh, "Multipolarity and Stability in Asia", Victoria University of Wellington New Zealand, 2013, hal 1

¹³⁷Ibid, hal 9

¹³⁸Ibid

menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia dan hal tersebut juga akan memberikan ancaman bagi negara-negara dalam kawasan.¹³⁹

Beberapa akademisi Hubungan Internasional seperti Gerry Segal, Christopher W. Hughes, dan Betts pada tahun 1993-1994 memprediksi bahwa *multipolarity* yang terjadi di Asia Timur akan membuat kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan kawasan Asia Timur tersebut akan diikuti dengan peningkatan kekuatan militer dan ekonomi China, konflik ataupun perang antar semenanjung Korea akibat krisis nuklir Korea Utara, dan perubahan kebijakan keamanan Jepang melalui *rearmament* atau pelucutan senjata.¹⁴⁰

Prediksi beberapa akademisi Hubungan Internasional tersebut telah terjadi dalam periode pasca Perang Dingin. Hal tersebut dapat terlihat dari agresivitas China, konflik antar semenanjung Korea diikuti dengan uji coba nuklir Korea Utara, dan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Meskipun Jepang tidak memiliki angkatan bersenjata, namun pasukan JSDF dikenal sebagai pasukan yang kuat. Jepang juga memiliki aliansi yang potensial untuk mendukung Jepang dalam aspek militer yaitu Amerika Serikat.

Selain itu, Jepang juga memperluas misi JSDF untuk ikut berperan dalam misi keamanan diluar teritori Jepang. Hal tersebut juga didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ingin Jepang untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer agar Jepang mampu berkontribusi dan membantu Amerika Serikat dalam perang Iraq

¹³⁹Ibid, hal 10

¹⁴⁰Ibid

tahun 1991.¹⁴¹ Namun, karena Jepang masih memegang teguh paham pasifis, maka Jepang hanya mengirimkan bantuan dana bagi Amerika Serikat tanpa mengirimkan pasukan. Hal tersebut menuai kritik dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya bahwa Jepang hanya mampu mengirimkan uang tanpa mengirimkan pasukan.¹⁴² Sejak saat itu, Jepang mulai terlihat lebih agresif dengan terus melakukan peningkatan kapabilitas militer pasca Perang Dingin.

Peningkatan kapabilitas militer Jepang dan agresivitas Jepang dalam kawasan juga membuat negara-negara lain dalam kawasan mengecam tindakan Jepang, terutama China. China dan Jepang merupakan dua negara *great power* dalam kawasan yang saling bersaing satu sama lain. China juga merasa terancam dengan pengembangan kapabilitas militer Jepang karena Jepang juga didukung oleh Amerika Serikat.¹⁴³

Sementara itu, di Asia Timur Amerika Serikat juga memiliki aliansi yang kuat dengan Korea Selatan. Korea Selatan diketahui memiliki militer yang kuat dengan kepemilikan senjata yang kuat. *The International Institute for Strategic Studies* menyatakan bahwa Korea Utara telah memiliki persenjataan yang maju. Persenjataan tersebut terdiri dari misil penghancur jenis F-15 *fighter* dan kapal selam terbaru yang membawa misil penghancur yang berjenis Sejong *Great-Class*.¹⁴⁴ Aspek militer

¹⁴¹Richard K. Betts, "Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War", *International Security*, MIT Press, Vol. 18, No. 3, Winter, 1993-1994, hal 56

¹⁴²Ibid

¹⁴³Ibid

¹⁴⁴Brad Lendon, "North Asia on A Knife's Edge: Whose Position is the Strongest?", CNN, 04 April 2017, diakses dari <http://edition.cnn.com/2017/03/16/china/asia-military-balance-china-koreas-japan-us/index.html> pada 26 Desember 2017 pukul 23.00 WIB

Korea Selatan turut diperhitungkan oleh negara-negara dalam kawasan karena Korea Selatan juga beraliansi dengan Amerika Serikat.¹⁴⁵

Korea Selatan juga terus melakukan peningkatan militernya karena, Korea Selatan merasa posisinya dalam kawasan Asia Timur terus terancam dengan adanya konflik dengan Korea Utara yang tidak kunjung usai. Korea Utara merupakan negara yang keberadaannya dianggap sebagai ancaman oleh kawasan. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan nuklir dan uji coba nuklir yang terus-menerus dilakukan oleh Korea Utara.¹⁴⁶

Dalam tulisan Brad Lendon pada artikel CNN, Lendon menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang membuat Korea Utara menjadi kuat. Pertama, Korea Utara memiliki kapabilitas nuklir dimana Kim Jong Un memiliki sifat yang agresif sehingga negara lain harus berhati-hati dengan Korea Utara. Kedua, Korea Utara pernah berhasil melakukan uji coba nuklir yang diarahkan ke laut Jepang pada tahun 2016.¹⁴⁷ Keberhasilan uji coba nuklir Korea Utara tersebut menjadi peringatan bagi negara-negara lain terutama negara dalam kawasan untuk berhati-hati terhadap Korea Utara yang kapan saja bisa terus menjadi ancaman.

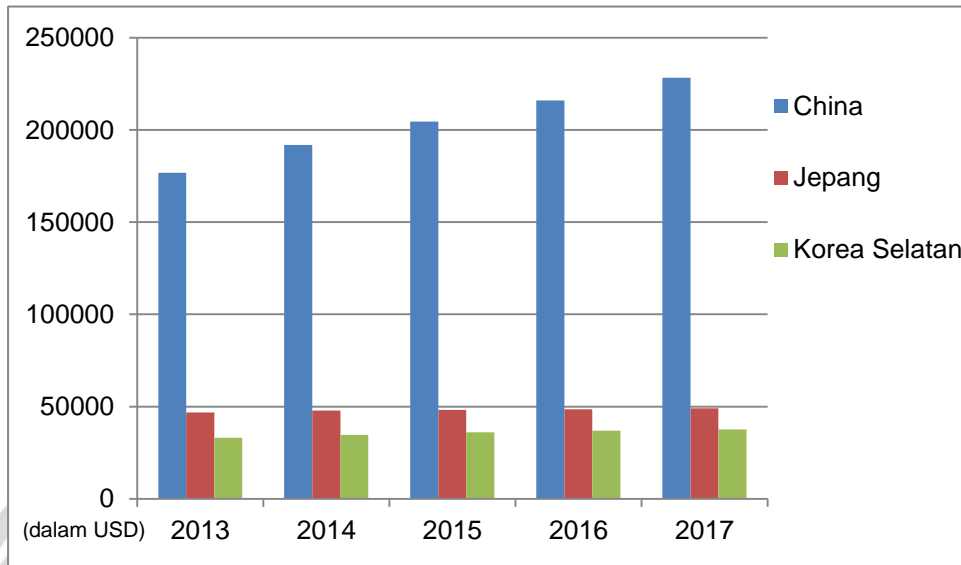
Pada periode tahun 2013-2017, negara-negara Asia Timur diketahui melakukan peningkatan *military expenditure*. Bagi Jepang, peningkatan *military expenditure* China dilakukan tanpa adanya transparansi yang jelas, sehingga, peningkatan *military expenditure* China merupakan ancaman bagi Jepang

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ Ibid

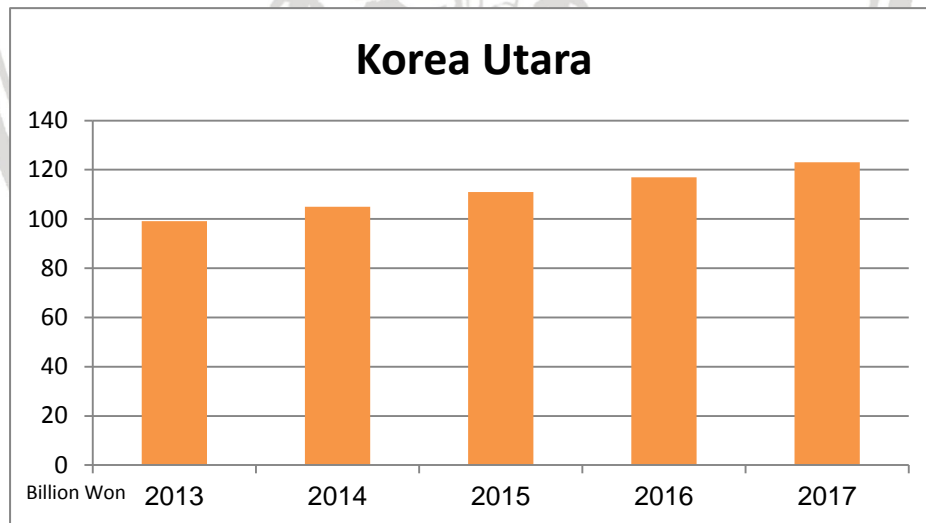
¹⁴⁷ Ibid

Grafik 1. Perbandingan Peningkatan *Military Expenditure* Negara-Negara Asia Timur Tahun 2013-2017



Sumber diolah penulis dari *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI)

Grafik 2. *Military Expenditure* Korea Utara Tahun 2013-2017



Sumber diolah penulis dari *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI)

Dari grafik diatas, dapat terlihat bahwa negara-negara Asia Timur yaitu Jepang, China, Korea Utara dan Korea Selatan melakukan peningkatan *military expenditure*. Pada Grafik 1.1 menunjukkan adanya perbandingan *military expenditure* antara Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan yang dihitung dalam mata uang USD (*United States Dollar*). Dapat terlihat dalam grafik 1.1 bahwa China merupakan negara yang paling banyak melakukan *military expenditure* pada periode 2013-2017. Sementara itu, Jepang juga terlihat melakukan peningkatan *military expenditure* meskipun peningkatan *military expenditure* Jepang setiap tahunnya tidak terlalu tinggi seperti yang dilakukan China.

Korea Selatan berada dibawah posisi China dan Jepang namun diketahui juga melakukan peningkatan *military expenditure* setiap tahun 2013-2017. Pada grafik 1.2, dapat terlihat peningkatan *military expenditure* Korea Utara yang tertuang dalam mata uang lokal Korea Utara. Dapat diketahui bahwa Korea Utara juga melakukan peningkatan *military expenditure* pada periode tahun 2013-2017. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa negara-negara Asia Timur melakukan peningkatan *military expenditure* nya dan hal tersebut saling menjadi ancaman satu sama lain bagi negara-negara Asia Timur.

Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Negara-Negara di Asia Timur

<i>Military Strength</i>	China	Korea Utara
<i>Total Population</i>	1.379.302.771	25.248.140
<i>Manpower Available</i>	750.000.000	13.000.000
<i>Active Personnel</i>	2.183.000	945.000
<i>Reserve Component</i>	510.000	5.500.000
<i>Total Military Personnel</i>	2.693.000	6.445.000
<i>Defense Budget</i>	\$151.000.000.000	\$7.500.000.000
<i>Total Aircraft</i>	3.035	944
<i>Tank Strength</i>	7.716	5.243
<i>Total Naval Asset</i>	714	967
<i>Military Strength</i>	Jepang	Korea Selatan
<i>Total Population</i>	126.451.398	51.181.299
<i>Manpower Available</i>	54.000.000	25.610.000
<i>Active Personnel</i>	247.157	625.000
<i>Reserve Component</i>	63.300	5.202.250
<i>Total Military Personnel</i>	310.457	5.827.250
<i>Defense Budget</i>	\$44.000.000.000.000	\$40.000.000.000.000
<i>Total Aircraft</i>	1.508	1.560
<i>Tank Strength</i>	679	2.654
<i>Total Naval Asset</i>	131	166

Sumber diolah penulis dari *Global Fire Power*

Dari tabel diatas, dapat terlihat perbandingan kekuatan militer masing-masing negara di Asia Timur. Dapat diketahui bahwa, dilihat dari segi populasi terbanyak, China menjadi negara dengan populasi terbanyak di Asia Timur disusul dengan Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang. Dilihat dari kekuatan militer yang menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara, dapat terlihat bahwa Jepang menduduki posisi terbawah dibandingkan dengan Korea Selatan, China, dan Korea Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah personil militer aktif negara dimana Jepang hanya memiliki sebanyak 247.157 personil militer sedangkan China memiliki personel militer aktif terbanyak sebanyak 2.183.000 disusul dengan Korea Utara yang memiliki personel 945.000 dan Korea Selatan sebanyak 625.000.

Dilihat dari segi kepemilikan senjata, dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya, Jepang merupakan negara yang memiliki sedikit senjata dibandingkan dengan China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan pesawat tempur, tank, maupun senjata maritim, jumlah kepemilikan Jepang paling sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun, dari segi peningkatan *military expenditure*, Jepang tidak berada dalam posisi terbawah, namun Jepang merupakan negara di Asia Timur yang melakukan peningkatan *military expenditure* terbesar kedua setelah China dimana dalam hal ini diketahui bahwa China merupakan negara *great power* Asia Timur yang memiliki tingkat pengeluaran anggaran belanja militer terbesar diikuti oleh Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Bahkan, menurut data SIPRI, China, Jepang, dan Korea Selatan, masuk dalam kategori 15 besar negara yang meningkatkan *military expenditure* nya pada tahun 2017.

Tabel 2. 15 Negara dengan Peningkatan *Military Expenditure* Tertinggi Tahun 2017

Rank		Country	Spending, 2017 (\$ b.)	Change, 2008-17 (%)	World share, 2017 (%)	Spending as a share of GDP (%) ^b	
2017	2016 ^a					2017	2008
1	1	USA	610	-14	35	3.1	4.2
2	2	China	[228]	110	[13]	[1.9]	[1.9]
3	4	Saudi Arabia	[69.4]	34	[4.0]	[10]	7.4
4	3	Russia	66.3	36	3.8	4.3	3.3
5	6	India	63.9	45	3.7	2.5	2.6
6	5	France	57.8	5.1	3.3	2.3	2.3
7	7	UK	47.2	-15	2.7	1.8	2.3
8	8	Japan	45.4	4.4	2.6	0.9	0.9
9	9	Germany	44.3	8.8	2.5	1.2	1.3
10	10	South Korea	39.2	29	2.3	2.6	2.6
11	13	Brazil	29.3	21	1.7	1.4	1.4
12	11	Italy	29.2	-17	1.7	1.5	1.7
13	12	Australia	27.5	33	1.6	2.0	1.8
14	14	Canada	20.6	13	1.2	1.3	1.2
15	15	Turkey	18.2	46	1.0	2.2	2.2
Total top 15			1 396	..	80
World total			1 739	9.8	100	2.2	2.4

Sumber : *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI)

Dari data tabel diatas dapat terlihat bahwa terdapat tiga negara Asia Timur yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan yang masuk dalam kategori 15 negara yang melakukan peningkatan anggaran belanja militer terbesar di dunia versi SIPRI. China menempati posisi kedua sebagai negara dengan peningkatan anggaran belanja militer setelah Amerika Serikat. Sementara itu, Jepang berada dalam posisi ke 8 dan Korea Selatan berada dalam posisi ke 10. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan kekuatan masing-masing negara di Asia Timur dalam sub-sub berikut:

a. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara *great power* di Asia Timur yang juga merupakan satu-satunya negara pasifis di Asia Timur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konstitusi pasifis Jepang melarang Jepang untuk memiliki kapabilitas militer yang bersifat *offensive* dan Jepang juga dilarang untuk memiliki angkatan bersenjata sehingga Jepang hanya memiliki angkatan bela diri yaitu JSDF. Pada era pasca Perang Dingin, Jepang mulai mengembangkan kapabilitas militer yang canggih didukung dengan peningkatan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

Meskipun Jepang masih mengimplementasikan konstitusi pasifis yang membatasi Jepang untuk memiliki kapabilitas militer yang kuat, namun, kapabilitas militer yang dimiliki Jepang dapat dikatakan canggih. Salah satu kecanggihan kapabilitas militer Jepang dapat terlihat dari kepemilikan kapal selam jenis *Soryu-Class*. Kapal selam jenis *Soryu-class* milik Jepang merupakan kapal selam yang tercanggih di dunia yang dilengkapi dengan 4 sistem *stirling air independent propulsion* yang membuat kapal selam tersebut dapat bertahan lebih lama di dalam air.¹⁴⁸ Kapal selam *Soryu-class* Jepang juga dilengkapi dengan 6 tabung torpedo dengan 20 torpedo *type 89 high-speed homing* yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk misil *Sub-Harpoon*. Kapal selam Jepang tersebut juga dapat meluncurkan misil penghancur untuk melawan musuh.¹⁴⁹ Kepemilikan kapal selam tersebut menjadi

¹⁴⁸ Kyle Mizokami, "Five Japanese Weapons of War that China Should Fear", The National Interest, 14 Juni 2014, diakses dari <http://nationalinterest.org/feature/five-japanese-weapons-war-china-should-fear-10660>

¹⁴⁹ Ibid

kontroversial karena kapal selam tersebut dianggap bisa menjadi senjata yang ofensif bagi Jepang.¹⁵⁰

Selain kapal selam *Soryu-class* Jepang, kapabilitas militer Jepang yang tidak kalah canggih adalah *Atago-class destroyer*. *Atago-class destroyer* merupakan *destroyer* Jepang yang dibentuk untuk berbagai dimana *destroyer* tersebut seringkali digunakan oleh GSDF untuk menjalankan misi. Berat *destroyer* tersebut mencapai 10.000 ton yang beratnya dinilai sama dengan misil penghancur Jepang pada masa Perang Dunia II.¹⁵¹ Terdapat pula aspek maritim Jepang yang canggih yaitu *Izumo class type 22 helicopter destroyer*. Kapabilitas maritim Jepang menjadi semakin canggih dan kuat ketika Jepang memutuskan untuk melakukan modernisasi *Izumo class* dengan menambah 2 *type-22 helicopter destroyers* yang diluncurkan pada Agustus 2013.¹⁵²

Modernisasi *Izumo-class destroyer* tersebut dilihat sebagai versi dari *Hyuga-class helicopter destroyer* yang lebih besar dimana *destroyer* tersebut berfokus pada *Anti-submarine Warfare (ASW)*.¹⁵³ Selain pengembangan kapabilitas militer yang dilakukan oleh Jepang sendiri, Jepang juga melakukan pembangunan dan pengembangan *Ballistic Missile Defense (BMD)* dengan Amerika Serikat. Pengembangan BMD Jepang dan Amerika Serikat dilakukan untuk memperkuat aliansi keamanan antar negara. Selain itu, pengembangan BMD juga dilakukan untuk

¹⁵⁰ Ibid

¹⁵¹ Ibid

¹⁵² Gavan P. Gray, "Japan's Defense Build-up and Its Meaning for Asia", European Institute for Asian Studies Briefing Paper, September 2013, hal 11

¹⁵³ Ibid

memperkuat postur pertahanan Jepang untuk melindungi kedaulatan dan keamanan Jepang dari serangan BMD dari musuh.¹⁵⁴

Pengembangan BMD itu sendiri terus dilakukan oleh Jepang terutama dalam periode tahun 2013-2017 dimana pengembangan BMD dilakukan karena situasi keamanan kawasan yang semakin konfliktual.

Tabel 3. Pembangunan dan Pengembangan BMD Jepang dan Amerika Serikat Tahun 2013-2017

Tahun	Ballistic Missile Defense (BMD)	Keterangan
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi kapabilitas kapal Aegis BMD - Pengembangan misil interseptor SM-3 Block IIA 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan modernisasi <i>Atago-class destroyer</i> yang memiliki kapabilitas BMD - Pengembangan SM-3 Block IIA dilakukan dengan memperkuat kerjasama BMD dengan Amerika Serikat
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi kapabilitas 2 kapal Aegis - Pembelian misil jenis PAC-3 - Pengembangan misil interseptor SM-3 Block IIA yang lebih canggih - Peningkatan kapabilitas BMD : Membeli <i>Fixed Air Defense Radar (FPS-7)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan modernisasi <i>Atago-class destroyer</i> yang memiliki kapabilitas BMD - Pembelian misil PAC-3 dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas militer untuk melawan serangan misil balistik musuh (Deployment PAC-3 diletakkan di Ichigaya) - Kerjasama Jepang-Amerika Serikat terus dijalankan untuk meningkatkan pertahanan dari serangan balistik misil musuh
2015	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan <i>Aegis-equipped destroyer (DDG)</i> - Modernisasi kapabilitas <i>destroyer</i> dengan <i>Aegis System</i> - Pengembangan misil PAC-3 - Pengembangan misil 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan DDG yang disertai pembangunan 1 kapal dan pembelian sistem Aegis lainnya

¹⁵⁴Japan Ministry of Defense, "Japan Defense Budget 2017", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/

	interseptor SM-3 Block IIA yang lebih canggih dengan Amerika Serikat	
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan <i>Aegis-equipped destroyer</i> (DDG) - Modernisasi kapabilitas <i>Aegis-equipped destroyers</i> (2 destroyers) - Modernisasi misil PAC-3 - Pengembangan infrastruktur PAC-3 	
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi kapabilitas <i>Aegis-equipped destroyers</i> - Mengembangkan <i>ballistic missile interceptor</i> yang lebih canggih untuk diletakkan dalam BMD 	

Sumber diolah penulis dari *Ministry of Defense Japan*

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa Jepang selalu berusaha untuk melakukan pembangunan dan pengembangan BMD dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat. Pada periode tahun 2013-2017, Jepang banyak melakukan modernisasi kapabilitas BMD dengan mengembangkan dan modernisasi misil PAC-3 dan misil interseptor SM-3 BlockIIA. Dalam pengembangan BMD, Jepang juga melakukan pengembangan lainnya yang juga merupakan bagian dari BMD yaitu pengembangan sistem *air-to-surface-to-air* dan sistem *surface-to-surface*.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) mengembangkan *air-to-surface missile* jenis ASM-3 dengan jarak 200 km yang canggih untuk membendung pengaruh senjata baru China yaitu “*carrier killer*” *anti-ship missile*.¹⁵⁵ Berikut ini merupakan tabel kekuatan militer yang dimiliki Jepang:

Tabel 4. Kekuatan Militer Jepang

PERSONIL JSDF	
Kategori	Jumlah
Total Personil JSDF	310.457
Personil Aktif	247.157
Personil Cadangan	63.300
Total Populasi	126.451.398

KEKUATAN MSDF	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Aircraft Carrier</i>	4
<i>Destroyers</i>	36
<i>Corvettes</i>	6
<i>Submarines</i>	17
<i>Partol Craft</i>	6
<i>Mine Warfare Vessel</i>	25
<i>Total naval assets</i>	131

¹⁵⁵ loc.cit

KEKUATAN ASDF	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Fighter aircraft</i>	290
<i>Attack aircraft</i>	290
<i>Transport aircraft</i>	486
<i>Trainer aircraft</i>	404
<i>Attack helicopter</i>	84
<i>Helicopter strength (total)</i>	622
<i>Aircraft strength</i>	1.508

KEKUATAN GSDF	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Combat tank</i>	679
<i>Armored Fighting Vehicle</i>	3.178
<i>Self-propelled artillery</i>	202
<i>Towe artillery</i>	500
<i>Rocket projectors</i>	99

Sumber diolah penulis dari *Global Fire Power*

b. China

Selain Jepang, China juga merupakan negara *great power* di Asia Timur yang seringkali dikenal sebagai negara yang agresif dalam melakukan pengembangan kekuatan militer. China dalam hal ini merupakan negara yang kuat baik dari segi politik, ekonomi, dan militer. Pada aspek militer China, hal yang seringkali menjadi *concern* tidak hanya negara-negara Asia Timur melainkan dunia adalah China selalu berusaha melakukan peningkatan kapabilitas militer maupun melakukan modernisasi militer.

Sebagai bagian dari agenda militer China, modernisasi dilakukan dengan mengembangkan teknologi yang canggih yaitu BMD dan misil. Selain itu, menurut data Kementerian Pertahanan Jepang, China meningkatkan Armada Penjaga Pantai (*Coast Guard Patrol*) yang terdiri dari tiga kapal perang yang awalnya dapat memuat 1000 sampai 3000 ton barang ditingkatkan menjadi 10.000 ton. Peningkatan tersebut

juga disertai dengan modernisasi kapal perang China menjadi lebih canggih. Terhitung terdapat banyak kapal perang armada penjaga pantai China dengan muatan 10.000 ton barang.¹⁵⁶ Selain itu, China juga meningkatkan kemampuan intelejennya untuk memata-matai aktivitas negara lain yang berada di daerah Laut China Timur.¹⁵⁷

Dapat pula diketahui bahwa PLA China melakukan *deployment* atau meletakkan *Short-Range Ballistic Missiles* (SRBM) disertai dengan modernisasi SRBM yang memiliki daya jangkau sejauh 1000-1200 km.¹⁵⁸ China juga meluncurkan kapal perang berjenis korvet dengan tipe *Jiangdao Class Type 056* yang dilakukan oleh *People Liberation Army Navy* (PLAN) dan menambah 60 kapal perang berjenis *Houbei Class*.¹⁵⁹ Peningkatan kapabilitas China dalam melindungi kepentingannya di Laut China Timur juga dilakukan dengan cara mendeklarasikan ADIZ China pada 23 November 2013.¹⁶⁰

Pada hari diumumkannya deklarasi ADIZ China, China kemudian mengirimkan dua armada udara dengan pesawat terbang berjenis Tu-154 dan Y-8. Dengan dideklarasikannya ADIZ, semua pesawat atau alat transportasi dari negara lain yang ingin melewati ataupun memasuki wilayah China harus mendapatkan izin dari China terlebih dahulu.¹⁶¹

¹⁵⁶ Ibid, hal 18

¹⁵⁷ Ibid

¹⁵⁸ Bert Chapman, "The East Asia Sea in DOD China Military Power Reports", The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 29, No. 1, Maret 2017, hal 73

¹⁵⁹ Ibid, hal 76

¹⁶⁰ Ibid

¹⁶¹ Bonnie S. Glaser, "China's Air Defense Identification Zone: Impact on Regional Security", Center for Strategic and International Studies (CSIS), 26 November 2016, diakses dari <https://www.csis.org/analysis/chinas-air-defense-identification-zone-impact-regional-security> pada 13 Januari 2018 pukul 23.45 WIB

Di wilayah ADIZ tersebut, China juga meningkatkan kapabilitas militer yang menghabiskan anggaran belanja militer sebanyak 9,5% yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas misil penghancur, misil jarak jauh dan jarak dekat, pesawat perang berteknologi tinggi, pesawat amfibi, ataupun *intermediate and medium-range conventional ballistic missile*.¹⁶² Menurut data dari Kementerian Jepang, setelah China mendeklarasikan ADIZ, China juga meletakkan pesawat tempur berjenis Su-27 *fightes* yang berdekatan dengan pesawat milik *Martime Self-Defense Forces* (MSDF) dan *Air Self-Defense Forces* (ASDF). Terdapat pula 4 bomber berjenis H-6 *bombers* dan pesawat a Y-8 *early warning aircraft* yang beroperasi di dekat pulau Okinawa dan Miyako.¹⁶³ Dari penjabaran diatas, dapat terlihat bahwa aspek militer China yang kuat diperoleh China karena China selalu berusaha untuk melakukan modernisasi maupun peningkatan kapabilitas militer.

¹⁶² Ibid, hal 76

¹⁶³ Ministry of Defense Japan, "China's Activities Surrounding Japan's Airspace", Annual Defense White Paper, 2016, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/ryouku/img/graph02b_eL.jpg pada 13 Januari 2018 pukul 01.15 WIB

Tabel 5. Kekuatan Militer China

Personil PLA	
Kategori	Jumlah
Total Personil PLA	2.693.000
Personil Aktif	2.183.000
Personil Cadangan	510.000
Total Populasi	1.379.302.771

Kekuatan Maritim	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Aircraft carrier</i>	1
<i>Destroyers</i>	29
<i>Frigates</i>	50
<i>Corvettes</i>	39
<i>Submarine</i>	73
<i>Mine Warfare Vessel</i>	29
<i>Patrol craft</i>	220
<i>Total naval assets</i>	714

Kekuatan Darat	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Combat tank</i>	7.716
<i>Armored Fighting Vehicle</i>	9.000
<i>Self-propelled artillery</i>	2.000
<i>Towe artillery</i>	6.246
<i>Rocket projectors</i>	2.050

Kekuatan Udara	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Fighter aircraft</i>	1.125
<i>Attack aircraft</i>	1.527
<i>Transport aircraft</i>	722
<i>Trainer aircraft</i>	353
<i>Attack helicopter</i>	281
<i>Helicopter strength (total)</i>	985
<i>Aircraft strength</i>	3.035

Sumber diolah penulis dari *Global Fire Power*

c. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara *middle power* yang eksistensinya di Asia Timur juga perlu diperhitungkan. Hal ini dikarenakan, Korea Selatan juga memiliki kekuatan militer yang canggih. Menurut data *International Institute for Strategic Studies* (IISS), Korea Selatan telah melakukan pembelian senjata untuk kekuatan militer yang lebih canggih, yaitu *misil penghancur* jenis F-15, pesawat tempur F-35, kapal selam, dan misil penghancur jenis *Sejong the Great-class*. Korea Selatan memiliki *The Joint Chiefs of Staff* (JCS) yang merupakan organisasi militer yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan memperkuat aspek pasukan militer Korea Selatan dengan menyatukan kekuatan tentara Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU).¹⁶⁴

Pada pasukan AD Korea Selatan memiliki tank-tank dengan jenis *K2 battle tank*, *K-21 infantry fighting vehicle*, dan helikopter serta pesawat tempur.¹⁶⁵ Pasukan AL Korea Selatan juga memiliki senjata penghancur, kapal fregat, kapal patroli, serta *Partol Killer Mediums* (PKMs). Untuk mengatasi ancaman maritim, Korea Selatan mengembangkan kapal selam generasi terbaru Korea Selatan berjenis *KSS-III*, mengembangkan *aegis-class destroyers* berjenis *KDDX destroyes*, serta pesawat patroli kemaritiman.¹⁶⁶ Sementara itu, pada pasukan AU Korea Selatan, Korea Selatan memiliki pesawat tempur generasi terbaru berjenis *F-X fighter* dan *Korean*

¹⁶⁴ Ministry of National Defense South Korea, "2016 Defense White Paper", diakses pada website resmi Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan hal 48 diakses dari http://www.mnd.go.kr/cop/pblictn/selectPublicationsUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&id=mndEN_031300000000, hal 14 pada 13 Januari 2018 pukul 02.05 WIB

¹⁶⁵ Ibid, hal 49

¹⁶⁶ Ibid, hal 50

indigenous fighters (KF-X).¹⁶⁷ Korea Selatan juga memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat dalam *Republic of Korea (ROK)-US alliance*. Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat tersebut dikembangkan untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara yang dikenal dengan operasi *counter-missiles* dengan nama *4D Operations (detect, disrupt, destroy, and defend)* untuk melawan ancaman Korea Utara.¹⁶⁸

Berdasarkan konsep *4D Operations* tersebut, Korea Selatan-Amerika Serikat memiliki rencana untuk mengimplemetasikan operasi 4D tersebut dalam lima aspek pertahanan termasuk proses *decision-making*, perencanaan, pengawasan, pelatihan militer, dan pengembangan kapabilitas militer.¹⁶⁹ Berdasarkan aliansi tersebut, Amerika Serikat juga meletakkan misil *Terminal High Altitude Area Defense System* (THAAD) di Korea Selatan. Sistem THAAD tersebut memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal misil Korea Utara dalam jangkauan lebih dari 40km.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Ibid, hal 51

¹⁶⁸ Ibid

¹⁶⁹ Ibid, hal 68

¹⁷⁰ Ibid, hal 73

Tabel 6. Kekuatan Militer Korea Selatan

PERSONIL <i>The Republic of Korea Army (ROKA)</i>	
Kategori	Jumlah
Total Personil	5.827.250
Personil Aktif	625.000
Personil Cadangan	5.202.520
Total Populasi	51.181.299

Kekuatan Maritim ROKA	
Jenis Alutsista	Jumlah
<i>Aircraft</i>	1
<i>Carrier</i>	
<i>Destroyers</i>	12
<i>Corvettes</i>	14
<i>Submarines</i>	16
<i>Partol Craft</i>	69
<i>Mine Warfare Vessel</i>	11
<i>Total naval assets</i>	166

Kekuatan Udara ROKA	
Kategori	Jumlah
<i>Fighter aircraft</i>	406
<i>Attack aircraft</i>	466
<i>Transport aircraft</i>	382
<i>Trainer aircraft</i>	276
<i>Attack helicopter</i>	112
<i>Helicopter strength (total)</i>	748
<i>Aircraft strength</i>	1.560

Kekuatan Darat ROKA	
Kategori	Jumlah
<i>Combat tank</i>	2.654
<i>Armored Fighting Vehicle</i>	3.480
<i>Self-propelled artillery</i>	1.890
<i>Towed artillery</i>	3.854
<i>Rocket projectors</i>	214

Sumber diolah penulis dari *Global Fire Power*

d. Korea Utara

Seperti Korea Selatan, Korea Utara juga merupakan negara *middle power* yang eksistensinya sangat diperhitungkan. Seperti yang diketahui, Korea Utara merupakan salah satu negara yang memiliki kapabilitas nuklir dan seringkali melakukan pengembangan dan uji coba nuklir. Beberapa ahli memprediksi bahwa Pyongyang memiliki 15 sampai 20 senjata nuklir. Sedangkan badan intelejen Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara memiliki sekitar 30 sampai 60 senjata nuklir.¹⁷¹ Menurut keterangan Korea Utara sendiri, Korea Utara mengatakan bahwa Korea Utara melakukan peningkatan kapabilitas militer yang berupa senjata nuklir baru berjenis Hwasong-15 ICBM yang memiliki daya jangkau sampai 4.475 km yang mampu menjangkau laut Jepang.¹⁷² Para peneliti bahkan memperkirakan bahwa Hwasong-15 Korea Utara memiliki potensi daya jangkau hingga 13.000 km yang jika ditembakkan, nuklir tersebut akan mampu menjangkau Amerika Serikat.¹⁷³

Untuk kepemilikan senjata nuklir itu sendiri, Korea Utara diketahui memiliki berbagai jenis misil mulai dari misil berdaya jangkau dekat (*short-range ballistic missile*) berjenis KN-02, Hwasong-5, Hwasong-6, Hwasong-7, ER Scud MaRV yang memiliki daya jangkauan 100 km- 1.000 km. Selanjutnya, Korea Utara juga memiliki kapal selam yang mampu meluncurkan misil (*submarine launched ballistic missile*) jenis KN-11 dengan daya jangkau 1.000-1.200 km. Kepemilikan misil balistik dengan daya jangkau sedang (*medium-range ballistic missile*) berjenis KN-15 dan No-Dong

¹⁷¹ Council on Foreign Relations, "North Korea Military Capabilities", Council on Foreign Relation Official Websites, 03 Januari 2018, diakses dari <https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities> pada 14 Januari 2018 pukul 20.30 WIB

¹⁷² Ibid

¹⁷³ Ibid

dengan daya jangkauan 1.200-2.000 km dan 1.200-1.500 km juga dimiliki oleh Korea Utara.¹⁷⁴

Selain itu, Korea Utara juga memiliki senjata nuklir berjenis *intermediate-range ballistic missile* dengan tipe musudan yang memiliki daya jangkau 2.500-4.000 km serta KN-17 yang memiliki daya jangkau 4.500 km. Senjata nuklir yang tidak kalah hebat juga dimiliki oleh Korea Utara yaitu ICBMs dimana kepemilikan ICBMs oleh Korea Utara menuai kecaman dari negara-negara lain karena daya jangkau yang jauh dimiliki oleh senjata ICBMs. Korea Utara itu sendiri memiliki beberapa jenis ICBMs, yaitu, KN-08 dengan daya jangkau 5.500-11.500 km, KN-14 dengan daya jangkau 8.000-11.000 km, Hwasong-14 dengan daya jangkau 10.400 km, Hwasong-15 dengan daya jangkau 13.000 km.¹⁷⁵ Hal yang tak kalah kontroversial adalah kepemilikan nuklir ICBMs yang disertai dengan alat peluncur nuklir berjenis Unha-3 dengan daya jangkauan lebih dari 10.000 km.¹⁷⁶

Menurut data *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), berdasarkan kepemilikan jumlah plutonium, Korea Utara melakukan peningkatan kapabilitas senjata nuklir dari yang semula berjumlah 6 menjadi 8 pada tahun 2014.¹⁷⁷ Korea Utara dinilai berhasil melakukan peningkatan kapabilitas nuklirnya ketika Korea Utara berhasil memiliki hulu ledak yang nantinya diletakkan pada misil balistik kemudian hulu ledak tersebut diluncurkan bersamaan dengan misil balistik.¹⁷⁸

¹⁷⁴ Ibid

¹⁷⁵ Ibid

¹⁷⁶ Ibid

¹⁷⁷ Hirofumi Tosaki, "The North Korean Nuclear Issues and Japan's Deterrence Posture", The Japan Institute of International Affairs, hal 3

¹⁷⁸ Ibid

Juru Bicara Korea Utara mengatakan bahwa Korea Utara sempat memberhentikan pengembangan nuklir karena terikat dengan negosiasi denuklirisasi. Namun, Korea Utara mampu bangkit kembali dengan memproduksi nuklir yang lebih kecil namun memiliki kekuatan yang besar. Hal tersebut dapat terlihat dari kepemilikan *Medium-Range Ballistic Missile* (MRBM) Jenis Nodong yang mampu menyerang sampai teritori Jepang.¹⁷⁹

Tabel 7. Kekuatan Militer Korea Utara

Personil <i>Korean People's Army</i> (KPA)		Kekuatan Maritim KPA	
Kategori	Jumlah	Kategori	Jumlah
Total Personil KPA	6.445.000	<i>Aircraft Carrier</i>	0
Personil Aktif	945.000	<i>Destroyers</i>	0
Personil Cadangan	5.500.000	<i>Corvettes</i>	2
Total Populasi	25.248.140	<i>Submarines</i>	86
		<i>Patrol Craft</i>	238
		<i>Mine Warfare Vessel</i>	25
		<i>Total naval assets</i>	967

¹⁷⁹ Ibid

Kekuatan Udara KPA	
Kategori	Jumlah
<i>Fighter aircraft</i>	458
<i>Attack aircraft</i>	516
<i>Transport aircraft</i>	119
<i>Trainer aircraft</i>	169
<i>Attack helicopter</i>	20
<i>Helicopter strength (total)</i>	202
<i>Aircraft strength</i>	944

Kekuatan Darat KPA	
Kategori	Jumlah
<i>Combat tank</i>	5.243
<i>Armored Fighting Vehicle</i>	9.935
<i>Self-propelled artillery</i>	2.250
<i>Towed artillery</i>	4.300
<i>Rocket projectors</i>	5.000

Sumber diolah penulis dari *Global Fire Power*

Dari penjabaran diatas, dapat terlihat bahwa polaritas yang terbentuk di Asia Timur adalah multipolar dimana kekuatan terpusat pada banyak negara dalam kawasan yaitu China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sebagai aktor eksternal yang juga ikut menambah dinamika kompleksitas keamanan kawasan.

1.5 *Social Construction* Kawasan Asia Timur

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, variabel dalam *social construction* menekankan kepada dua hal yaitu *power relation* dan pola *amity-enmity* negara dalam kawasan yang terbentuk berdasarkan faktor historis. *Power relation* tersebut merupakan interaksi yang terbentuk antar aktor negara dalam kawasan yang dapat

membentuk pola *amity* maupun *enmity*.¹⁸⁰ Pola hubungan negara dengan negara lain dalam kawasan itu sendiri tidak selamanya berbentuk *amity* maupun *enmity*.

Hal ini dikarenakan, meskipun sebuah negara berada dalam kondisi *amity* dengan negara lain, negara tersebut juga masih bisa membentuk pola *enmity* dalam interaksinya. Begitupula sebaliknya, meskipun sebuah negara terlihat sedang menjalin pola *amity* dengan negara lain, negara juga masih bisa membentuk hubungan *enmity*. Untuk mengkategorikan sebuah negara berada dalam pola *amity* atau *enmity*, hal yang perlu dilihat adalah pola hubungan mana yang paling mendominasi negara.

1.5.1 Pola *Amity*

a. China dan Korea Utara

China dan Korea Utara telah bersekutu sejak Perang Korea terjadi pada saat Perang Dunia II. Hal ini dikarenakan, pada masa Perang Dunia II, China dan Korea Utara memiliki musuh bersama yaitu Jepang. Invansi Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910 sampai 1945 dan China pada tahun 1931 sampai 1945 membuat China dan Korea Utara menjadi sekutu dekat karena kedua negara tersebut berjuang bersama untuk melawan invasi Jepang.¹⁸¹

Sejak saat itu, China sering mengirimkan bantuan untuk Korea Utara. Pada Perang Korea, China mengirimkan 2,97 juta pasukan untuk berperang melawan pasukan PBB dan 600.000 pasukan sipil untuk mendukung Korea Utara melawan Korea Selatan. Pada tahun 1961, China dan Korea Utara

¹⁸⁰Barry Buzan dan Ole Waever, "*Region and Powers: The Structure of International Security*", Cambridge University Press 2003, hal 49

¹⁸¹Colonel Russel Maddalena, "*Why Does The People's Republic of China Continue to Support the Democratic People's Republic Korea?*", The Centre for Defense and Strategic Studies (CDSS), Commonwealth of Australia, 2014, hal 3

menandatangani perjanjian persahabatan yang dikenal dengan “*Sino-North Korean Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*”¹⁸² Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa China dan Korea Utara harus saling membantu satu sama lain jika salah satu negara diserang oleh musuh.¹⁸³

Melalui perjanjian tersebut, hubungan China dan Korea Utara semakin dekat. Hingga saat ini, China dikenal sebagai negara sekutu terdekat Korea Utara yang merupakan penyumbang bantuan kemanusiaan seperti makanan, minyak, dan teknologi industri terbesar untuk Korea Utara.¹⁸⁴ Meskipun China dan Korea Utara dikenal sebagai aliansi dekat di Asia Timur, *Treaty of Friendship* antara China dan Korea Utara dinilai oleh China terlalu memberatkan China. Perjanjian tersebut terlihat lebih menguntungkan Korea Utara daripada China. Selama dua dekade, China menjadi aliansi Korea Utara yang paling menguntungkan. Hal ini dikarenakan, China menjadi negara yang *memback-up* Korea Utara baik dalam aspek diplomatik, ekonomi, maupun militer.¹⁸⁵

China, yang dikenal sebagai negara dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, mendukung dan senantiasa memberikan Korea Utara bantuan ekonomi untuk menopang kebutuhan ekonomi Korea Utara. Namun, hal yang dilakukan Korea Utara tidak sebanding dengan yang

¹⁸²Ibid

¹⁸³Ibid

¹⁸⁴Dick K. Nanto, Mark E. Manyin, “*China-North Korea Relations*”, Congressional Research Service, 28 Desember 2010, hal 3

¹⁸⁵Ibid, hal 11

dilakukan oleh China.¹⁸⁶ Sehingga, hubungan yang terbentuk adalah dependensi Korea Utara terhadap China. Padahal seharusnya, hubungan yang terbentuk antar kedua negara adalah interdependensi. Sampai saat ini, krisis nuklir Korea Utara juga merupakan ancaman terbesar bagi China. China merasa bahwa nuklir Korea Utara dapat membahayakan posisi China di kawasan. Sehingga, China seringkali bergabung dengan negara-negara lain untuk melakukan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara. Namun, berbagai negosiasi tersebut gagal dilakukan.

China berusaha untuk menciptakan kondisi yang damai dan stabil di kawasan Asia Timur untuk melancarkan pembangunan ekonomi China. China merasa bahwa ketidakstabilan kawasan akibat Korea Utara dapat menimbulkan masalah sosial yang juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi China yaitu terjadinya gelombang pengungsi Korea Utara ke perbatasan China dan hal tersebut akan membuat kondisi sosial maupun ekonomi China menjadi tidak stabil dan memicu terjadinya konflik.¹⁸⁷

Oleh karena itu, China mendukung penuh aksi PBB untuk memberikan sanksi DK PBB 1718 yaitu embargo ekonomi kepada Korea Utara.¹⁸⁸ Pada tahun 2013, China juga menyetujui resolusi 2094 PBB yang memberikan hukuman berat pada Korea Utara jika Korea Utara masih tetap melakukan

¹⁸⁶ Ibid, hal 13

¹⁸⁷ Matt Chitwood, *Allies at Odds: The North Korea Factor in China's Foreign Policy Strategy*, US-Korea Institute, John Hopkins University, 2012, hal 32

¹⁸⁸ Rajaram Panda, *North Korea's Nuclear Issues: Security Implication for Asia*, The Institute Defence Studies and Analysis, Vol. 4 No. 2, April 2010, hal 101

pengembangan dan uji coba nuklir.¹⁸⁹ Dapat terlihat bahwa, pola hubungan China dan Korea Utara terlihat sangat dekat pada masa Perang Dunia II hingga Perang Dingin. Sementara itu, pada era tahun 2000an, hubungan China dan Korea Utara tidak lagi sepenuhnya berbentuk *amity*. Hal ini dikarenakan, China dan Korea Utara berulang kali bersitegang akibat kasus nuklir Korea Utara. Hingga pada puncaknya, China menyetujui resolusi DK PBB 2094 mengenai sanksi embargo bagi Korea Utara.

1.5.2 Pola *Enmity*

a. China dan Jepang

China dan Jepang memiliki sejarah kelam Perang Dunia II saat Jepang menginvasi China dan sejarah tersebut masih membekas pada warga negara China sampai saat ini. Meskipun memiliki pengalaman historis yang kelam, China dan Jepang merupakan *partner* dagang yang saling membutuhkan. Pada tahun 1972, China dan Jepang melakukan normalisasi untuk memperbaiki hubungan. Pada tahun 2006, China dan Jepang dinobatkan sebagai *partner* dagang terbesar di dunia. Hubungan interdependensi ekonomi dan

¹⁸⁹Mathieu Duchatel, "China's Policy in the East China Sea: The Role of Crisis Management Mechanism Negotiations with Japan (2008-2015)", Centre d'etude Francais la Chine Contemporaine, 2016

perdagangan China Jepang tidak lantas membuat hubungan kedua negara terus membentuk pola persahabatan.¹⁹⁰

Hal ini dikarenakan, China dan Jepang merupakan dua *great power* yang saling bersaing satu sama lain untuk menyebarkan pengaruhnya di kawasan. China dalam hal ini tidak menyetujui usaha Jepang untuk membentuk “*normal state*” dimana *normal state* merupakan negara yang bebas melakukan pengembangan aspek militer tanpa adanya larangan. China melihat bahwa Jepang harus tetap mematuhi konstitusi pasifis agar Jepang tidak lagi menjadi negara yang ekspansionis.¹⁹¹

Ketika Jepang kembali lagi menjadi negara yang ekspansionis, hal tersebut akan membahayakan posisi China di kawasan karena Jepang telah bangkit dari kekangan yang selama ini menahan Jepang untuk memperkuat aspek militer negaranya. Disisi lain, Jepang juga menilai China sebagai negara agresif dengan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat yang nantinya mampu menjadi *global superpower*.¹⁹² Dalam hubungan ekonomi, China dan Jepang merupakan *partner* yang saling membutuhkan.

Namun, dilihat dari hubungan politik, China dan Jepang seringkali bersitegang. China juga melihat Jepang sebagai rival utama dalam kawasan, ditambah lagi, Jepang juga merupakan aliansi militer terbesar Amerika Serikat

¹⁹⁰Willem Van Kemenade, “*China and Japan: Partner or Permanent Rivals?*”, The Netherland Institute of International Relation Clingendael, Clingendael Diplomacy Paper no. 9, November 2006, hal 7

¹⁹¹Ibid

¹⁹²Ibid

yang juga memiliki hubungan politik yang kurang baik dengan China.¹⁹³ Hubungan politik China dan Jepang semakin diperburuk ketika China dan Jepang kembali memperebutkan pulau Senkaku/Diaoyu.

Sengketa pulau Senkaku/Diaoyu kembali memanas pada tahun 2010 dimana China memerintahkan pasukan militernya ke daerah sengketa yang menyebabkan bentrok dengan pasukan JSDF.¹⁹⁴ Ketegangan politik antara China dan Jepang juga dapat terlihat dari kasus deklarasi ADIZ China di laut China Timur dimana China secara sepihak mengklaim bahwa pulau Senkaku/Diaoyu merupakan milik China.¹⁹⁵

b. Jepang dan Korea Selatan

Jepang dan Korea Selatan memiliki hubungan yang buruk sejak Perang Dunia II saat invasi Jepang ke Korea Selatan. Invasi Jepang ke Korea Selatan memberikan trauma besar terhadap Korea Selatan yang menyebabkan buruknya hubungan diplomatik kedua negara. Menurut data penelitian *Han Koo Kilbo-Korean Newspaper Publishing Company* dan *Yomiuri-Japanese Newspaper Publishing Company* pada tahun 2006, hubungan buruk antara Jepang dan Korea Selatan didasari oleh 88% sengketa wilayah

¹⁹³Ibid

¹⁹⁴Ming Wang, "Understanding Japan-China Relations: Theories and Issues", Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2016, hal 8

¹⁹⁵Ibid

Takeshima/Dokdo, 42,8% masalah Yasukuni-Shrine, masalah *textbook* sejarah Jepang sebanyak 32,5%.¹⁹⁶

Setelah melakukan normalisasi hubungan tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan berusaha menormalisasi hubungan dengan melakukan hubungan ekonomi dan perdagangan. Namun, meskipun Jepang dan Korea Selatan melakukan hubungan perdagangan, tidak dapat dipastikan dan dinyatakan bahwa Jepang dan Korea Selatan telah menormalisasi hubungan dengan baik. Hal ini terlihat dari hubungan kedua negara yang masih dinilai buruk.¹⁹⁷

Buruknya hubungan Jepang dan Korea Selatan hingga sampai saat ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Pola hubungan kedua negara tersebut telah membentuk pola hubungan *enmity* sejak lama. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya rekonsiliasi yang tepat dan menyelesaikan masalah antara Jepang dan Korea Selatan sampai tuntas.¹⁹⁸ Hubungan buruk tersebut terus terjadi karena sengketa wilayah Takeshima/Dokdo yang tidak terselesaikan dengan baik dan menimbulkan adanya aksi embargo terhadap produk Jepang oleh warga negara Korea Selatan.¹⁹⁹

Menurut perspektif Korea Selatan, hubungan Korea Selatan dan Jepang cenderung membentuk pola *enmity* sampai saat ini karena, Korea Selatan menilai bahwa Jepang enggan untuk meminta maaf atas dosa masa lalu Jepang pada Perang Dunia II. Invasi Jepang ke Korea Selatan pada Perang Dunia II

¹⁹⁶Choi Eun-Mi, "Memory Politics and International Relations in East Asia: Focusing on "Past Problem" between South Korea and Japan", *International Area Review*, Volume 3 No. 2, Juni 2010, hal 64

¹⁹⁷Ibid

¹⁹⁸Ibid

¹⁹⁹Ibid

sampai saat ini masih menjadi isu sensitif bagi Korea Selatan. Terlebih lagi isu *comfort women*.²⁰⁰

Comfort women merupakan isu dimana pada masa invasi Jepang pada Perang Dunia II, warga negara Korea Selatan yang merupakan wanita dan anak-anak dipaksa untuk menjadi budak seks Jepang. Diperkirakan terdapat 200.000 wanita yang dipekerjakan sebagai budak seks tentara Jepang selama Perang Dunia II. Sebagian dari mereka merupakan warga negara Korea Selatan, sisanya merupakan warga negara China, Filipina, Taiwan, dan Indonesia.²⁰¹

Menurut perspektif Jepang, isu *comfort women* sebagai tuduhan yang berlebihan. Terlebih lagi, isu *comfort women* menggunakan istilah “sex slaves” dan “sexual slavery” yang digunakan oleh Media Barat untuk melebih-lebihkan kasus tersebut. Beberapa veteran Jepang mengatakan bahwa *comfort women* merupakan prostitusi profesional.²⁰² Pihak veteran Jepang juga mengatakan bahwa jumlah 200.000 *comfort women* yang diberitakan oleh beberapa media adalah jumlah yang melebih-lebihkan.²⁰³

Menurut pandangan veteran Jepang, jumlah *comfort women* itu sendiri tidak dapat dipastikan berapa jumlahnya. Profesor Yoshimi dari Universitas Chuo di Tokyo, memperkirakan bahwa terdapat sejumlah 50.000

²⁰⁰Ibid, hal 65

²⁰¹BBC News, “Japan and South Korea Agree WW2 ‘Comfort Women’ Deal”, BBC News, 28 Desember 2015, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-35188135> pada 26 Desember 2017 pukul 23.30 WIB

²⁰²Reiji Yoshida, “Comfort Women Issue Refuse to Go Away: Nationalist using Asahi Errors as Ammo Against 1993 Apology”, The Japan Times, 27 Oktober 2010, diakses dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/27/reference/comfort-women-issue-refuses-go-away/#.WkYmVreWbIV> pada 26 Desember 2017 pukul 23.45 WIB

²⁰³Ibid

comfortwomen.²⁰⁴ Pernyataan tersebut membuat Korea Selatan marah dan kembali membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Pada akhirnya, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan permintaan maaf kepada Korea Selatan. Shinzo Abe juga secara langsung meminta maaf kepada korban *comfort women*. Pihak Jepang telah mendonasikan 1 juta yen untuk diberikan kepada korban *comfort women* yang masih hidup.²⁰⁵

Meskipun Jepang telah berkali-kali meminta maaf atas dosa masa lalunya, Korea Selatan tetap menganggap isu *comfort women* sebagai isu sensitif yang menjadi hambatan kedua negara untuk memperbaiki hubungan diplomatik. Hal ini dapat terlihat dari aksi Korea Selatan yang secara tiba-tiba sempat menggagalkan penandatanganan *General Security of Military Information* (GSOMIA). GSOMIA merupakan perjanjian keamanan antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang dibuat untuk saling berbagi informasi mengenai nuklir Korea Utara. Korea Selatan merasa perlu untuk menandatangani perjanjian tersebut karena Korea Selatan membutuhkan kemampuan intelejen militer Jepang untuk memata-matai aktivitas nuklir Korea Utara.²⁰⁶

Penandatanganan perjanjian tersebut sempat gagal dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat Korea Selatan jika Korea Selatan harus melakukan kerjasama dengan Jepang. Hal tersebut terjadi akibat trauma masa

²⁰⁴Ibid

²⁰⁵Emma Chanlett-Avery, "The 2015 Comfort Women Agreement: A Precursor to a Stronger Japan-ROK Partnership?" dalam buku "Pivotal Issues in Korea-Japan-US Relation: Perspective From Emerging Leaders", Washington DC: The Maureen and Mike Mansfield Foundation, 2017, hal 9

²⁰⁶Seongho Sheen and Jina Kim, "What Went Wrong With the ROK-Japan Military Pact?", Asia Pasific Buletin Number 176, 31 Juli 2012, hal 1

lalu pada kasus invasi Jepang ke Korea Selatan serta isu *comfort women* yang masih sensitif.²⁰⁷ Namun, Korea Selatan menyadari bahwa perjanjian GSOMIA dengan Jepang dan Amerika Serikat akan menguntungkan bagi Korea Selatan karena adanya ancaman dari Korea Utara yang mengharuskan Korea Selatan untuk melanjutkan penandatanganan GSOMIA. Sehingga, pada tanggal 23 November 2016, Korea Selatan menandatangani perjanjian GSOMIA meskipun mendapatkan kritikan dan penolakan besar-besaran dari warga Korea Selatan.²⁰⁸

c. Jepang dan Korea Utara

Hubungan Jepang dan Korea Utara telah membentuk pola hubungan *enmity* sejak Perang Dunia II. Hal tersebut juga dikarenakan invasi Jepang pada semenanjung Korea pada era Perang Dunia II. Hubungan Jepang dan Korea Utara semakin memburuk ketika terdapat isu penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara dan krisis nuklir Korea Utara yang menimbulkan ancaman bagi Jepang. Selama tahun 1970an-1980an, Korea Utara melakukan penculikan terhadap warga negara Jepang. Peristiwa penculikan yang sempat tidak diakui oleh Korea Utara tersebut terus berlangsung hingga tahun 2002.²⁰⁹

Pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan bahwa Korea utara telah

²⁰⁷ Ibid

²⁰⁸ Gil Yun-Hyung, "After Signing GSOMIA, Japan Eyeing Bigger Military Cooperation with South Korea", South Korea Daily Newspaper: The Hakyoreh, 25 November 2016, diakses dari http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/771985.html pada 26 Desember 2017 pukul 01.15 WIB

²⁰⁹ Rachel Blomquist and Daniel Wertz, "An Overview of North Korea-Japan Relations", The National Committee on North Korea (NCNK), Juni 2015 hal 4

melakukan 17 kasus penculikan terhadap warga negara Jepang yang dilakukan oleh agen Korea Utara. Sejak peristiwa penculikan tersebut, hubungan Korea Utara dan Jepang selalu tidak harmonis dan diwarnai dengan kecurigaan serta ketidakpercayaan.²¹⁰

Pada 17 September 2002, untuk pertama kalinya Korea Utara mengakui bahwa kasus penculikan warga negara Jepang tersebut memang dilakukan oleh Korea Utara. Pengakuan Korea Utara tersebut juga disusul dengan permintaan maaf Korea Utara. Penculikan warga negara Jepang tersebut belum diketahui motif pastinya. Namun, banyak korban penculikan oleh Korea Utara. Sebagian dari mereka meninggal dan sebagian lagi berhasil diselamatkan.²¹¹

Hal lain yang membuat hubungan Jepang dan Korea Utara semakin memburuk adalah pengembangan nuklir yang disertai uji coba nuklir Korea Utara. Pengembangan nuklir Korea Utara membuat posisi Jepang di kawasan menjadi terancam. Hubungan Jepang dan Korea Utara pernah membaik ketika Amerika Serikat dan Korea Utara berhasil menandatangani *Agreed Framework* yang dilakukan untuk denuklirisasi Korea Utara pada tahun 1994. Pasca ditandatanganinya *Agreed Framework*, Jepang setuju untuk membantu keuangan *Korean Peninsula Energy Development Organization* (KEDO).

²¹⁰Ibid

²¹¹Official Website of Japanese Ministry of Defense, "Abduction of Japanese Citizen by North Korea", 2012, diakses dari http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/abduction/pdfs/abductions_en.pdf pada 26 Desember 2017 pukul 01.30 WIB

Jepang juga mendonasikan sebanyak 500.000 ton makanan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Korea Utara pada tahun 1995-1996.²¹²

Berkat bantuan tersebut, beberapa warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara dipulangkan kembali ke Jepang. Namun, hubungan Jepang dan Korea Utara kembali memburuk ketika Korea Utara melanggar *Agreed Framework* dan meluncurkan misil Taepodong-1 pada Agustus 1998 yang mencapai teritori Jepang tanpa adanya peringatan. Pasca peluncuran nuklir tersebut, Jepang menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara dengan membekukan bantuan yang diberikan pada KEDO.²¹³

Hubungan Jepang dan Korea Utara yang semakin memburuk akibat dari peluncuran misil Korea Utara yang sampai pada laut Jepang membuat Jepang dan aliansinya mengajak Korea Utara untuk melakukan negosiasi agar Korea Utara bersedia untuk melakukan denuklirisasi. Jepang berjanji untuk mengirimkan 50.000 ton reaktor nuklir air ringan.²¹⁴ Namun, pada tahun 2009, Korea Utara kembali berulah dengan meluncurkan nuklir berjenis roket Unha 2 yang diketahui merupakan modifikasi terbaru dari versi misil balistik jarak jauh yaitu Taepodong 2.²¹⁵

Uji coba nuklir Korea Utara tersebut kembali menjangkau laut Jepang. Sehingga, Jepang memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi

²¹² Op.cit, hal 3

²¹³ Ibid

²¹⁴ Sangtu Ko, "Six Party Talks", Yonsei University, Seoul, South Korea, Potical Studies Association, diakses dari <https://www.psa.ac.uk/conference/2014-conference/intelligence-security-and-ir-theory>

²¹⁵ Arms Control Association, "Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy", updated July 2017, hal 22 diakses dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron> pada 26 Desember 2017 pukul 02.00 WIB

bersama dengan DK PBB kepada Korea Utara. Sejak peristiwa itu pula, Korea Utara keluar dari negosiasi denuklirisasi dan tidak lagi bersedia untuk terlibat dalam negosiasi denuklirisasi manapun.²¹⁶ Pada tahun 2012, Jepang melakukan *deployment Patriot Advanced Capability-3 Missile* di Tokyo dan Okinawa yang berlokasi di daerah Utara dan Barat dekat semenanjung Korea. Penempatan misil di daerah tersebut dilakukan untuk melindungi kedaulatan Jepang dari Korea Utara.²¹⁷

Hubungan Korea Utara dan Jepang diketahui terus memburuk karena adanya krisis nuklir Korea Utara disertai dengan uji coba nuklir Korea Utara yang berkali-kali dapat dan sengaja diarahkan ke laut Jepang. Hubungan Jepang dan Korea Utara juga terus mengalami ketegangan akibat adanya trauma masa lalu invasi Jepang di semenanjung Korea serta kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara.

d. Korea Selatan dan Korea Utara

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara sudah memburuk sejak terjadinya perang Korea pada tahun 1950-1953. Perang Korea yang terjadi antara penduduk Korea Selatan dan Korea Utara terjadi tidak terlepas dari faktor historis kolonialisme Jepang. Dibawah kolonialisme Jepang pada tahun 1910-1945, pemerintah Jepang mengimplementasikan kebijakan “*divide and*

²¹⁶Ibid

²¹⁷Julian Ryall, “*Japan Poised to Shoot Down North Korean Missile*”, The Telegraph, 07 Desember 2012, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9728806/Japan-poised-to-shoot-down-North-Korean-missile.html> pada 27 Desember 2017 pukul 23.15 WIB

rule” yang membagi semenanjung Korea menjadi terpisah menurut karakteristik geografis untuk memanfaatkan sumber daya alam semenanjung Korea lebih efektif.²¹⁸

Di daerah Utara kaya akan sumber daya mineral dan keuntungan geografis yang akan cocok jika dipergunakan untuk industri berat. Sementara itu, di daerah utara terkonsentrasi untuk industri ringan dan produksi beras. Kedua daerah tersebut terpisah dengan ideologi yang berbeda. Daerah Utara menganut ideologi komunis, sedangkan daerah Selatan menganut ideologi liberal. Perbedaan ini terjadi karena, komunisme meningkat dengan sangat pesat di daerah Utara dan ideologi liberal lebih diterima di daerah Selatan.²¹⁹

Akhir Perang Dunia II, Korea dibebaskan dari kolonialisme dan diokupasi oleh dua *superpower* utama pada era Perang Dingin. Amerika Serikat mengokupasi wilayah Korea Selatan dan Uni Soviet mengokupasi wilayah Korea Utara.²²⁰ Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara semakin memburuk ketika diketahui Korea Utara melakukan pengembangan nuklir serta uji coba nuklir. Korea Utara juga berkali-kali menggagalkan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Selatan dan aliansinya. Bagi Korea Selatan, nuklir Korea Utara merupakan ancaman terbesar Korea Selatan dalam kawasan. Hal ini dikarenakan, posisi geografis Korea Utara sangat dekat dengan Korea

²¹⁸Bruce Cumings, *“Overview: The Korean War and Its Legacy”*, Feeman Spogli Institute for International Studies, Fall, 2010, hal 1

²¹⁹Ibid

²²⁰Ibid

Selatan. Sehingga, kepemilikan nuklir Korea Utara dapat kapan saja mengancam posisi Korea Selatan.²²¹

Peristiwa lain yang membuat hubungan Korea Selatan dan Korea Utara semakin tegang adalah ketika pada 26 Maret 2010, kapal milik Korea Selatan, Cheonan yang memuat 1200 ton korvet milik angkatan laut Korea Selatan. Kapal tersebut tenggelam di perairan dekat wilayah Baegnyeong, pulau Korea Selatan yang dekat dengan wilayah Korea Utara yang disebabkan oleh torpedo dari Korea Utara. Tenggelamnya kapal mengakibatkan kematian 46 nelayan dan 104 awak kapal.²²²

Dalam hal ini, persoalan nuklir Korea Utara menjadi hal yang penting bagi Korea Selatan. Hal ini dikarenakan, nuklir Korea Utara membahayakan posisi Korea Selatan karena jarak geografis antar kedua negara berdekatan. Oleh karena itu, Korea Selatan melihat Korea Utara sebagai ancaman terbesar bagi Korea Selatan di Asia Timur. Sehingga, Korea Selatan berusaha untuk melakukan unifikasi maupun bergabung bersama negara-negara P5+1 untuk melakukan negosiasi denuklirisasi Korea Utara. Namun, hal tersebut gagal dilakukan sehingga Korea Selatan memilih untuk melakukan aliansi bersama Jepang dan Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Korea Utara di Asia Timur.²²³

²²¹Stefano Felician, "North and South Korea: A Frozen Conflict on the Verge of Unfreezing?", Istituto Affari Internazionali (IAI) Working Papers 11, 24 Agustus 2011, hal 2

²²²Ibid

²²³Weston S. Konishi, "Denuclearizing North Korea: Exploring Multilateral Approaches to Risk Reduction and Peace Regime Building", The Institute for Foreign Policy Analysis (IFPA), September 2011

BAB V
RESPON JEPANG TERHADAP KOMPLEKSITAS KEAMANAN
KAWASAN ASIA TIMUR MELALUI KEBIJAKAN PROACTIVE PACIFISM
TAHUN 2013-2017

Dalam membahas respon Jepang terhadap kompleksitas kawasan Asia Timur penulis menggunakan variabel *internal transformation* yang dapat dilihat sebagai perubahan internal yang terjadi pada suatu negara yang disebabkan oleh adanya kompleksitas keamanan kawasan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kebijakan, rezim kepemimpinan, struktur anarki akibat adanya interaksi regional, perubahan pada polaritas yang disebabkan oleh disintegrasi regional, penyatuan kawasan, dan lain-lain.²²⁴

5.1 *Internal Transformation* Jepang sebagai Respon Jepang Terhadap Kompleksitas Keamanan Kawasan Asia Timur

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Jepang memberikan respon terhadap kompleksitas keamanan kawasan dengan melakukan *internal transformation* yang dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan pertahanan dan keamanannya melalui kebijakan "*Proactive Pacifism*". Seperti yang diketahui, sejak Jepang kalah pada Perang Dunia II, Jepang tidak dapat melakukan peningkatan kapabilitas militernya secara maksimal. Sehingga, Jepang kemudian lebih berfokus melakukan pengembangan ekonomi daripada mengembangkan kemampuan militer. Namun,

²²⁴Barry Buzan dan Ole Waever, "*Region and Powers: The Structure of International Security*", Cambridge University Press 2003, hal 53

pasca Perang Dingin, kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur semakin konflikual dan membahayakan kedaulatan serta keamanan Jepang. Hal tersebut kemudian mendorong Jepang untuk melakukan *internal transformation* dengan

Donald H. Rumsfeld, Sekretaris *Departement of Defense* Amerika Serikat tahun 2003 mendefinisikan perubahan atau transformasi kebijakan pertahanan dan keamanan militer sebagai proses yang merubah aspek pertahanan dan militer suatu negara melalui kompetisi militer dan kerjasama militer melalui peningkatan kualitas, kapabilitas, dan *manpower* untuk melindungi kedaulatan negara serta mewujudkan stabilitas dan kedamaian dunia.²²⁵ Perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan menurut Rumsfeld tidak hanya berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer ataupun pengembangan peralatan teknologi militer baru, namun, transformasi pertahanan dan keamanan juga melihat kepada proses yang dilakukan negara untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan militer yang baik dengan aliansi.²²⁶

Peningkatan hubungan militer dengan aliansi dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengembangan teknologi baru yang akan memperkuat hubungan aliansi militer suatu negara untuk mengatasi ancaman bersama.²²⁷ Perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan itu sendiri juga dapat dilihat sebagai proses berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap dimana transformasi pertahanan dan

²²⁵Departement of Defense United States of America, "*Element of Defense Transformation*", Washington DC: Departement of Defense Office of Freedom of Information and Security Review, October 2004, hal 2

²²⁶Ibid

²²⁷Ibid

keamanan tersebut dilakukan untuk mengatasi ancaman yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.²²⁸ Terdapat elemen penting yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan dimana elemen tersebut menekankan kepada pentingnya melakukan perubahan dalam bidang teknologi, strategi, ataupun perubahan yang dilakukan dalam merespon ancaman bagi negara.²²⁹

Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang pasifis atau anti militerisme karena trauma kekalahan Perang Dunia II. Jepang dulunya dikenal sebagai negara yang ekspansionis dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Penyerahan diri Jepang pada tahun 1945 kepada sekutu memaksa Jepang untuk melakukan demiliterisasi. Berdasarkan konstitusi Jepang pasal 9 tahun 1947 tersebut, Jepang dilarang untuk memiliki kekuatan militer. Jepang hanya diperbolehkan untuk memiliki pasukan bela diri yaitu JSDF yang terdiri dari ASDF, MSDF, dan GSDF yang hanya boleh ditempatkan pada wilayah Jepang dan tidak diperbolehkan untuk ditempatkan di luar negeri.²³⁰

Merujuk pada konstitusi tersebut, aspek militer Jepang menjadi terbatas dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Jepang untuk memiliki kekuatan militer. Aspek militer Jepang lebih banyak dibantu oleh Amerika Serikat. Sehingga, untuk mengatasi ancaman keamanan, Jepang lebih banyak beraliansi dengan Amerika Serikat.²³¹ Pada periode pasca Perang Dingin, Jepang tidak lagi ingin selalu menggantungkan

²²⁸ Ibid

²²⁹ Ibid, hal 5

²³⁰ Ibid

²³¹ Adam P. Liff, "Japan's Defense Policy: Abe the Evolutionary", The Elliot School of International Affairs, The Washington Quarterly, Summer 2015, hal 80

keamanannya dengan Amerika Serikat. Meskipun Jepang juga berusaha untuk meningkatkan aliansi militernya dengan Amerika Serikat, Jepang juga terlihat berusaha untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Hal tersebut terlihat dari buku putih pertahanan Jepang yang memperlihatkan upaya dari Jepang untuk melakukan militerisasi demi melindungi teritori dan kedaulatan Jepang.²³²

Pada periode tahun 2013-2017 Jepang diketahui telah mengeluarkan buku putih pertahanannya sebanyak lima kali setiap tahun 2013-2017. Dalam buku putih pertahanannya, Jepang selalu menggambarkan bagaimana kondisi internasional terutama isu yang berkaitan dengan kompleksitas keamanan kawasan dan juga membahas isu lain diluar kawasan seperti isu terorisme, *cyber crime*, *maritime piracy*. Selain itu, Jepang juga menjelaskan bagaimana kompleksitas kawasan yang dikelilingi oleh negara-negara yang juga mengancam kedaulatan Jepang.²³³ Sehingga, dapat terlihat bahwa Jepang memiliki *concern* tersendiri mengenai isu-isu global dan kompleksitas keamanan kawasan yang mengancam posisi Jepang jika Jepang masih tetap mentaati keseluruhan isi konstitusi pasifisme.

Perbedaan buku putih pertahanan Jepang pada tahun 2013-2017 hanya terletak pada perkembangan isu ataupun perubahan global serta dinamika keamanan yang terjadi dalam kawasan. Perbedaan lain yang juga terlihat dari buku putih pertahanan Jepang dari tahun ke tahun adalah adanya penambahan isi buku putih pertahanan yang seringkali berfokus kepada sistem pertahanan baru yang dikeluarkan

²³²Ministry of Defense Japan, "Defense of Japan", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/

²³³Ibid

Jepang untuk menghadapi berbagai ancaman yang mampu membahayakan posisi Jepang.²³⁴ Secara khusus pula, dalam buku putih pertahanannya, Jepang menyatakan bahwa isu WMD seperti krisis nuklir Korea Utara, konflik pada semenanjung Korea, ataupun konflik sengketa wilayah merupakan isu serius yang mampu membahayakan stabilitas kawasan Asia Timur.²³⁵



²³⁴Ibid

²³⁵Ibid

Tabel 1. Buku Putih Pertahanan Jepang Tahun 2013-2017

TAHUN	ISU		RESPON JEPANG MELALUI KEBIJAKAN
	Kawasan Asia Timur	Internasional	
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Isu proliferasi nuklir dan misil balistik Korea Utara (pengembangan nuklir dan uji coba nuklir) - Konflik regional (sengketa wilayah dengan China dan Korea Selatan) - JSDF dan PLA terlibat konflik di daerah Laut China Timur - Deklarasi ADIZ China di Laut China Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cyber attack</i> - Terorisme internasional - Rusia, India, China muncul sebagai <i>growing power</i> - <i>Maritime Piracy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendirikan <i>National Security Council</i> - Revisi NDPG 2010 menjadi NDPG 2013 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas militer - Memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat melalui <i>deployment</i> pesawat tempur MV-22 Osprey di Okinawa
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Isu proliferasi nuklir dan misil balistik Korea Utara (Pengembangan senjata nuklir yang lebih canggih dengan menggunakan uranium berenergi tinggi) - Intensitas konflik sengketa wilayah dengan China dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik di kawasan <i>Middle East and North Africa</i> (MENA) seperti konflik di Afghanistan, Suriah, Mesir, Sudan dan Sudan Selatan, Somalia, Mali, dan lain-lain yang membuat Jepang harus lebih aktif terlibat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan program <i>National Security Strategy</i> - Pembentukan <i>New Medium Term Defense Program</i> (MTDP) yang baru - Mengembangkan kualitas JSDF melalui <i>Dynamic Joint Defense Force Committee</i> - Aktif dalam mempromosikan kerjasama pertahanan untuk mewujudkan perdamaian dunia

	<p>Korea Selatan yang semakin tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapabilitas militer China di wilayah sengketa Laut China Timur ataupun Laut China Selatan 	<p>PKO dengan PBB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isu WMD Korea Utara - Terorisme Internasional - <i>Cyberspace</i> 	
2015	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik di semenanjung Korea (konflik militer antara Korea Selatan dan Korea Utara) - Isu proliferasi nuklir dan misil balistik Korea Utara (modernisasi teknologi senjata nuklir Korea Utara menjadi lebih canggih dan dapat menjangkau wilayah Jepang) - Peningkatan kapabilitas militer China 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik regional dan terorisme internasional berfokus pada kasus di MENA) - Isu peningkatan pengembangan nuklir dan misil balistik Korea Utara yang semakin canggih - Isu kemaritiman (agresivitas dan peningkatan kapabilitas militer China melalui ADIZ pada Laut China Timur maupun Laut China Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat melalui pembentukan <i>Legislation for Peace and Security</i> - Memperkuat peran NSC dan strategi pertahanan dan keamanan melalui NSS dan NDPG - Meningkatkan kapabilitas militer melalui peningkatan kuantitas dan kualitas senjata bagi JSDF - Meningkatkan kerjasama dalam bidang kerjasama pembuatan teknologi pertahanan
2016	<ul style="list-style-type: none"> - Isu proliferasi nuklir dan misil balistik Korea Utara (peningkatan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan dengan uji coba nuklir 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik regional dan terorisme internasional di MENA yang berkaitan dengan isu terorisme <i>The Islamic State of Iraq and the Levant</i> (ISIL) 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat <i>outline</i> baru bagi peningkatan kualitas kebijakan NDPG dan MTDP - Peningkatan kapabilitas militer melalui pembelian senjata baru

	<ul style="list-style-type: none"> - Keempat Korea Utara) - Peningkatan kapabilitas militer China tanpa transparansi yang jelas - Konflik sengketa wilayah dengan China dan Korea Selatan semakin tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu pengembangan nuklir Korea Utara yang semakin agresif dan intensif dilakukan (berkaitan dengan uji coba nuklir) - Isu kemaritiman - Isu keamanan luar angkasa dimana China dan Rusia melakukan pengembangan <i>Anti-Satellite Weapon</i> (ASAT) 	
<p>2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Isu proliferasi nuklir Korea Utara (pengembangan nuklir yang semakin masif) - Konfrontasi militer antara Korea Selatan dan Korea Utara - Agresivitas China dan pengembangan kapabilitas militer China di Laut China Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terorisme internasional - <i>Maritime Piracy</i> - <i>Weapon and Mass Destructions</i> - <i>Cyber crime</i> dan <i>cyber space</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan peningkatan anggaran belanja militer yang dilakukan untuk peningkatan kapabilitas militer - Memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat

Diolah Penulis melalui sumber: *Japan Ministry of Defense White Paper*

Dari tabel Buku Pertahanan Jepang tahun 2013-2017, dapat terlihat bahwa Jepang selalu melihat isu yang terjadi di kawasan Asia Timur seperti konflik sengketa wilayah dengan China dan Korea Selatan serta isu nuklir Korea Utara sebagai ancaman bagi Jepang. Dalam Buku Putih Pertahanannya, Jepang tidak menjelaskan secara *detail* mengenai perbedaan intensitas konflik yang terjadi. Jepang hanya menjelaskan beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik.

Berdasarkan isu yang terjadi pada kawasan Asia Timur maupun dunia, Jepang perlahan mulai melakukan perubahan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanannya. Hal tersebut kemudian semakin diperjelas oleh Jepang dalam buku putih pertahanannya yang menyebutkan bahwa Jepang dikelilingi oleh negara-negara yang *powerful* di Asia Timur seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara.²³⁶

China dianggap oleh Jepang sebagai negara agresif yang mengancam Jepang dengan agresivitas militernya. Hal tersebut juga berkaitan dengan hubungan buruk kedua negara akibat sengketa wilayah pulau Senkaku/Diaoyu. *Ministry of Defense* (MOD) Jepang melaporkan bahwa terdapat aktivitas China di perairan dekat pulau Jepang. Aktivitas tersebut diketahui dari pengiriman 10 kapal termasuk kapal selam berjenis *kilo-class submarines*. Terdapat pula kapal selam penghancur berjenis *sovremenny-class* yang berlayar di pulau Okinotori, Pulau Jepang bagian Barat.²³⁷

²³⁶Loc.cit

²³⁷Ibid

Pada 23 November 2013, China mendeklarasikan ADIZ yang tumpang tindih dengan sengketa pulau Senkaku/Diaoyu dimana China mengklaim wilayah tersebut merupakan wilayah China. Sehingga, pesawat ataupun transportasi dari negara lain yang ingin melintasi wilayah ADIZ China diharuskan untuk melaporkan terlebih dahulu kepada China. Kementerian Pertahanan Jepang, Jepang sangat memperhatikan isu tersebut karena apa yang dilakukan China merupakan aksi yang membahayakan Jepang untuk mempertahankan *status quo* di wilayah Asia Timur.²³⁸

Terdapat pula aksi agresif China yang semakin membuat Jepang merasa terancam seperti terdapat kapal-kapal China yang seringkali melakukan operasi di sengketa wilayah Laut China timur secara berkelanjutan.²³⁹ Tidak hanya agresivitas China, dalam buku putih pertahannya, Jepang juga menyatakan bahwa konflik di semenanjung Korea yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara juga menjadi ancaman bagi Jepang yang mampu mempengaruhi dinamika kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur.

Korea Utara dikenal sebagai negara sosialis yang gencar dalam membangun negara yang kuat. Hal tersebut dilihat dari sisi ideology, politik, hubungan militer dan ekonomi yang mengadopsi paham "*military first*" atau yang dikenal "*Songun politics*". Akibat paham politiknya tersebut, Korea Utara seringkali diketahui melakukan pengembangan nuklir yang meresahkan dunia internasional dan negara-

²³⁸Ibid

²³⁹Ibid

negara dalam kawasan Asia timur, termasuk Jepang.²⁴⁰ Kepemilikan nuklir Korea Utara seringkali dinilai sebagai ancaman bagi negara-negara lain karena Korea Utara juga diketahui telah melakukan uji coba nuklir yang diarahkan pada laut Jepang.²⁴¹

Jepang diketahui juga memiliki konflik yang rumit dengan Korea Selatan berkaitan dengan sengketa wilayah Takeshima/Dokdo dan isu *comfort women* yang sampai saat ini seringkali masih dipermasalahkan oleh Korea Selatan. Isu tersebut diketahui juga menjadi penghalang bagi Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan hubungan militernya untuk menghadapi ancaman Korea Utara.²⁴² Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat isu-isu keamanan yang menyebabkan kompleksitas keamanan kawasan yang menyebabkan posisi Jepang terancam. Sehingga, Jepang hal tersebut mendorong Jepang untuk merespon melalui *internal transformation*.

²⁴⁰Ibid

²⁴¹Ibid, hal 20

²⁴²Choi Eun-Mi, "Memory Politics and International Relations in East Asia: Focusing on "Past Problem" between South Korea and Japan", *International Area Review*, Volume 3 No. 2, Juni 2010, hal 64

5.2 *Internal Transformation* Jepang: Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Melalui Kebijakan *Proactive Pacifism*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Buku Putih Pertahanan Jepang tahun 2013-2017, Jepang melihat isu kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur sebagai isu keamanan yang mengancam kedaulatan Jepang. Sehingga, pada tahun 2013, Jepang untuk pertama kalinya membentuk *National Security Council* (NSC) atau Dewan Pertahanan Keamanan. Pembentukan NSC tersebut kemudian disetujui oleh Diet Jepang pada November 2013. NSC memuat beberapa kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang baru yaitu *National Security Strategy* dan *National Defense Program Guideliness* (NDPG) 2013.²⁴³ Kedua kebijakan tersebut menekankan pada bagaimana pemerintah Jepang melakukan proteksi keamanan bagi negara dari ancaman-ancaman internasional terutama ancaman keamanan kawasan.

Pembentukan NSC yang disertai dengan pembentukan kebijakan NSS dan NDPG 2013 kemudian dikenal sebagai kebijakan "*Proactive Pacifism*" atau yang juga dikenal "*proactive contribution to peace*". Melalui kebijakan *Proactive Pacifism* tersebut, secara tidak langsung, Jepang terlihat tidak setuju dengan ide *pacifist idealist* yang menekankan kepada negara damai, anti perang, dan anti militerisme.²⁴⁴ Jepang kemudian ingin merubah kebijakan pertahanan dan keamanan negaranya menjadi lebih aktif dalam isu keamanan dan militer setelah sebelumnya

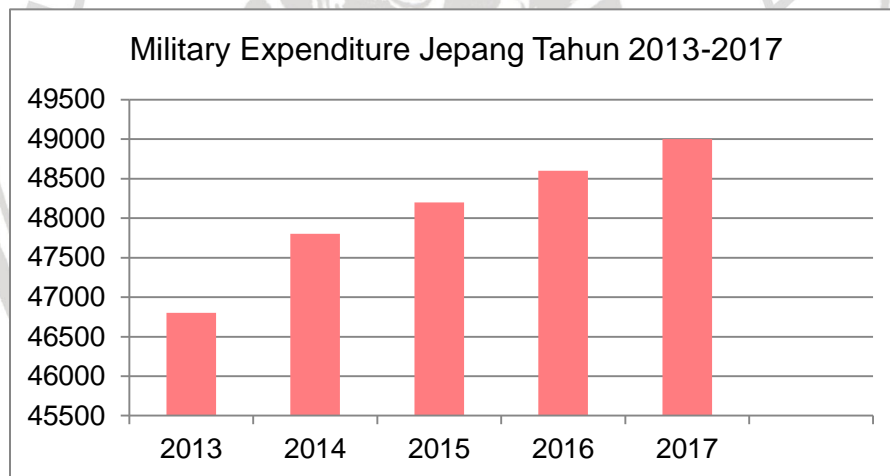
²⁴³Ministry of Defense Japan, "*Establishment of National Security Council: Organization Responsible for Japan's Security and Defense*", Desember 2013, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2014/DOJ2014_2-2-1_web_1031.pdf pada 12 Januari 2018 pukul 22.30 WIB

²⁴⁴Alexandra Sakaki, "*Japan's Security Policy: A Shift Direction Under Abe?*" Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP Research Paper), German Institute for International and Security Affairs, Maret 2015, hal 16

Jepang lebih bersikap reaktif terhadap isu tersebut karena Jepang lebih berfokus dalam mengembangkan kekuatan ekonomi. Sehingga, kebijakan *Proactive Pacifism* Jepang ditandai sebagai kebijakan yang menandai perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang dimana Jepang ingin lebih berperan aktif dalam isu keamanan, kerjasama keamanan, melakukan peningkatan kapabilitas militer serta meningkatkan hubungan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan *Proactive Pacifism* tersebut, pada periode tahun 2013-2017 tersebut Jepang melakukan peningkatan anggaran belanja militer yang dilakukan untuk memperkuat kapabilitas militer dan melakukan pembelian senjata.²⁴⁵

Grafik 1. Peningkatan *Military Expenditure* Jepang Tahun 2013-2017



Sumber diolah penulis melalui *Ministry of Defense Japan*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Jepang melakukan peningkatan anggaran belanja militer yang signifikan dalam periode tahun 2013-2017. Peningkatan

²⁴⁵ Ministry of Defense Japan, “*Japan Defense Budget 2013-2017*”, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/

anggaran belanja militer tersebut merupakan anomali bagi Jepang karena pada periode sebelum 2013-2017, anggaran belanja militer Jepang cenderung fluktuatif. Peningkatan anggaran belanja militer Jepang dilakukan untuk mendukung kebijakan *Proactive Pacifism*. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjabarkan kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan dalam *Proactive Pacifism* dalam sub-bab berikut:

5.2.1 *National Security Strategy*

Jepang membentuk NSS untuk pencapaian kepentingan nasionalnya yang diwujudkan dengan kebijakan jangka panjang dimana Jepang harus lebih berperan aktif dalam menjaga kedaulatan maupun menjaga perdamaian dunia.²⁴⁶ Tujuan dibentuknya NSS adalah untuk memperkuat aspek pertahanan dan keamanan Jepang untuk mencegah dan mengatasi ancaman secara langsung yang mampu mencapai teritori Jepang, meningkatkan keamanan regional khususnya pada regional Asia Timur maupun Asia Pasifik, dan memperkuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat melalui peningkatan hubungan kerjasama keamanan.²⁴⁷ Pembentukan NSS oleh Jepang kemudian dikenal dengan memiliki pandangan "*Proactive Contribution to Peace*". *Proactive Contribution to Peace* itu sendiri berarti bahwa Jepang akan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.²⁴⁸ Perdamaian dunia tersebut menekankan pada peran aktif Jepang dalam kerjasama internasional, kontribusi

²⁴⁶Ministry of Defense Japan, "Japan's Security and Defense Policy and The Japan-US Alliance: National Security Strategy and National Defense Program Guidelines, etc", Desember 2013, HAL 153 diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_2-2-1_web.pdf pada 12 Januari 2018 pukul 23.00

²⁴⁷Ibid, hal 154

²⁴⁸ Eyal Ben-Ari, "Changing Japanese Defense Policies", The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Mideast Security and Policy Studies No. 112, Februari 2015, hal 14

Jepang dalam keamanan internasional yang diwujudkan dalam peran Jepang di misi perdamaian ataupun misi kemanusiaan PBB.²⁴⁹

Hal utama yang membuat Jepang membentuk NSS dengan prinsip *proactive contribution to peace* adalah Jepang merasa mendapat tantangan baik dalam level global maupun regional. Dalam tantangan global, Jepang menyadari bahwa sejak awal abad ke 21, *balance of power* dalam komunitas internasional telah banyak berubah dan mempengaruhi dinamika politik internasional. Salah satu hal yang menjadi pemicu perubahan *balance of power* adalah adanya China dan India sebagai negara yang menjadi ancaman bagi negara-negara lain. China juga diketahui seringkali meningkatkan kapabilitas militernya. Disisi lain, Amerika Serikat juga tetap menjadi *power* terbesar di dunia.²⁵⁰ Ancaman global lain yang juga menjadi ancaman bagi Jepang adalah adanya terorisme internasional.²⁵¹

Pada level regional, hal yang menjadi ancaman bagi Jepang adalah adanya konflik regional dengan negara-negara tetangga di kawasan, serta ancaman nuklir Korea Utara yang semakin masif dan terlihat pada masa pemerintahan Kim Jong Un. Agresifitas China baik di dalam maupun di luar kawasan juga semakin memperkeruh konflik sengketa wilayah antara Jepang dan China.²⁵² Hal-hal tersebut yang kemudian membuat Jepang untuk pertama kalinya mendirikan NSC yang kemudian disusul dengan keluarnya kebijakan NSS dan NDPG 2013.

²⁴⁹Elena Atanassova-Cornelis, "Japan's New Approach to National Security", European Union Institute for Security Studies, Januari 2014, hal 2

²⁵⁰Ministry of Defense Japan, "National Security Strategy of Japan", 7 Desember 2013 diakses dari https://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou/pamphlet_en.pdf1, hal 6

²⁵¹Ibid

²⁵²Ibid, hal 7

Visi dari NSS itu sendiri adalah Jepang tidak ingin lagi menjadi negara yang hanya “menerima keamanan” dari Amerika Serikat, namun Jepang ingin menjadi negara yang “menyediakan keamanan”.²⁵³ Oleh karena itu, “*Proactive Contribution to Peace*” dalam NSS memang menginginkan Jepang untuk lebih berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan perdamaian. Konsep “*Proactive Contribution to Peace*” Abe memiliki perbedaan dengan *Yoshida Doctrine* dimana *Yoshida Doctrine* merupakan doktrin PM Yoshida Shigeru yang lebih berfokus untuk mengembangkan kekuatan ekonomi daripada mengembangkan kekuatan militer.²⁵⁴

NSS juga berfungsi untuk memperkuat dan memperluas kapabilitas militer Jepang, memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat, memperkuat diplomasi dan kerjasama keamanan dengan aliansi Jepang untuk memperkuat stabilitas kawasan dan komunitas internasional.²⁵⁵ Selain itu, NSS menekankan kepada adanya proteksi bagi area laut Jepang dalam *Sea of Line Communication* (SLOC). Hal ini dikarenakan, Jepang merupakan negara yang sangat bergantung dengan sumber daya energi yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Berdasarkan hal tersebut, Jepang kemudian juga akan meningkatkan kapabilitas penegakan hukum maritime dan memperkuat kerjasama dengan *partner* yang memiliki kepentingan sama dengan Jepang.²⁵⁶

5.2.2 *National Defense Program Guidelines 2013*

²⁵³Jeffrey W. Hornung, “*Gauging Japan’s ‘Proactive Contribution to Peace’*”, Reuters, 27 Oktober 2015, diakses dari <https://thediplomat.com/2015/10/gauging-japans-proactive-contributions-to-peace/> pada 12 Januari 2018 pukul 23.15 WIB

²⁵⁴Hiroshi Nakanishi, “*Reorienting Japan? Security Transformation Under the Second Abe Cabinet*”, *Asian Perspective*, 2015, hal 406

²⁵⁵Ibid. hal 410

²⁵⁶Alexandra Mihali, “*An Overview on Japan’s National Security Strategy*”, *Conflict Studies Quarterly*, Issues 6, Januari 2014, pp 50-62, hal 57

Setelah pembentukan NSC yang memuat *National Security Strategy*, Jepang kemudian melakukan revisi NDPG 2010 menjadi NDPG 2013 yang dikeluarkan pada Desember 2013. Revisi NDPG 2010 menjadi NDPG 2013 dilakukan Jepang untuk melegitimasi peraturan Jepang yang baru mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan. Menurut Jepang, kondisi keamanan kawasan pada tahun 2012 semakin kompleks. Hal tersebut dapat terlihat dari tujuan dari revisi NDPG 2013 yang mengatakan bahwa konflik regional semakin serius karena telah banyak melibatkan banyak negara-negara di kawasan. Permasalahan pengembangan nuklir, WMD, ataupun misil balistik perlu diberikan perhatian khusus oleh komunitas internasional. Korea Utara juga diketahui selalu aktif dalam memperkuat aspek nuklirnya dimana hal tersebut semakin menambah konflik dengan Korea Selatan.²⁵⁷

Selain Korea Utara, China juga tetap menjadi perhatian Jepang dalam NDPG 2013. China dinilai oleh Jepang sebagai negara agresive yang selalu meningkatkan pengeluaran belanja militer untuk memperkuat kapabilitas militer. China juga diketahui selalu meningkatkan kapabilitas militer pada aspek maritime termasuk pada wilayah Laut China Timur maupun Laut China Selatan dengan mengambil langkah asertif untuk mencapai kepentingannya pada konflik regional maritim. Dalam NDPG 2013 juga dijelaskan bahwa China telah mengancam teritori perairan Jepang dengan mendeklarasikan ADIZ China secara sepihak dimana ADIZ China tersebut

²⁵⁷Ministry of Defense Japan, "National Defense Program Guidelines 2013 for FY 2014 and Beyond", 17 Desember 2013, hal 2

mengikutsertakan pulau sengketa Senkaku/Diaoyu yang sudah lama diperebutkan oleh China dan Jepang.²⁵⁸

Pasca deklarasi ADIZ China, China melakukan peningkatan kapabilitas militer dalam sektor maritime pada wilayah sengketa China-Jepang. Sehingga, agresivitas China dalam kawasan akan mendapatkan perhatian lebih dari Jepang.²⁵⁹ Revisi NDPG 2010 menjadi NDPG 2013 itu sendiri juga menekankan kepada penguatan *manpower* dalam JSDF dan teknologi pertahanan Jepang. Terdapat pula perubahan strategi pertahanan Jepang dari yang sebelumnya adalah *Dynamic Defense Force concept* (DDF) menjadi *Dynamic Joint Defense Force concept* (DJDF). DJDF merupakan strategi pertahanan kelanjutan dari NDPG 2010 yang berusaha untuk memperbaharui kualitas maupun kuantitas aspek pertahanan dan militer Jepang dengan penguatan tiga cabang JSDF yaitu ASDF, GSDF, maupun MSDF.²⁶⁰

Lebih lanjut, konsep DJDF akan mengadakan pelatihan militer strategis untuk memperkuat kualitas JSDF dalam merespon ancaman keamanan Jepang baik dalam aspek darat, laut, maupun udara.²⁶¹ Dalam NDPG 2013, dijelaskan bahwa untuk menghalau ancaman dari kompleksitas kawasan Asia Timur Jepang juga melakukan peningkatan sistem pertahanan satelit dan sistem pertahanan misil balistik atau *Ballistic Missile Defense* (BMD) yang dilakukan dengan Amerika Serikat.²⁶² NDPG 2013 juga menekankan kepada peningkatan kuantitas militer. Hal tersebut dibuktikan

²⁵⁸ Ibid, hal 3

²⁵⁹ Ibid

²⁶⁰ Ibid, hal 7

²⁶¹ Ibid

²⁶² Ibid

dengan meningkatkan jumlah kepemilikan senjata Jepang dalam ranah maritim, darat, maupun udara.²⁶³

Peningkatan jumlah senjata Jepang dapat terlihat dari peningkatan jumlah kapal selam jenis *Soryu Class* yang semula berjumlah 16 meningkat menjadi 22.²⁶⁴ Jepang juga meningkatkan jumlah pesawat tempur jenis *Izumo-Class* dan Jet tempur Aegis jenis SM-3 misil menjadi 6 buah pesawat tempur. Jepang juga membeli pesawat pengintai dan pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat serta membeli pesawat tempur jenis V-22 Osprey sejumlah 16.²⁶⁵

Dalam meningkatkan kapabilitas militernya, pemerintah Jepang membuat dan mengembangkan stasiun radar di Pulau Yonaguni yang terletak 100 km dari Taiwan dan sekitar 150 km dari Pulau Senkaku.²⁶⁶ Tahun 2014, Jepang melakukan peningkatan anggaran belanja militer sebesar 5.5 triliun yen yang digunakan untuk meningkatkan kapabilitas militer dan pembelian senjata baru.²⁶⁷ Peningkatan anggaran belanja militer Jepang pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas militer Jepang. Dalam NDPG 2013 FY 2014, Jepang menjelaskan bahwa peningkatan kapabilitas militer dilakukan untuk menguatkan kekuatan JSDF dalam DDJF.

Untuk memperkuat kekuatan JSDF dalam DDJF, untuk kekuatan udara Jepang menghabiskan sebesar ¥59,4 juta untuk menambah jumlah pesawat tempur berjenis

²⁶³ Hiroshi Nakanishi, "Reorienting Japan? Security Transformation Under the Second Abe Cabinet", *Asian Perspective*, 2015, hal 409

²⁶⁴ *Ibid*, hal 410

²⁶⁵ *Ibid*

²⁶⁶ *Ibid*

²⁶⁷ Jonathan Marcus, "Japan's (Self) Defense Forces", *BBC News*, 16 Juli 2015, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-33549015> pada 12 Januari 2018 pukul 01.05 WIB

P-1 *fixed-wing patrol aircraft*. Penambahan pesawat tempur jenis P-1 tersebut juga dilakukan dengan menambah kapabilitas untuk mendeteksi dan melakukan penyerangan. Jepang juga menambah 3 unit pesawat tempur berjenis P-3C dengan anggaran ¥1,5 juta.²⁶⁸ Jepang juga menambah 4 unit helikopter patroli berjenis SH-60K dengan menghabiskan ¥24,2 juta. Penambahan helikopter patroli tersebut juga disertai dengan peningkatan kapabilitas untuk mendeteksi adanya kapal selam serta peningkatan kapabilitas untuk menyerang.²⁶⁹

Jepang kemudian juga membeli 2 unit *amphibious vehicle* yang menghabiskan ¥1,7 juta untuk diletakkan pada pulau terpencil Jepang sebagai persiapan untuk merespon adanya operasi ilegal ataupun invasi pulau milik Jepang oleh negara lain.²⁷⁰

5.2.3 Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang

Melihat kondisi kompleksitas keamanan kawasan tersebut, Jepang kemudian melakukan *internal transformation* dengan melakukan peningkatan kapabilitas militer. Peningkatan kapabilitas militer Jepang lebih jelas akan dijelaskan dalam sub-bab ini. Indikator yang dapat dilihat dalam menentukan kapabilitas militer suatu negara menurut Stephen Biddle adalah dengan melihat jumlah *power* yang dilihat secara *numerical* atau kuantitatif (*numerical preponderance*) seperti jumlah pasukan dan alutsista, teknologi militer, dan penggunaan *power* (*force employment*).²⁷¹ Untuk menentukan peningkatan kapabilitas militer, dapat terlihat adanya penambahan

²⁶⁸Ministry of Defense Japan, "Defense Program and Budget of Japan: Overview of FY2014 Budget", diakses dari website resmi Kementerian Pertahanan Jepang http://www.mod.go.jp/e/d_budget/, hal 2 pada 12 Januari 2018 pukul 01.30 WIB

²⁶⁹Ibid, hal 3

²⁷⁰Ibid, hal 11

²⁷¹Stephen Biddle, "Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle", United Kingdom: Princeton University Press, 2004, hal 14-15

kuantitas ataupun peningkatan kualitas dari jumlah pasukan dan alutsista, teknologi militer, maupun penggunaan *power*.

Melihat indikator kapabilitas militer menurut Stephen Biddle, dapat terlihat bahwa Jepang berusaha melakukan peningkatan kapabilitas militer yang diwujudkan melalui penambahan kuantitas persenjataan yang berkualitas, melakukan modernisasi teknologi militer, serta meningkatkan dan memperkuat kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Dalam kebijakan baru Jepang yang dibuat melalui NSS, maupun NDPG 2013 menunjukkan bahwa Jepang berusaha melakukan peningkatan kapabilitas militer. Dilihat dari segi kekuatan militer, Jepang memiliki kapal selam yang kuat berjenis *Japan's Soryu-class hunter-killer*. Jepang itu sendiri memiliki 12 kapal selam jenis *Soryu-class*, kapal selam terbesar yang telah dimiliki sejak Perang Dunia II.²⁷²

Jepang diketahui semakin meningkatkan kapabilitas militernya dengan membeli dan melakukan modernisasi senjata setiap tahunnya. (Lihat Lampiran). Pada saat pembentukan NSS tahun 2013, Jepang meningkatkan 1,7% anggaran belanja militer pertahunnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas senjata bagi JSDF terutama bagi ASDF karena konflik maritim dan perebutan wilayah Jepang dan China selalu mengancam posisi Jepang.²⁷³ Agresivitas militer China dalam kawasan terutama dalam mengatasi konflik sengketa wilayah dengan Jepang, China diketahui selalu meningkatkan kapabilitas militernya dimana hal tersebut akan memicu terjadinya

²⁷² Brad Lendon, "North Asia on A Knife's Edge: Whose Position is the Strongest?", CNN, 04 April 2017, diakses dari <http://edition.cnn.com/2017/03/16/china/asia-military-balance-china-koreas-japan-us/index.html> pada 26 Desember 2017 pukul 23.00 WIB

²⁷³ Alexandra Mihali, "An Overview on Japan's National Security Strategy", Conflict Studies Quarterly, Issues 6, Januari 2014, pp 50-62, hal 52

konflik militer pada pulau terpecil Jepang. Oleh karena itu, Jepang kemudian meningkatkan kapabilitas JSDF dengan melakukan latihan gabungan militer dengan Amerika Serikat serta melakukan modernisasi senjata.²⁷⁴

Jepang kemudian juga membuat *amphibious fighting force* dan menambah 3.000 pasukan ASDF yang ditugaskan untuk menjaga daerah konflik dengan China. Jepang juga menambahkan 28 pesawat tempur berjenis F-35 *multi-role fighters* untuk GSDF. Terdapat penambahan 4 pesawat peringatan (*early-warning aircraft*), 3 tank, serta pembelian 3 *drone* berjenis RQ-4 *Global Hawk Surveillance* yang ditujukan untuk mencegah ancaman uji coba nuklir Korea Utara.²⁷⁵ Selain itu, terdapat penambahan 2 helikopter penghancur berjenis *Izumo-Class* untuk MSDF. Penambahan *izumo-class* tersebut menimbulkan kontroversi bagi Jepang karena helikopter tersebut berpotensi untuk menyerang, sehingga, Jepang sempat dikecam dengan penambahan helikopter penghancur tersebut.²⁷⁶

Tahun 2013, Jepang meningkatkan pengeluaran belanja militer untuk aspek pertahanan dengan membeli drone, jet tempur, kapal *destroyer*, *amphibious vehicles* untuk melawan aktivitas militer China di kawasan Asia Timur. PM Shinzo Abe juga memerintahkan kementerian pertahanan Jepang untuk menempatkan *amphibious vehicle* didekat Pulau Senkaku.²⁷⁷ Tahun 2013 Jepang juga meningkatkan jumlah personil JSDF baik dalam aspek GSDF, MSDF, maupun ASDF. Total pasukan JSDF

²⁷⁴Matthias Bierni, "Japan's Military Rebirth", Center for Security Studies (CSS) Analyses in Security Policy, no. 155, Juni 2014, hal 3

²⁷⁵Ibid

²⁷⁶Ibid

²⁷⁷Justin McCurry, "Japan Increases Defense Budget Amid Tensions with China", The Guardian, 17 Desember 2013, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2013/dec/17/japan-increases-defence-budget-tensions-china> pada 12 Januari 2018 pukul 01.15 WIB

pada tahun 2013 adalah 255.377. Sedangkan untuk senjata lainnya seperti pesawat, Jepang mengeluarkan sebanyak JPY 9,7 juta untuk memperluas operasi pesawat *destroyer* dan helikopter patroli.²⁷⁸

Pada tahun 2014, konflik sengketa wilayah antara Jepang dan China semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pasukan patroli China ditempatkan di dekat pulau Senkaku dimana hal tersebut membuat Jepang mengecam tindakan China.²⁷⁹ Sehingga, Jepang kemudian memperbaharui pesawat tempur *fixed-wing patrol* (P-1) sebanyak 3 unit yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mendeteksi dan menyerang yang lebih baik. Selain itu Jepang juga menambah 3 unit *fixed-wing patrol aircraft* jenis P-3C yang dilengkapi radar dan sinar *infrared* untuk kemampuan deteksi yang lebih canggih.²⁸⁰

Hal lain yang juga dilakukan oleh Jepang adalah Jepang meningkatkan jumlah armada kapal selam dari yang semula berjumlah 16 menjadi 22. MSDF kemudian menerima 7 *guided-missile destroyers*, 23 pesawat patrol maritim, serta kapal perang littoral yang dikembangkan bersama dengan Amerika Serikat.²⁸¹ Pada tahun 2015, anggaran militer Jepang mengalami peningkatan sebesar JPY 4,98 triliun yang dilakukan untuk merespon peningkatan kapabilitas militer China di Asia Timur.²⁸²

²⁷⁸Ministry of Defense Japan, "Defense Program and Budget of Japan 2013", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/

²⁷⁹Carrie Sheffield, "Japan Bolsters Its Military Spending", Forbes, 31 Mei 2014, diakses dari <https://www.forbes.com/sites/carriesheffield/2014/05/31/japan-bolsters-its-military-spending/#4a39e4636612> pada 12 Januari 2018 pukul 01.30 WIB

²⁸⁰Ministry of Defense Japan, "Defense and Budget of Japan 2014", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/, hal 2

²⁸¹Matthias Bierr, "Japan's Military Rebirth", Center for Security Studies (CSS) Analyses in Security Policy, no. 155, Juni 2014, hal 2

²⁸²Roberto Bendini, "In-Depth Analysis: Japan Foreign and Security Policy at a Crossroad", Police Department, Directorate-General for External Policies, Europe Union, 2012, hal 14

Tahun 2016, Jepang mengakuisisi helikopter patroli tipe SH-60K sebanyak 17 unit bagi MSDF yang menghabiskan dana sebesar JPY 102,6 juta. Helikopter patroli tersebut memiliki kemampuan untuk mendeteksi kapal selam yang berada di wilayah Jepang serta helikopter partoli tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan penyerangan.²⁸³

Selain memperbaharui helikopter patroli, Jepang juga mengembangkan teknologi baru yaitu helikopter patrol yang mampu mendeteksi kapal selam dengan bantuan koordinasi dari MSDF untuk memastikan tidak ada kapal selam dari negara lain yang berada di teritori perairan Jepang.²⁸⁴ Hal lain yang dilakukan Jepang adalah mengembangkan misil balistik interseptor yang berjenis SM-3 Block IIA yang dilakukan bersama dengan Amerika Serikat. Misil SM-3 Block IIA tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah serangan misil dimana Jepang dan Amerika Serikat juga akan memperkuat kerjasamanya dalam mengembangkan *aegis-equipped destroyer* untuk kapabilitas SM-3 Block IIA yang lebih canggih.²⁸⁵

5.2.4 Pencabutan Kebijakan Larangan Ekspor Senjata

Hal lain yang menandai adanya transformasi kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang adalah Jepang menerapkan kebijakan pencabutan larangan ekspor senjata yang sebelumnya tidak boleh dilakukan oleh Jepang. PM Shinzo Abe

²⁸³Ministry of Defense Japan, "Defense Program and Budget Japan 2016", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/, hal 2

²⁸⁴Ibid, hal 3

²⁸⁵Ibid, hal 11

merupakan PM yang mencabut larangan ekspor senjata tersebut selama hampir 50 tahun Jepang melakukan pelarangan ekspor senjata.²⁸⁶ Sejak tahun 1967, Jepang diharuskan untuk melakukan pelarangan ekspor senjata dan teknologi militer.²⁸⁷ Hal tersebut didukung dengan kebijakan “*Three Principles on Arms Export and Their Related Policy Guidelines*” yang dibentuk pada tahun 1967.²⁸⁸

Dibawah kebijakan *Three Principles*, ekspor senjata diperbolehkan kepada negara-negara ataupun kawasan dengan beberapa aturan yaitu, Jepang tidak diperbolehkan melakukan ekspor senjata ke negara-negara komunis, negara yang akan diekspor senjata oleh Jepang, tidak boleh menerima sanksi embargo dari *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) dan Jepang tidak boleh mengekspor senjata pada negara-negara yang teralibat dalam konflik internasional.²⁸⁹ Pada tahun 1976, Jepang kembali memperketat kebijakan larangan ekspor senjata selama 60 tahun. Akibat kebijakan tersebut, perusahaan Jepang yang bergerak dalam pengembangan industri pertahanan harus ditutup.²⁹⁰

Dalam menghadapi tantangan kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur seperti ekspansi militer China dan pengembangan nuklir dan misil balistik Korea Utara, Jepang merasa perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas

²⁸⁶Martin Fackler, “*Japan Ends Decades-Long Ban on Export Weapon*”, The New York Times, 01 April 2014, diakses dari <https://www.nytimes.com/2014/04/02/world/asia/japan-ends-half-century-ban-on-weapons-exports.html> pada 12 Januari 2018 pukul 01.45 WIB

²⁸⁷Chris Hughes, “*Japan’s Emerging Arms Transfer Strategy: Diversifying to Re-Centre on the US-Japan Alliance*”, Routledge: Taylor&Francis Group, The Pacific Review 2017, hal 1

²⁸⁸Taisuke Hirose, “*Japan’s New Arm Export Principles: Strengthening US-Japan Relations*”, Center for Strategic and International Studies, 14 Oktober 2014, diakses dari <https://www.csis.org/analysis/japan%E2%80%99s-new-arms-export-principles-strengthening-us-japan-relations> pada 12 Januari 2018 pukul 02.15 WIB

²⁸⁹Ministry of Foreign Affairs Japan, “*Japan’s Policies on The Control of Arms Exports*”, diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/> pada 12 Januari 2018 pukul 02.45 WIB

²⁹⁰Hirose, loc.cit

militer dan memperkuat kerjasama dengan aliansi dan negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang. Pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe, Shinzo Abe mengadopsi kebijakan baru mengenai prinsip baru ekspor senjata pada April 2014 yang dikenal dengan kebijakan *“Implementation Guidelines for the Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology”* yang memuat mengenai hal-hal dimana ekspor senjata akan diizinkan.²⁹¹

Salah satu hal yang berkaitan dengan ekspor senjata adalah kebijakan ekspor senjata Jepang harus berdasarkan pada *“joint development and production”* dimana dalam melakukan produksi senjata untuk diekspor, perusahaan Jepang harus mengembangkan dan memproduksi senjata secara mandiri yang tidak hanya mengandalkan perusahaan Amerika Serikat serta Jepang harus menggunakan peralatan untuk membuat senjata yang disetujui baik oleh Jepang maupun Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah misil berjenis SM-3BlockIIA dan generasi terbaru dari anti balistik misil yang akan ditempatkan tahun 2018.²⁹²

Selain itu, Jepang juga harus mendapatkan surat izin dari perusahaan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan, perusahaan Jepang juga akan menyediakan pasokan komponen senjata pada perusahaan Jepang. Amerika Serikat dalam hal ini juga mengekspor komponen kepada Jepang. Sehingga, kedua negara tersebut saling bekerjasama.²⁹³ Terdapat pula aturan yang menyatakan bahwa produksi peralatan dari Amerika Serikat harus dihentikan atau dikurangi, sehingga Jepang melakukan produksinya sendiri. Hal ini dilakukan agar kerjasama masing-masing negara saling

²⁹¹Ibid

²⁹²Ibid

²⁹³Ibid

menguntungkan baik bagi industri pertahanan Amerika Serikat ataupun Jepang. Seperti contoh, pada Juli 2014, NSC Jepang menyetujui Industri Berat Mitsubishi untuk memasok peralatan senjata untuk misil berjenis PAC-2 pada perusahaan Amerika Serikat yaitu Raytheon.²⁹⁴

Raytheon itu sendiri akan menyediakan PAC-2 untuk Qatar yang juga merupakan *security partner* Amerika Serikat dan Jepang. Jepang itu sendiri telah mengantongi banyak surat izin dari perusahaan Amerika Serikat untuk memasok pasokan senjata termasuk komponen untuk pembuatan jet tempur dan helikopter, komponen pembuatan misil *surface-to-air missiles*, peluncur rudal untuk kapal tempur, ataupun mesin untuk pembuatan pesawat tempur dan kapal.²⁹⁵ Dalam mengembangkan produksi ekspor senjata, Jepang juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yaitu Amerika Serikat, Australia, India, negara-negara ASEAN, dan negara-negara yang tergabung dalam NATO yaitu Inggris dan Perancis.²⁹⁶

Sejak saat itu, Jepang juga mengimpor persenjataan Amerika Serikat melalui *Foreign Military Sales* (FMS) seperti *egis radar system* untuk menambah kuantitas senjata bagi JSDF. Jepang juga diketahui melakukan produksi F2-*fighter* dengan Amerika Serikat.²⁹⁷ Kebijakan pasifis pada era Shigeru Yoshida atau Yoshida *Doctrine* yang selama ini melekat pada Jepang pada kenyataannya akan sulit untuk melindungi Jepang dari ancaman kompleksitas kawasan Asia-Pasifik maupun

²⁹⁴Ibid

²⁹⁵Ibid

²⁹⁶Chris Hughes, "Japan's Emerging Arms Transfer Strategy: Diversifying to Re-Centre on the US-Japan Alliance", Routledge: Taylor&Francis Group, The Pacific Review 2017, hal 2

²⁹⁷Ibid, hal 5

Asia Timur.²⁹⁸ Ekspor senjata dan teknologi merupakan salah satu kebijakan Jepang untuk memperluas kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang ditujukan akibat adanya kompleksitas keamanan kawasan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Jepang untuk menetapkan status quo di Asia Timur. Konflik sengketa wilayah Jepang dengan China di Laut China Timur merupakan salah satu pemicu utama Jepang untuk meningkatkan dan mentransformasi kebijakan pertahanan dan keamanannya.²⁹⁹

Sejak dikeluarkannya kebijakan pencabutan larangan ekspor senjata tersebut, Jepang juga harus melalui beberapa hambatan yaitu masih banyak masyarakat Jepang yang tidak setuju dengan upaya Jepang dalam melakukan pencabutan larangan ekspor senjata. Menurut data *Kyodo News*, sebanyak 66% responden tidak setuju jika Jepang melakukan pencabutan larangan ekspor senjata. Hal ini dikarenakan, masyarakat Jepang masih menginginkan Jepang untuk mentaati konstitusi pasifis dimana Jepang tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor senjata ke negara lain.³⁰⁰ Menurut perspektif Jepang, merupakan hal yang wajar jika Jepang melakukan transformasi kebijakan pertahanan dan keamanan yang salah satunya diwujudkan dalam pencabutan larangan ekspor senjata untuk menghadapi dan melawan ancaman pengembangan nuklir dan program misil Korea Utara, agresivitas militer China pada wilayah sengketa dengan Jepang yaitu Laut China Timur.³⁰¹

²⁹⁸Ibid, hal 6

²⁹⁹Roberto Bendini, "In-Depth Analysis: Japan Foreign and Security Policy at a Crossroad", Police Department, Directorate-General for External Policies, Europe Union, 2012, hal 1

³⁰⁰Ibid

³⁰¹Ibid

5.2.5 Reinterpretasi Artikel 9 tahun 1947

Dalam merespon kompleksitas kawasan Asia Timur, transformasi lain yang juga dilakukan oleh Jepang adalah dengan melakukan reinterpretasi pasal 9 tahun 1947 yang diajukan pada tahun 2014 dan disahkan pada tahun 2015 dan telah disetujui oleh parlemen Jepang. Seperti yang diketahui, Jepang selama ini dikenal dengan sebutan negara yang menganut paham *pacifism* yang anti perang dan militeristik. Hal tersebut kemudian tertuang dalam Konstitusi Jepang tahun 1947 pasal 9, yaitu:³⁰²

1. *Aspiring sincerely to international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes*
2. *In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.*

Konstitusi pasifis tersebut diakui Jepang membuat Jepang tidak dapat melindungi kedaulatan Jepang secara maksimal. Jepang menyatakan bahwa kondisi keamanan pada saat ini telah berubah dan kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur menjadi isu penting bagi Jepang. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas militer China akan membahayakan dan mengancam keamanan Jepang. Munculnya China sebagai kekuatan yang kuat mendatangkan isu baru yang serius pada masa pasca Perang Dingin pada keamanan Jepang.³⁰³ Pengembangan nuklir dan misil

³⁰² The Law Library of Congress, "Japan: Interpretation of Article 9 of the Constitution", Global Legal Research Center, September 2015, hal 2

³⁰³ Andrew R. Capistrano, dkk., "Japan's Changing Defense Posture and Security Relation in East Asia", The Korean Journal of International Studies, Vol. 14, No. 1, April 2016, hal 2

balistik Korea Utara juga merupakan masalah besar yang perlu ditanggapi secara serius oleh Jepang.³⁰⁴

Selain itu, Jepang juga seringkali mengalami konflik sengketa wilayah dengan negara-negara tetangga di Asia Timur seperti konflik sengketa wilayah dengan China di Laut China Timur dan konflik sengketa wilayah Takeshima/Dokdo dengan Korea Selatan.³⁰⁵ Selain reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 dilakukan untuk merespon kompleksitas kawasan Asia Timur, hal tersebut juga dilakukan untuk mengubah posisi Jepang sebagai negara pasifis menjadi dikenal lebih proaktif dalam menanggapi isu keamanan yang terjadi pada dunia.³⁰⁶

Dalam artikel 9 tahun 1947, dijelaskan bahwa Jepang dilarang menggunakan kekuatan untuk melawan musuh. Jepang juga dilarang untuk terlibat dalam *Collective Self-Defense* (CSD) bersama dengan aliansinya. Selain itu, artikel 9 tahun 1947 juga tidak mengizinkan JSDF untuk keluar dari teritori Jepang. aturan mengenai “*the use of force*” atau penggunaan kekuatan dalam artikel 9 hanya boleh dilakukan Jepang jika sedang diserang oleh negara lain dan hanya boleh digunakan dalam batas minimum.³⁰⁷ Dibawah pemerintahan Shinzo Abe, artikel 9 tahun 1947 kemudian dilakukan reinterpretasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, reinterpretasi dilakukan untuk merespon kompleksitas keamanan kawasan dan keamanan internasional.³⁰⁸

³⁰⁴Ibid, hal 9

³⁰⁵Matthias Bierri, “*Japan’s Military Rebirth*”, Center for Security Studies (CSS) Analyses in Security Policy, no. 155, Juni 2014, hal 2

³⁰⁶Capistrano & Kurizaki, loc.cit

³⁰⁷Ministry of Foreign Affairs Japan, “*Japan Security Policy in Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan’s Survival and Protect Its People: Measures for Self-Defense Permitted Under Article 9 of the Constitution*”, diakses dari http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html pada 12 Januari 2018 pukul 03.00 WIB

³⁰⁸Ibid

Juli 2014, PM Shinzo Abe mulai mencanangkan reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 Konstitusi Jepang yang diketahui mengandung isi mengenai “*peace clause*” dimana Jepang dilarang untuk berperang. Shinzo Abe kemudian berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan militer Jepang melalui JSDF untuk lebih berperan aktif dalam melawan negara-negara lain yang mengancam Jepang. Meskipun pada awalnya banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan Shinzo Abe, namun, tahun 2015 reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 telah disahkan sebagai konstitusi Jepang yang baru.³⁰⁹ Berikut merupakan isi dari reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 sebagai konstitusi Jepang:³¹⁰

Under such recognition and as a result of careful examination in light of the current security environment, the Government has reached a conclusion that not only when an armed attack against Japan occurs but also when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan's survival and poses a clear danger to fundamentally overturn people's right to life, liberty and pursuit of happiness, and when there is no other appropriate means available to repel the attack and ensure Japan's survival and protect its people, use of force to the minimum extent necessary should be interpreted to be permitted under the Constitution as measures for self-defense in accordance with the basic logic of the Government's view to date.

Dapat terlihat bahwa, reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 kemudian mengubah aturan mengenai penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Jepang diizinkan ketika Jepang menerima serangan dari negara lain menjadi Jepang diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan atau *the use of force* tidak hanya ketika Jepang diserang,

³⁰⁹Norihiro Kato, “*Japan’s Break With Peace*”, 16 Juli 2014, The New York Times, diakses dari <https://www.nytimes.com/2014/07/17/opinion/norihiro-kato-japans-break-with-peace.html> pada 13 Januari 2018 pukul 22.00 WIB

³¹⁰Loc.cit

namun Jepang juga diizinkan untuk menggunakan kekuatan jika terjadi penyerangan dari negara lain pada negara yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang. Jika terjadi hal yang mengancam kedaulatan Jepang dimana hal tersebut juga akan membahayakan warga negara Jepang dan tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut, maka Jepang diizinkan untuk menggunakan kekuatan semaksimal mungkin.³¹¹

Dari penjelasan diatas, setelah revisi artikel 9 tahun 1947, Jepang diizinkan untuk terlibat dalam CSD bersama negara-negara sekutu Jepang. Penggunaan kekuatan bagi Jepang dalam CSD juga diizinkan termasuk penggunaan kekuatan yang digunakan karena Jepang terpicu oleh aksi agresif negara lain. Jika hal tersebut terjadi, penggunaan kekuatan oleh Jepang diizinkan secara sah oleh konstitusi Jepang karena hal tersebut menyangkut perlindungan bagi warga negara dan kedaulatan Jepang. Reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 tersebut dapat dilihat dari pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Jepang, yaitu:³¹²

In certain situations, the aforementioned "use of force" permitted under the Constitution is, under international law, based on the right of collective self-defense. Although this "use of force" includes those which are triggered by an armed attack occurring against a foreign country, they are permitted under the Constitution only when they are taken as measures for self-defense which are inevitable for ensuring Japan's survival and protecting its people, in other words for defending Japan.

Meskipun penggunaan kekuatan untuk melindungi warga negara maupun kedaulatan Jepang telah disahkan oleh konstitusi, tetap akan ada kontrol pemerintah

³¹¹Ibid

³¹²Ibid

mengenai penggunaan kekuatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Diet sebagai parlemen Jepang yang kemudian bertugas sebagai pemberi persetujuan penggunaan kekuatan bagi Jepang.³¹³ Dengan reinterpretasi artikel 9 tersebut, dimana Jepang berhak untuk menggunakan kekuatan baik ketika diserang maupun ketika negara sekutu Jepang di serang, hak CSD Jepang menjadi semakin luas sehingga Jepang dapat dengan bebas untuk berpartisipasi dalam kegiatan misi perdamaian PBB.

Reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 tersebut mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dimana Amerika Serikat memang menginginkan Jepang untuk menghapus larangan yang ada dalam konstitusi pasifis yang menahan Jepang untuk terlibat dalam CSD bersama Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan, Amerika Serikat menyadari bahwa Jepang merupakan *partner* yang potensial untuk dapat bergabung dengan Amerika Serikat dalam CSD.³¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa, tantangan keamanan dunia disertai dengan kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur yang diakibatkan oleh agresivitas militer China dan pengembangan nuklir dan misil balistik Korea Utara. Sehingga, Jepang juga melakukan transformasi kebijakan pertahanan dan keamanan dimana salah satunya berupa reinterpretasi artikel 9 tahun 1947 yang selama ini menahan Jepang untuk melakukan pengembangan kapabilitas militer.

³¹³Ibid

³¹⁴Michael A. Panton, "Politics, Practice, and Pasifism: Revising Article 9 of the Japanese Constitution", Asian Pacific Law&Policy Journal, Vol 11 no. 2, 2010, hal 194

Tabel 2. Reinterpretasi Artikel 9 tahun 1947

Reinterpretasi Artikel 9 Tahun 1947	
<i>Old</i>	<i>New</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat pasif-reaktif 2. Tidak diizinkan untuk menggunakan kekuatan (<i>the use of force</i>) kecuali jika Jepang diserang musuh 3. JSDF tidak diizinkan untuk terlibat dalam <i>Collective Self-Defense</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat aktif-assertif 2. <i>The use of fore diizinkan</i> walaupun Jepang sedang tidak diserang oleh musuh (memperhatikan kondisi dan situasi keamanan kawasan Asia Timur yang konfliktual) 3. JSDF diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas <i>Collective Self-Defense</i> dan diperbolehkan untuk melakukan penyerangan ketika sekutu Jepang diserang musuh

Sumber diolah penulis dari : *Ministry of Defense Japan*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa, terdapa tiga perubahan utama yang menandai reinterpretasi artikel 9 tahun 1947. Perubahan pertama memperlihatkan bahwa sebelum reinterpretasi, kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang cenderung bersifat pasif-reaktif dimana Jepang tidak begitu memperhatikan aspek militer dan lebih berfokus pada pengembangan kekuatan ekonomi. Sementara itu, setelah dilakukan reinterpretasi artikel 9 tahun 1947, kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang diketahui bersifat lebih aktif dan asertif dimana hal ini ditandai dengan partisipasi Jepang dalam misi PKO PBB dan pembentukan kebijakan *proactive pacifism* dimana Jepang ingin lebih aktif terlibat dalam mewujudkan perdamaian internasional.

Pada perubahan kedua, sebelum dilakukan reinterpretasi, Jepang dilarang untuk menggunakan *force* atau kekuatan kecuali jika Jepang sedang diserang. Pelarangan

penggunaan kekuatan bagi Jepang dilakukan agar Jepang tidak lagi menjadi negara yang ekspansionis seperti pada masa Perang Dunia II. Namun, pasca reinterpretasi, Jepang diperbolehkan menggunakan kekuatan. Hal tersebut ditegaskan oleh PM Shinzo Abe bahwa lingkungan keamanan kawasan Asia Timur semakin mengalami perubahan dan hal tersebut dapat membahayakan dan mengancam posisi Jepang jika Jepang masih tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan.³¹⁵

Pada perubahan ketiga, sebelum reinterpretasi, Jepang tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan *Collective Self-Defense*. Namun, pasca reinterpretasi, Jepang diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas *Collective Self-Defense* bersama sekutu maupun negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang. Sehingga, jika sekutu ataupun negara-negara yang dekat dengan Jepang diserang, Jepang diperbolehkan untuk melakukan penyerangan.



³¹⁵ Andrew R. Capistrano, dkk., "Japan's Changing Defense Posture and Security Relation in East Asia", *The Korean Journal of International Studies*, Vol. 14, No. 1, April 2016, hal 81



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kompleksitas kawasan Asia Timur terjadi akibat banyak terjadinya konflik regional antar negara-negara dalam kawasan seperti konflik sengketa wilayah pulau Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan China, konflik sengketa wilayah Takhesima/Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan, dan terdapat pula pengembangan nuklir dan misil balistik yang disertai dengan uji coba nuklir Korea Utara. Hal tersebut kemudian membuat masing-masing negara merasa terancam satu sama lain. Adanya pengaruh Amerika Serikat sebagai penetrasi dan aliansi terbesar Jepang dan Korea Selatan juga semakin menambah dinamika kompleksitas kawasan Asia Timur.

Tidak hanya konflik sengketa wilayah, masing-masing negara-negara Asia Timur juga saling meningkatkan kapabilitas militernya untuk merespon adanya kompleksitas keamanan kawasan. Menurut Barry Buzan dan Ole Waever, kompleksitas keamanan kawasan terjadi pada negara-negara yang memiliki jarak geografis berdekatan. Jarak geografis yang berdekatan tersebut membuat negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama terkena efek *spill over* dari aksi yang dilakukan negara lain.

Menurut Buzan dan Waever, kompleksitas keamanan kawasan terjadi jika terdapat *anarchic structure* yang berupa adanya penetrasi dari negara lain, adanya *polarity* atau polaritas dalam kawasan, serta *social construction* yang berupa hubungan *amity-enmity* negara-negara dalam kawasan. Di Asia Timur, terdapat penetrasi Amerika Serikat yang besar dimana Amerika Serikat merupakan aliansi

Jepang dan Korea Selatan namun juga merupakan musuh bagi China dan Korea Utara. Selain itu, polaritas yang terjadi di Asia Timur adalah *multipolar* dimana kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu negara saja, namun terpusat kepada banyak negara-negara seperti China, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan.

Masing-masing negara memiliki kekuatannya tersendiri dimana keempat negara tersebut juga saling bersaing satu sama lain untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan karena negara-negara tersebut menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh negara-negara kuat dengan kapabilitas militer yang canggih. *Social construction* di Asia Timur itu sendiri terbagi membentuk pola *amity* dan *enmity*. Pola *amity* terbentuk karena adanya persahabatan dan kerjasama yang terbentuk antar negara sedangkan pola *enmity* terbentuk karena adanya permusuhan dan sifat saling tidak percaya antar negara.

Meskipun pola hubungan tidak 100% membentuk pola *amity* atau *enmity*, terdapat beberapa negara yang dapat dikategorikan dalam pola *amity* dan *enmity*. Di Asia Timur, pola *amity* dapat terlihat antara China dan Korea Utara sedangkan pola *enmity* dapat terlihat antara China dan Jepang, Jepang dan Korea Selatan, Jepang dan Korea Utara, serta Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk merespon kompleksitas keamanan kawasan tersebut, Jepang kemudian melakukan *internal transformation* atau transformasi internal yang dilakukan melalui perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan melalui kebijakan *Proactive Pacifism*. Perubahan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang sebenarnya telah terjadi pada saat Amerika Serikat mengingkan Jepang untuk terlibat dalam PKO PBB di Afganistan dan Perang Teluk.

Meskipun pada saat itu hal tersebut juga masih menjadi kontroversi di parlemen Jepang. Jepang kemudian menyadari bahwa Jepang tidak bisa terus menerus berada dalam kekangan konstitusi pasifis yang selama ini mengekang Jepang untuk tidak mengembangkan kapabilitas militer. Sehingga, pada tahun 2000an, Jepang sedikit demi sedikit melakukan perubahan dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya. Puncaknya, pada tahun 2013, Jepang kemudian membentuk NSC yang didalamnya terdapat kebijakan NSS, MTDP, dan revisi NDPG 2013 yang dibentuk untuk merespon kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dan dikenal dengan kebijakan *Proactive Pacifism* atau juga dikenal dengan “*proactive contribution to peace*” dimana Jepang akan lebih banyak memainkan peran dalam mewujudkan perdamaian dunia. MTDP dibentuk oleh Jepang sebagai pedoman dalam meningkatkan kapabilitas militernya.

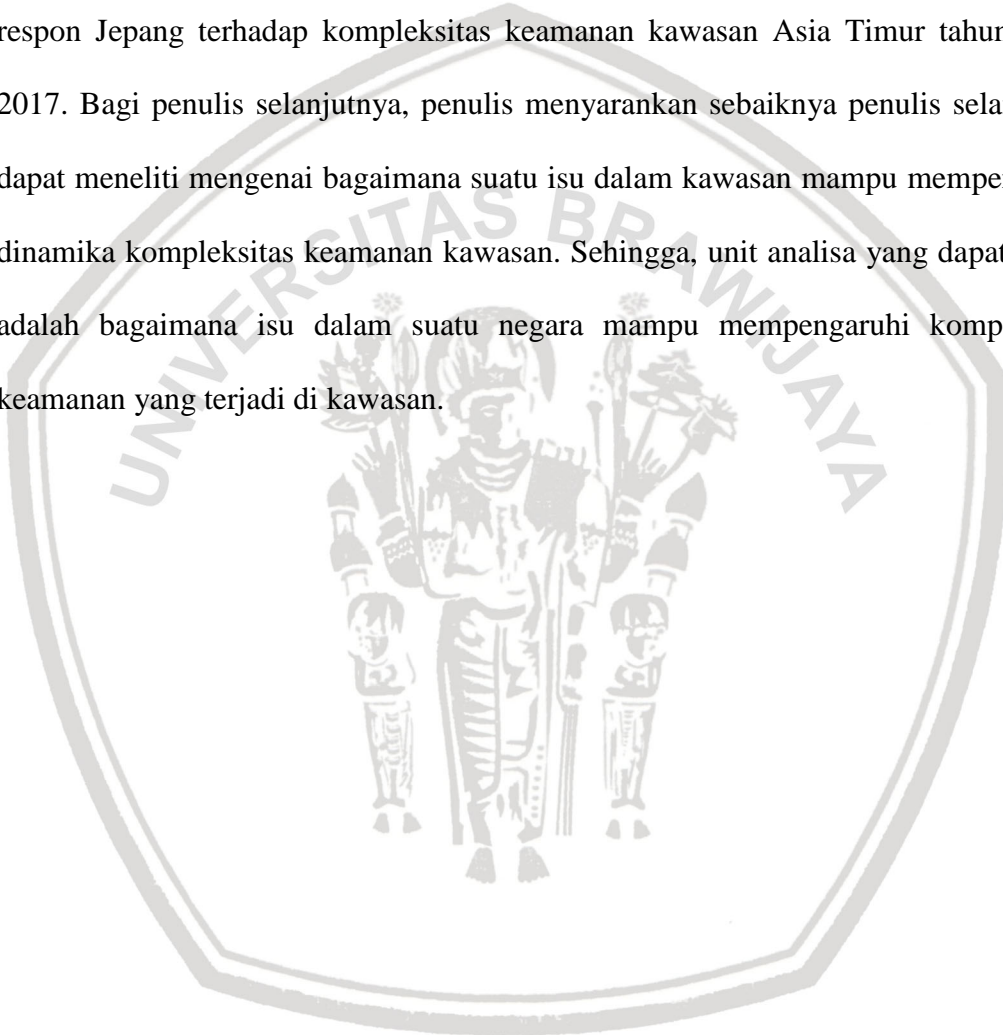
Selain itu, NDPG 2013 kemudian dibentuk untuk meningkatkan kekuatan antar 3 cabang JSDF yaitu MSDF, GSDF, dan ASDF. Selain itu, untuk pertama kalinya pada tahun 2014 dibawah PM Shinzo Abe, Jepang mencabut larangan ekspor senjata dimana Jepang telah mentaati kebijakan larangan ekspor senjata selama lebih dari 40 tahun. Hal tersebut dilakukan Jepang untuk memajukan industri pertahanan Jepang serta untuk meningkatkan pembuatan senjata Jepang dalam merespon ancaman. Pada tahun 2014, Jepang juga mencanangkan untuk melakukan reinterpretasi konstitusi pasifis yang selama ini mengekang Jepang.

Reinterpretasi tersebut kemudian mengizinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan militer bagi JSDF jika Jepang sedang diserang oleh negara lain dan jika negara sekutu Jepang sedang terlibat konfrontasi dengan negara lain. Hal tersebut

dilakukan untuk membuat Jepang lebih aktif dalam mewujudkan perdamaian yang dilegitimasi oleh Jepang

6.2 Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini melihat bagaimana respon Jepang terhadap kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur tahun 2013-2017. Bagi penulis selanjutnya, penulis menyarankan sebaiknya penulis selanjutnya dapat meneliti mengenai bagaimana suatu isu dalam kawasan mampu mempengaruhi dinamika kompleksitas keamanan kawasan. Sehingga, unit analisa yang dapat dilihat adalah bagaimana isu dalam suatu negara mampu mempengaruhi kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Allen, John, Benjamin Sugg. 2016. *"The US-Japan Alliance"*. Asian Alliance Working Paper Series
- Anh ,Duong Nu Hoang.2013. *"Multipolarity and Stability in Asia"*. Victoria University of Wellington New Zealand
- Arms Control Association. 2017. *"Chronology of US-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy"*, Arms Control Association, diakses dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>
- Atanassova-Cornelis, Elena. 2014. *"Japan's New Approach to National Security"*. European Union Institute for Security Studies
- Bajoria, Jayshree, Youkyung Lee,2011. *"The US-South Korea Alliance"*. Council on Foreign Relations, diakses dari <https://www.cfr.org/backgrounder/us-south-korea-alliance>
- BBC News. 2015. *"Japan and South Korea Agree WW2 'Comfort Women' Deal"*. BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-35188135> pada 26 Desember 2017 pukul 23.30 WIB
- BBC News. 2018. *"Toothless Tiger: Japan Self-Defense Forces"*, BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-34485966> diakses pada 29 April 2018
- Ben-Ari, Eyal. 2015. *"Changing Japanese Defense Policies"*. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Mideast Security and Policy Studies No. 112
- Bendini, Roberto. 2012. *"In-Depth Analysis: Japan Foreign and Security Policy at a Crossroad"*. Police Department. Directorate-General for External Policies, Europe Union
- Betts , Richard K. 1994. *"Wealth, Power, and Instability: East Asia and the United States after the Cold War"*. International Security, MIT Press, Vol. 18, No. 3, Winter
- Biddle, Stephen. 2004. *"Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle"*. United Kingdom: Princeton University Press

- Bierri, Matthias. 2014. *"Japan's Military Rebirth"*. Center for Security Studies (CSS) Analyses in Security Policy, no. 155
- Blomquist, Rachel and Daniel Wertz. 2015. *"An Overview of North Korea-Japan Relations"*. The National Committee on North Korea (NCNK)
- Boehm, Richard G. "East Asia" dalam buku *"Glencoe World Geography"*. Texas Edition
- Buzan Barry, Ole Waever. 2003. *"Region and Powers: The Structure of International Security"*. Cambridge University Press 2003
- Capistrano, Andrew R, Suhei Kurizaki. 2016. *"Japan's Changing Defense Posture and Security Relation in East Asia"*. The Korean Journal of International Studies, Vol. 14, No. 1
- Chanlett-Avery, Emma, Ian E Rinehart. 2016. *"The US Military Presence in Okinawa and Futenma Base Controversy"*. Congressional Research Service
- Chanlett-Avery, Emma. 2017. *"The 2015 Comfort Women Agreement: A Precusor to a Stronger Japan-ROK Partnership?"* dalam buku *"Pivotal Issues in Korea-Japan-US Relation: Perspective From Emerging Leaders"*. Washington DC: The Maureen and Mike Mansfield Foundation
- Chapman, Bert. 2017. *"The East Asia Sea in DOD China Military Power Reports"*. The Korean Journal of Defense Analysis. Vol. 29, No. 1
- Chitwood, Matt. 2012. *"Allies at Odds: The North Korea Factor in China's Foreign Policy Strategy"*. US-Korea Institute. John Hopkins Unviersity
- Cooper , Barry. 2016. *"The Evolution of Japanese Security Policy"*. Canadian Global Affair Institute
- Council on Foreign Relations. 2018. *"North Korea Military Capabilities"*. Council on Foreign Relation Official Websites, diakses dari <https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities>
- Cumings, Bruce. 2010. *"Overview: The Korean War and Its Legacy"*. Feeman Spogli Institute for International Studies, Fall

- Departement of Defense United States of America. 2004. *Element of Defense Transformation*. Washington DC: Departement of Defense Office of Freedom of Information and Security Review
- Duchatel, Mathieu. 2016. *China's Policy in the East China Sea: The Role of Crisis Management Mechanism Negotiations with Japan (2008-2015)*. Centre d'etude Francais la Chine Contemporaine
- Eun-Mi, Choi. 2010. *Memory Politics and International Relations in East Asia: Focusing on "Past Problem" between South Korea and Japan*. International Area Review, Volume 3 No. 2, Juni 2010
- Fackler, Martin. 2014. *Japan Ends Decades-Long Ban on Export Weapon*. The New York Times, diakses dari <https://www.nytimes.com/2014/04/02/world/asia/japan-ends-half-century-ban-on-weapons-exports.html> pada 12 Januari 2018 pukul 01.45 WIB
- Fairbank, John K, dkk. 1960. *East Asia: The Modern Transformation*. Houghton Mifflin Company, Boston, USA
- Felician, Stefano. 2011. *North and South Korea: A Frozen Conflict on the Verge of Unfreezing?*. Istituto Affari Internazionali (IAI) Working Papers 11
- Fukuyama, Francis. 1993. *The U.S-Japan Security Relation After the Cold War*. Research and Development (RAND Corporation)
- Garcia Zenel. 2016. *Power Cycle and Security Complexes: Evolution of the East Asian Supercomplex*. Wiley Periodical Inc: Policy Studies Organization, Asian Politic & Policy, Vol. 8, No. 4, Issues 4
- Glaser, Bonnie S. 2016. *China's Air Defense Identification Zone: Impact on Regional Security*. Center for Strategic and International Studies (CSIS), diakses dari <https://www.csis.org/analysis/chinas-air-defense-identification-zone-impact-regional-security> pada 13 Januari 2018 pukul 23.45 WIB
- Global Fire Power. *Japan Military Strength*, diakses dari https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=japan

- Gray, Gavan P. 2013. *"Japan's Defense Build-up and Its Meaning for Asia"*. European Institute for Asian Studies Briefing Paper
- Green, Michael J. 2007. *"The US-Japan Alliance: A Brief Strategic History"*. Asian Government and Legal System, Official US Navy Photograph, Volume 12, no. 3, Winter
- Hirose, Taisuke. 2014. *"Japan's New Arm Export Principles: Strengthening US-Japan Relations"*, Center for Strategic and International Studies, diakses dari <https://www.csis.org/analysis/japan%E2%80%99s-new-arms-export-principles-strengthening-us-japan-relations>
- Hornung, Jeffrey W. 2015. *"Gauging Japan's 'Proactive Contribution to Peace' "*. Reuters, diakses dari <https://thediplomat.com/2015/10/gauging-japans-proactive-contributions-to-peace/>
- Hughes, Chris. 2017. *"Japan's Emerging Arms Transfer Strategy: Diversifying to Re-Centre on the US-Japan Alliance"*. Routledge: Taylor&Francis Group, The Pacific Review
- Hughes, Chris. 2017. *"Japan's Emerging Arms Transfer Strategy: Diversifying to Re-Centre on the US-Japan Alliance"*. Routledge: Taylor&Francis Group. The Pacific Review
- Ikenberry, G. John. 2004. *"American Hegemony and East Asia Order"*. Australian Journal of International Affairs, Vol. 58, No. 3, pp. 353-367
- Kato, Norihiro. 2014. *"Japan's Break With Peace"*. The New York Times, diakses dari <https://www.nytimes.com/2014/07/17/opinion/norihiro-kato-japans-break-with-peace.html>
- Kemenade, Willem Van. 2006. *"China and Japan: Partner or Permanent Rivals?"*. The Netherland Institute of International Relation Clingendael, Clingendael Diplomacy Paper no. 9
- Ko, Sangtu. 2014. *"Six Party Talks"*. Yonsei University, Seoul, South Korea, Potical Studies Association, diakses dari <https://www.psa.ac.uk/conference/2014-conference/intelligence-security-and-ir-theory>

- Konishi, Weston S. 2011. *"Denuclearizing North Korea: Exploring Multilateral Approaches to Risk Reduction and Peace Regime Building"*. The Institute for Foreign Policy Analysis (IFPA)
- Kovach, Bob, Chelsea J Carter. 2012. *"US-Japan Deal Withdraws 9000 Marines from Okinawa"*, CNN News, diakses dari <http://edition.cnn.com/2012/04/27/world/asia/japan-us-okinawa/index.html>
- L. Ritchey, Jeffrey. 2015. *"Society and Culture: Confucianism in East Asia Today"* dalam buku *"East Asia in The World: An Introduction"*. Routledge: Taylor and Francis Group, New York
- Lendon, Brad. 2017. *"North Asia on A Knife's Edge: Whose Position is the Stongest?"*. CNN, diakses dari <http://edition.cnn.com/2017/03/16/china/asia-military-balance-china-koreas-japan-us/index.html>
- Liff, Adam P. 2015. *"Japan's Defense Policy: Abe the Evolutionary"*. The Elliot School of International Affairs, The Washington Quarterly, Summer
- Manyin, Mark E. dkk. 2014. *"U.S-South Korea Relation"*. Congressional Research Service
- Marcus, Jonathan. 2015. *"Japan's (Self) Defense Forces"*. BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-asia-33549015>
- McCurry, Justin. 2013. *"Japan Increases Defense Budget Amid Tensions with China"*, The Guardian, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2013/dec/17/japan-increases-defence-budget-tensions-china>
- Mihali, Alexandra. 2014. *"An Overview on Japan's National Security Strategy"*. Conflict Studies Quarterly, Issues 6
- Mihali, Alexandra. 2014. *"An Overview on Japan's National Security Strategy"*. Conflict Studies Quarterly, Issues 6
- Ministry of Defense Japan, 2017. *"Defense Program and Budget of Japan 2013"*, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/
- Ministry of Defense Japan. *"Japan Defense Budget 2013-2017"*, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/

- Ministry of Defense Japan. "Defense Program and Budget of Japan: Overview of FY2014 Budget", diakses dari website resmi Kementerian Pertahanan Jepang http://www.mod.go.jp/e/d_budget/
- Ministry of Defense Japan. 2013. "Establishment of National Security Council: Organization Responsible for Japan's Security and Defense", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2014/DOJ2014_2-2-1_web_1031.pdf
- Ministry of Defense Japan. 2013. "Japan's Security and Defense Policy and The Japan-US Alliance: National Security Strategy and National Defense Program Guidelines, etc", diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_2-2-1_web.pdf
- Ministry of Defense Japan. 2016. "China's Activities Surrounding Japan's Airspace". Annual Defense White Paper, http://www.mod.go.jp/e/d_act/ryouku/img/graph02b_eL.jpg
- Ministry of Foreign Affairs Japan. "Japan Security Policy in Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan's Survival and Protect Its People: Measures for Self-Defense Permitted Under Article 9 of the Constitution", diakses dari http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html
- Ministry of Foreign Affairs Japan. "Japan's Policies on The Control of Arms Exports", diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/>
- Ministry of National Defense South Korea. "2016 Defense White Paper", diakses pada website resmi Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan hal 48 diakses dari http://www.mnd.go.kr/cop/pblictn/selectPublicationsUser.do?siteId=mndEN&componentId=51&id=mndEN_031300000000
- Mizokami, Kyle. 2014. "Five Japanese Weapons of War that China Should Fear". The National Interest, diakses dari <http://nationalinterest.org/feature/five-japanese-weapons-war-china-should-fear-10660>

- Munakata, Naoko. 2006. *Transforming East Asia: The Evolution of Regional Economic Integration*. Brooking Institution Press. Research Institute of Economic, Trade, and Industry
- Nakanishi, Hiroshi. 2015. *Reorienting Japan? Security Transformation Under the Second Abe Cabinet*. Asian Perspective
- Nanto , Dick K, Mark E. Manyin. 2010. *China-North Korea Relations*. Congressional Research Service
- Noviryani, Mely. 2014. *Natuna dan Transformasi External Regional Security Super Complexes Laut China Selatan*. Jurnal Transformasi Global Universitas Brawijaya, Vol. 1 No. 1, hal 41 2014 diakses dari <http://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/9>
- Official Website of Japan Ministry of Defense. 2017. *Defense of Japan (White Paper)*, diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/
- Official Website of Japanese Ministry of Defense. 2012. *Abduction of Japanese Citizen by North Korea*. Diakses dari http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/abduction/pdfs/abductions_en.pdf pada 26 Desember 2017 pukul 01.30 WIB
- Panda, Rajaram. 2010. *North Korea's Nuclear Issues: Security Implication for Asia*. The Institute Defence Studies and Analysis, Vol. 4 No. 2
- Panton, Michael A. 2010. *Politics, Practice, and Pasifism: Revising Article 9 of the Japanese Constitution*. Asian Pasific Law&Policy Journal
- Prescott , Anne. 2015. "Overview: Introducing East Asia" dalam buku *East Asia in the World: An Introduction*. Routledge: Taylor and Francis Group, New York
- Ryall, Julian.2012. *Japan Poised to Shoot Down North Korean Missile*. The Telegraph, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9728806/Japan-poised-to-shoot-down-North-Korean-missile.html>

- Sakaki, Alexandra. 2015. "Japan's Security Policy: A Shift Direction Under Abe?". Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP Research Paper). German Institute for International and Security Affairs
- Sheen, Seongho and Jina Kim. 2012. "What Went Wrong With the ROK-Japan Military Pact?". Asia Pasific Buletin Number 176
- Sheffield, Carrie. 2014. "Japan Bolsters Its Military Spending". Forbes, diakses dari <https://www.forbes.com/sites/carriesheffield/2014/05/31/japan-bolsters-its-military-spending/#4a39e4636612>
- Tatsumi, Yuki. 2014. "Japan's Foreign Policy Challenges in East Asia: Views from Next Generation". Washington DC: STIMSON Center
- The Law Library of Congress. 2015. "Japan: Intrepretation of Article 9 of the Constitution". Global Legal Research Center
- Tosaki, Hirofumi. "The North Korean Nuclear Issues and Japan's Deterrence Posture". The Japan Institute of International Affairs
- Wang, Ming. 2016. "Understanding Japan-China Relations: Theories and Issues". Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
- Yoshida, Reiji. 2010. "Comfort Women Issue Refuse to Go Away: Nationalist using Asahi Errors as Ammo Against 1993 Apology". The Japan Times, diakses dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/27/reference/comfort-women-issue-refuses-go-away/#.WkYmVreWbIV>
- Yun-Hyung, Gil. 2017. "After Signing GSOMIA, Japan Eyeing Bigger Military Cooperation with South Korea". South Korea Daily Newspaper: The Hakyoreh, diakses dari http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/771985.html